



PROVINSI BALI
PEMERINTAH KABUPATEN
TABANAN

2025
P

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TABANAN NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN**

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ANGGARAN 2025

LAMPIRAN I	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	1	s/d	2
LAMPIRAN II	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	3	s/d	8
LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	9	s/d	402
LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN TABANAN	403	s/d	635
LAMPIRAN V	REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	636	s/d	640
LAMPIRAN VI	REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	641	s/d	646
LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD	647	s/d	661
LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	662	s/d	787
LAMPIRAN IX	SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA	788	s/d	807
LAMPIRAN X	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN			808
LAMPIRAN XI	DAFTAR PIUTANG DAERAH			809
LAMPIRAN XII	DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA			810
LAMPIRAN XIII	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN			811
LAMPIRAN XVI	DAFTAR PINJAMAN DAERAH			812



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI
PERATURAN DAERAH**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 867/04-E/HK/2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan menyepakati beberapa ketentuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disempurnakan sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengantar Bupati Tabanan Nomor 100.3/2564/HK tanggal 13 Oktober 2025 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan penyesuaian atas evaluasi.
- KEDUA : Penyesuaian atas evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 14 Oktober 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



I NYOMAN ARNAWA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Bupati Tabanan di Singasana; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH

URAIAN EVALUASI				URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
I Tujuan Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan a. kepentingan umum; b. kepentingan umum; c. perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).				
II Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pelaksanaan terhadap evaluasi Perubahan APBD, sebagai berikut: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses				
Tabel 1 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD 2025 Kabupaten Tabanan				
No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025	22 Tahun 2025	25 Juli 2025	Sesuai,
2	Penyampaian Rancangan (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direvisi oleh APP	B.900.1.1.1/6748/Bid.Ang/Bakeuda	04 Agustus 2025	(paling lambat minggu III Bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.900.1.1.1/6925/Bid.Ang/Bakeuda	07 Agustus 2025	Sesuai,
4	Kesepakatan Rancangan P-KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tabanan	100.3.7.1/7634/BAKEUDA 170/3691/DPRD	29 Agustus 2025	(paling lambat minggu I Bulan Agustus)
	Kesepakatan Rancangan P-PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tabanan	100.3.7.1/7635/BAKEUDA 170/3692/DPRD	29 Agustus 2025	Sesuai,
5	Penyampaian Rancangan Perda tentang P-APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Tabanan	B.900.1.1.1/7647/Bid.Ang/Bakeuda	01 September 2025	(paling lambat minggu I Bulan Agustus)
6	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tabanan dan Kepala Daerah tentang Ranperda Perubahan APBD 2025	180/9/HK 170/9/DPRD	18 September 2025	Tidak Sesuai,
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan P-APBD Kabupaten Tabanan untuk dievaluasi	900.1.15.3/8284/Bid.Ang/BAKEUDA	19 September 2025	(paling lambat minggu II Bulan Agustus)
Berdasarkan Tabel 1 tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan belum berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD, sebagaimana maksud Bab III.A. I.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan harus memperhatikan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 4.7.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar: 1. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan 3. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, sebagaimana				
III Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah A. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang Besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi mandatory spending, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk mandatory spending fungsi pendidikan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp543.340.565.933,00 atau 23,11% dari total Belanja Daerah berkurang sebesar Rp17.575.062.977,00 atau 3,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp560.915.628.910,00 atau 24,25% dari total Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Kebudayaan dan butir 5.1.2 dan 5.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan tersebut, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Tabanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp792.819.201.241,00 atau 38,35% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa, bertambah sebesar Rp86.347.148.685,00 atau 12,22% dari yang dianggarkan Rp706.472.052.556,00 atau 34,61% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa. 2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp792.819.201.241,00 atau 38,35% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa, bertambah sebesar Rp86.347.148.685,00 atau 12,22% dari yang dianggarkan Rp706.472.052.556,00 atau 34,61% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa. Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

URAIAN EVALUASI		URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 5.3.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu Belanja Infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa, sebagaimana maksud butir 3.2.2.k dan 3.2.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 5.3.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang
3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Penganggaran Belanja Pegawai semula Rp1.059.331.158.083,00 berkurang Rp71.479.468.710,00 atau 6,75% menjadi Rp987.851.689.373,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Penyediaan anggaran Belanja Pegawai diproyeksikan sebagaimana Tabel 2, sebagai berikut:		
Tabel 2 Perhitungan Belanja Pegawai		
No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	a. Total Belanja Daerah pada APBD TA 2023	2.351.348.077.093,00
	1 Belanja Pegawai	987.851.689.373,00
	a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN	110.072.245.000,00
	b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN	
	c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tampil) Guru ASN	614.116.000,00
	Jumlah Tunjangan Guru	110.686.361.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru	877.165.328.373,00
2	Persentase Belanja Pegawai terhadap APBD	37,3
Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp877.165.328.373,00 atau 37,30% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 belum memenuhi ketentuan alokasi Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengalokasikan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir 3.4.1.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024.		
4. Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang telah Ditentukan Penggunaannya a. Penggunaan Opener PKB Penyediaan anggaran untuk penggunaan Opener PKB yang tercantum dalam Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk penggunaan hasil penerimaan Opener Pajak Kendaraan Bermotor (Opener PKB) semula Rp11.402.696.000,00 Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan hasil penerimaan Opener PKB paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana b. Penggunaan PBUT atas Tenaga Listrik Penyediaan anggaran untuk penggunaan PBUT atas Tenaga Listrik semula Rp12.873.091.900,00 atau 36,78% dari total pendapatan PBUT atas Tenaga Listrik sebesar Rp35.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.012.647.100,00 atau Penggunaan atas hasil penerimaan PBUT atas Tenaga Listrik: 1) hasil penerimaan PBUT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. c. Penggunaan atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Penyediaan anggaran untuk penggunaan Pajak Rokok semula Rp26.718.858.500,00 atau 100,00% dari total Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Hasil penerimaan Pajak Rokok Bagian Kabupaten dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, yaitu: 1) Penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan, terdiri dari: a) penggunaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% dari 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 2) Penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk minimal berupa sosialisasi ketentuan dibidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Diprioritaskan apabila DBH CHT tidak mencukupi d. Penggunaan Pajak Air Tanah Penyediaan anggaran untuk penggunaan Pajak Air Tanah semula Rp860.000.000,00 atau 100,00% dari total pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp860.000.000,00 bertambah sebesar Rp716.763.400,00 atau 83,34% menjadi Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan hasil penerimaan PAT sebesar Rp1.576.763.400,00 atau 157,68% melebihi dari total penerimaan PAT sebesar Rp1.000.000.000,00. Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% untuk penerangan, pengendalian, dan pemulihan pemukiman dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan Dalam hal terdapat kendala pada proses penarikan data penandaan Belanja Wajib Hasil Penerimaan Pajak yang telah Ditentukan Penggunaannya dalam SIPD RI, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar berkoordinasi dengan Pusat Data Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
B. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan Standar Pelayanan 1. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp8.801.971.400,00 atau 1,80% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp487.780.879.783,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. angka partisipasi sekolah sebesar Rp648.489.000,00; b. literasi dan numerasi sebesar Rp5.855.634.000,00; c. keamanan, dan ketidakekaman, dan inklusivitas sebesar Rp430.506.400,00; dan d. kekhususan PAUD sebesar Rp1.867.342.000,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing masing Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
2. SPM Bidang Kesehatan Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp3.886.340.700,00 atau 0,66% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp590.486.402.960,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp210.168.000,00; b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp9.411.000,00; c. pelayanan kesehatan balita sebesar Rp9.403.000,00; d. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar Rp686.410.000,00; e. pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar Rp28.845.000,00; f. pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar Rp705.419.000,00; g. pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar Rp7.308.000,00; h. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar Rp8.576.000,00; i. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp410.747.000,00; j. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp469.644.000,00; dan		

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
1. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sebesar Rp273.174.700,00 Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.383.475.600,00 atau 1,55% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp283.677.558.297,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. pengolahan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota sebesar Rp4.188.886.600,00; dan b. pengolahan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota sebesar Rp194.589.000,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp809.920.300,00 atau 0,36% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp227.186.227.300,00 yang diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp787.547.300,00; dan b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sebesar Rp22.373.000,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Tabanan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan 5. SPM Bidang Sosial Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp597.135.000 atau 4,77% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp12.517.426.800,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial sebesar Rp372.870.000,00; dan b. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebesar Rp224.265.000,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Sosial untuk Kabupaten Tabanan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 6. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Transtibum Linmas sebesar Rp1.223.758.700,00 atau 4,56% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp26.842.779.700,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten/kota sebesar Rp245.637.600,00; b. pelayanan informasi rawan bencana sebesar Rp20.000.000,00; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar Rp143.472.500,00; d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp349.212.400,00; dan e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar Rp465.436.200,00. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Transtibum Linmas untuk Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berikutan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar diprioritaskan dalam rangka pemenuhan SPM. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
C. Penyediaan Anggaran Alokasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi Stunting Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran penurunan prevalensi kelangkaan (underweight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi stunting (kurus) pada anak balita semula Rp210.369.609.463,44 bertambah Rp705.724.077,80 menjadi Rp211.075.333.541,24 atau 8,98% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada: a. subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp2.333.800.390,07; b. subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp4.542.916.488,77; c. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Baturiti 1 sebesar Rp2.120.586.188,00; d. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kediri 1 sebesar Rp2.826.186.703,20; e. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Penebel 1 sebesar Rp2.199.062.196,00; f. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tabanan 3 sebesar Rp2.255.258.963,30; g. subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan sebesar Rp115.200.000.000,00; h. subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan sebesar Rp3.340.682.190,50; i. subkegiatan Pemantauan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai; j. subkegiatan Pendampingan Keluarga Bersakit Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kebaruan, Ibu hamil/bidai) sebesar Rp1.261.600.000,00. Belanja pada sub subkegiatan yang diuraikan sebagai alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok yang berdampak langsung dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/0335/Bangda tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Pemetaan subkegiatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/B/716/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2024 a.n. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 400.5.2/0335/Bangda tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Pemetaan subkegiatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. 2. Alokasi Anggaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem semula Rp59.601.089.859,00 bertambah Rp2.407.877.371,80 menjadi Rp62.008.967.230,80 atau 2,64% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang antara lain tercantum pada: a. subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp11.494.763.700,00 diuraikan dalam subkegiatan objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp8.227.106.703,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp5.065.343.218,80, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp27.986.371,80 diuraikan dalam subkegiatan objek Belanja Baran, Makanan Kesehatan bagi Peserta PMP) dan OP Kelas 3 sebesar Rp3.929.922.500,00, Belanja b. subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp27.040.569.576,00 diuraikan dalam subkegiatan objek Belanja Baran, Makanan Kesehatan bagi Peserta PMP) dan OP Kelas 3 sebesar Rp3.929.922.500,00, Belanja c. subkegiatan Rehabilitasi Jaminan Igtan Permukiman sebesar Rp2.571.556.800,00 diuraikan dalam subkegiatan objek Belanja Barang untuk Dupa/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp819.000.000,00, Belanja Makanan dan	

URAIAN EVALUASI		URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT		
e. subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sebesar Rp4.061.394.800,00 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp7.939.800,00, Belanja Uraian belanja pada subkegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok yang berdampak langsung dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pengendalian inflasi di daerah semula Rp106.876.002.900,00 bertambah Rp39.629.358.700,00 menjadi Rp146.505.361.600,00 atau 6,23% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain dianggarkan pada: a. subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sebesar Rp9.582.133.600,00 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp1.500.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Rekonstruksi Jalan sebesar Rp92.254.430.500,00 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp1.030.800,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan c. subkegiatan Penyelenggaraan Berka Jalan sebesar Rp16.860.685.200,00 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp723.600,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- d. subkegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Uraian belanja pada subkegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok yang berdampak langsung dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi Pemerintah Kabupaten Tabanan agar tetap fokus terhadap pengendalian inflasi antara lain: a. peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; b. pengendalian laju alih fungsi lahan; c. pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; d. penguatan tata kelola logistik daerah; dan e. pengawasan harga dan operasi pasar. 4. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Sehat Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program Prioritas Nasional, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 5.3.2.4.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta memperbaiki Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.2119/SJ tanggal 22 April 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan agar mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dianggarkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tanggal 7 Mei 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Walikota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih. 6. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp679.935.499.505,00 atau 58,22% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.167.813.860.898,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyusunkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PR/T/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mempertahankan alokasi anggaran dan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan butir 5.2.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.				
D. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas 1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dipevayakan sebagaimana Tabel 3, sebagai berikut:				
Tabel 3 Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Prioritas Pembangunan Nasional terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025				
No.	Prioritas Pembangunan Nasional	APBD TA 2025 (Rp)	R-Perubahan APBD	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1	2	3	5	6
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	-	-	-
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	2.401.588.000,00	6.851.489.100,00	0,00
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartani	952.887.000,00	45.763.906.600,00	0,02
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prastasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial) dan	189.558.500,00	515.289.497.063,00	0,22
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	-	549.519.000,00	0,00
6	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	20.000.000,00	16.953.672.424,00	0,01
7	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	6.979.502.100,00	502.016.974.439,00	0,22
8	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	1.692.826.200,00	58.549.080.900,00	0,03
9	Membangun Lingkungan Hidup, Menegakkan Ketahanan Berbasis dan Perubahan Iklim,	47.837.040.300,00	562.221.200,00	0,00
10	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	280.018.651.800,00	301.272.568.397,00	0,13
11	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	39.113.843.350,00	32.899.959.280,00	0,01
12	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	556.045.893.070,00	164.297.979.520,00	0,07
13	Menegembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	7.811.150.400,00	4.256.610.200,00	0,00
14	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Seng	1.223.839.664.991,00	590.047.597.767,00	0,26
15	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	11.383.121.000,00	52.121.561.100,00	0,02
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.204.285.728.711,00	-	0,97
Total Belanja Daerah		2.313.446.473.573,00	2.351.348.077.093,00	

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2025 ditetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut

a. memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

b. memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi baru

c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartani industri di sentra produksi melalui

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2025 ditetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:

- a. memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartani industri di serta produksi melalui peran aktif koperasi;

URAIAN EVALUASI						URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT					
d. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan e. melanjutkan hibrisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; g. pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan h. memperkuat penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Tabel 3 tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar menyelenggarakan alokasi belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, seperti memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal SIPD belum menghasilkan laporan Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Prioritas Pembangunan Nasional terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka diupayakan melakukan pemetaan secara manual terhadap prioritas nasional. 2. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025. Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, meliputi: a. Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal; b. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketengakerjaan; c. Ekonomi Kerthi Bali yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata; d. Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi; e. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi; f. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali; dan g. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran dalam rangka Sinkronisasi terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:						Pemerintah Kabupaten Tabanan akan menyelenggarakan alokasi belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, seperti memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal SIPD belum menghasilkan laporan Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Prioritas Pembangunan Nasional terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka diupayakan melakukan pemetaan secara manual terhadap prioritas nasional. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan menyelenggarakan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana catatan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025. Alokasi anggaran untuk sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi agar mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Prioritas Provinsi pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sudah menyesuaikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu: a. Prioritas Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal; b. Prioritas Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketengakerjaan; c. Prioritas Ekonomi Kerthi Bali yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata; d. Prioritas Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi; e. Prioritas Lingkungan, Kehutanan, dan Energi; f. Prioritas Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali; dan g. Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. 3. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:					
Tabel 4 Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025											
No.	Prioritas Provinsi	APBD TA 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja	R-Perubahan APBD	Rasio						
1	2	3	4	5	6						
1.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	37.145.949.200,00	1,69%	59.379.305.500,00	2,59%						
2.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketengakerjaan	1.119.780.947.091,00	50,80%	1.084.035.132.231,00	47,31%						
3.	Ekonomi Kerthi Bali yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi,	42.951.280.450,00	1,95%	40.245.759.230,00	1,76%						
4.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	258.590.948.800,00	11,73%	325.073.744.895,00	14,19%						
5.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	47.277.827.900,00	2,14%	49.450.191.709,00	2,16%						
6.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	0	0,00%	0	0,00%						
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	698.538.775.270,00	31,69%	733.242.503.133,00	32,00%						
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.455.550.270.569,00	69,92%	1.445.636.730.751,00	61,48%						
Total Belanja Daerah		2.313.446.473.573,00		2.351.348.077.093,00							
Berdasarkan Tabel 4 tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar menyelenggarakan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana catatan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025.											
Alokasi anggaran untuk sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi agar mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Prioritas Provinsi pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sudah menyesuaikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:											
a. Prioritas Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal;											
b. Prioritas Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketengakerjaan;											
c. Prioritas Ekonomi Kerthi Bali yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata;											
d. Prioritas Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi;											
e. Prioritas Lingkungan, Kehutanan, dan Energi;											
f. Prioritas Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali; dan											
g. Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.											
3. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:											
Tabel 5 Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025											
No.	Prioritas Daerah	APBD TA 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja	R-Perubahan APBD	Rasio Terhadap Belanja						
1	2	3	4	5	6						
1.	Bidang Pangan, Sandang dan Papan	42.891.361.300,00	1,95%	40.188.624.080,00	1,75%						
2.	Bidang Kesehatan dan Pendidikan	1.105.684.413.691,00	50,16%	1.066.646.472.731,00	46,55%						
3.	Bidang Jaminan Sosial dan Ketengakerjaan	14.449.826.300,00	0,66%	17.549.865.700,00	0,77%						
4.	Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	31.433.123.000,00	1,43%	53.505.201.100,00	2,34%						
5.	Bidang Pariwisata	3.652.826.200,00	0,20%	3.814.104.400,00	0,25%						
6.	Penguatan Infrastruktur	298.918.816.700,00	13,56%	367.617.528.697,00	16,04%						
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	705.255.361.520,00	31,99%	740.084.839.982,00	32,30%						
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.204.285.728.711,00	95,28%	2.291.426.536.690,00	97,45%						
Total Belanja Daerah		2.313.446.473.573,00		2.351.348.077.093,00							
Berdasarkan Tabel 5 tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar menyelenggarakan alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dimaksud sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.											
Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar mendukung seluruh Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025.											
E. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pendanaan undangan, sebagai berikut											
1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan											

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan semula Rp30.534.318.200,00 berkurang Rp5.884.818.530,00 menjadi Rp24.649.499.670,00 atau 1,05% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut: - alokasi belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat Daerah Rp6.933.812.910,00 atau 0,29% dari total belanja daerah; - TPP pada Inspektorat Daerah sebesar Rp7.428.747.190,00 atau 0,32% dari total belanja daerah; dan - alokasi belanja Inspektorat Daerah di luar belanja gaji dan tunjangan dan TPP sebesar Rp10.286.939.570,00 atau 0,44% dari total belanja daerah, yang antara lain tercantum pada subkegiatan yang mendukung pengawasan yaitu: - subkegiatan Revisi Laporan Keuangan sebesar Rp710.032.000,00; dan - subkegiatan Pengawasan Desa sebesar Rp743.732.000,00. Kabupaten Tabanan belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sekurang-kurangnya 0,50% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Gaji dan Tunjangan pada Inspektorat dan di atas Rp15.000.000.000,00. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengallokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,50% dari total Belanja di luar Gaji dan Tunjangan pada Inspektorat Daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00, sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33.4.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penetapan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: - kegiatan pengawasan, yaitu: - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; - revisi dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan RUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD; - pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah; - revisi laporan keuangan; - kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, revisi laporan kinerja, revisi LPDP, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan - penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan KPK, operasionalisasi sapa bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerja sama APSP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang terdampak korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APSP. - peningkatan kapabilitas APSP meliputi, kapabilitas APSP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APSP; dan - sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain, sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. - Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum Pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan semula Rp6.923.135.000,90 berkurang Rp16.626.420,00 menjadi Rp6.406.508.580,90 atau 0,27% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan pada subkegiatan: - subkegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN sebesar Rp812.857.800,00; - subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkrit, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp1.136.247.900,00; dan - subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar Rp1.945.404.000,00. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan agar tetap mengallokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.2.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. - Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda (Paskibraka) Pemerintah Kabupaten Tabanan mengallokasikan anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Badan Kesatuan Bangsa semula Rp1.000.000.000,00 berkurang Rp1.069.200,00 menjadi Rp998.930.800,00 atau 0,00% dari total Belanja Daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Untuk itu, dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purna Paskibraka, sebagaimana maksud butir 5.3.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. - Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pemerintah Kabupaten Tabanan mengallokasikan anggaran untuk FKUB semula Rp52.280.000,00 berkurang Rp15.492.600,00 menjadi Rp36.787.400,00 atau 0,00% dari total Belanja Daerah, yang diuraikan dalam subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan alokasi anggaran yang ada untuk tetap mengoptimalkan dan menjaga kerukunan bersama di Kabupaten Tabanan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendidikan Rumah Badah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 901/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam APBD. - Alokasi Anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Pemerintah Kabupaten Tabanan mengallokasikan anggaran untuk Forkompidsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp357.328.000,00 berkurang Rp79.968.500,00 menjadi Rp277.359.500,00 atau 0,01% dari total belanja daerah yang diuraikan dalam subkegiatan antara lain: - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Pasukan Kesiagaan Bidang Kewaspadaan, serta Perangkat Daerah di Daerah sebesar Rp87.772.000,00; - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp174.758.000,00; dan - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp14.829.500,00. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain tercantum pada Program Penguatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir 5.3.1 a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. - Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)	

URAIAN EVALUASI										URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT									
Retribusi Daerah	230.477.563.241,00	217.494.723.389,09	94,37	239.005.141.000,00	103.810.961.096,09	43,43	237.607.762.886,00	-	1.397.378.114,00	-0,61	43,69								
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.870.988.000,00	9.956.749.770,01	112,24	10.817.447.000,00	9.682.003.186,62	89,5	11.692.009.000,00		874.622.000,00	9,86	82,81								
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	161.846.445.264,00	46.785.425.773,92	28,91	122.500.000,00	20.414.000.036,70	16,664	49	138.381.684.072,00	138.259.184.072,00	85,43	14,75								
Pendapatan Transfer	1.692.787.896.180,00	1.668.429.518.987,00	98,56	1.486.860.341.638,00	737.641.393.326,00	49,28	1.454.299.007.935,00	-	42.561.333.703,00	-2,51	50,72								
Pendapatan Transfer Pemerintah	1.259.243.167.000,00	1.237.846.456.530,00	98,30	1.352.178.513.000,00	692.250.863.654,00	51,2	1.287.071.531.000,00	-	65.106.982.000,00	-5,17	53,78								
Pendapatan Transfer Antar Daerah	433.544.729.180,00	430.563.062.457,00	99,31	144.681.828.638,00	45.430.529.672,00	31,4	167.227.476.935,00	-	22.545.648.297,00	-5,2	27,17								
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang	-	-	-	-	15.318.412.871,00	0	15.318.412.871,00	-	15.318.412.871,00	0	100								
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	15.318.412.871,00	0	15.318.412.871,00	-	15.318.412.871,00	0	100								

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah semula Rp739.817.131.935,00 bertambah Rp15.536.343.023,00 menjadi Rp755.353.474.958,00 atau 33,11% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dirinci sebagaimana Tabel 8, sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan
sampai dengan Juni 2025

Uraian	Perubahan APBD 2025 (Rp)	Realisasi s/d Juni 2024 (Rp)	Realisasi s/d Juni 2025 (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	755.353.474.958,00	252.880.404.066,79	302.004.228.939,08	39,981
a. Pajak Daerah	366.671.959.000,00	116.778.146.653,67	168.097.264.619,67	45,84
b. Retribusi Daerah	237.607.762.886,00	7.337.600.625,00	103.810.961.096,09	43,69
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.692.069.000,00	8.591.690.175,01	9.682.003.186,62	82,81
d. Lain-Lain PAD yang Sah	139.381.684.072,00	120.172.966.613,11	20.414.000.036,70	14,65

Berdasarkan Tabel 8 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp302.004.228.939,08 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.880.404.066,79 atau meningkat sebesar Rp49.123.824.872,29. Apabila diprediksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebesar Rp604.008.457.878,16 lebih rendah dari rencana target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp755.353.474.958,00, sehingga akan berpotensi tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp151.345.017.079,84.

Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabanan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro. Pemerintah Kabupaten Tabanan agar tetap realistis dan cermat dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target Pendapatan Asli Daerah terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1) Pajak Daerah

a) Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan target Pendapatan Pajak Daerah semula Rp367.494.543.935,00 berkurang Rp822.584.935,00 menjadi Rp366.671.959.000,00 atau 16,07% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Tabel 8, dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp168.097.264.619,67 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp116.778.146.653,67 atau meningkat sebesar Rp51.319.117.966,00. Apabila diprediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebesar Rp336.194.529.239,34 lebih rendah dari rencana target Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp366.671.959.000,00, sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Pajak Daerah sebesar Rp30.477.429.760,66.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Pajak Daerah:

- (1) Pajak Reklame sebesar Rp1.560.000.000,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp2.360.000.000,00 yang diuraikan dalam rincian objek meliputi:
 - (a) Pajak Reklame Papan /Billboard/ Videotron/Megatron semula Rp1.380.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; dan
 - (b) Pajak Reklame Kain semula Rp180.000.000,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp980.000.000,00;
- (2) Pajak Air Tanah semula Rp860.000.000,00 bertambah Rp140.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00;
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) Rp23.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;
- (4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula Rp13.000.000.000,00 bertambah Rp13.000.000.000,00 menjadi Rp143.000.000.000,00;
- (5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - (a) (a)PBJT-Makanan dan/atau Minuman semula Rp28.000.000.000,00 bertambah Rp12.000.000.000,00 menjadi Rp40.000.000.000,00, terdiri dari :
 - i. PBJT-Restoran semula Rp27.850.000.000,00 bertambah Rp12.150.000.000,00 menjadi Rp40.000.000.000,00; dan
 - ii. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering semula Rp150.000.000,00 berkurang Rp150.000.000,00 menjadi Rp0,00;
 - (b) PBJT-Tenaga Listrik semula Rp35.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;
 - (c) PBJT-Jasa Perhotelan semula Rp24.940.000.000,00 bertambah Rp2.060.000.000,00 menjadi Rp27.000.000.000,00 terdiri dari:
 - i. PBJT-Hotel semula Rp13.600.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;
 - ii. PBJT-Vila semula Rp4.100.000.000,00 bertambah Rp1.060.000.000,00 menjadi Rp5.160.000.000,00;
 - iii. PBJT-Pondok Wisata semula Rp5.140.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp6.140.000.000,00; dan
 - iv. PBJT-Glamping semula Rp2.100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025.
- (6) PBJT-Jasa Parkir semula Rp160.000.000,00 berkurang Rp25.000.000,00 menjadi Rp135.000.000,00;
- (7) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan semula Rp1.876.858.000,00 bertambah Rp1.123.142.000,00 menjadi Rp6.000.000.000,00, terdiri dari:
 - i. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana semula Rp135.000.000,00 bertambah Rp1.053.142.000,00 menjadi Rp1.188.142.000,00;
 - ii. PBJT-Pameran semula Rp335.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;
 - iii. PBJT-Permainan Ketangkasan semula Rp330.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;
 - iv. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran semula Rp65.000.000,00 bertambah Rp60.000.000,00 menjadi Rp125.000.000,00;
 - v. PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kelain Binatang semula Rp0,00 bertambah Rp10.000.000,00 menjadi Rp10.000.000,00; dan
 - vi. PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa semula Rp11.858.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025.
- (8) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp68.932.639.148,00 berkurang Rp17.137.839.148,00 menjadi Rp51.794.800.000,00; dan
- (9) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula Rp50.165.046.787,00 berkurang Rp12.782.887.787,00 menjadi Rp37.382.159.000,00.

Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan kegiatan pemerintahan perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki qin atau belum/tidak memiliki qin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut dikenakan sebagai wajib pajak; dan

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TIRIKAT LANJUT
b. perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir 3.3.1.1.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2) Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp239.005.141.000,00 berkurang Rp1.397.378.114,00 menjadi Rp237.607.762.886,00 atau 10,42% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Tabel 8, dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp103.810.961.096,09 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.337.600.625,00 atau meningkat sebesar Rp96.473.360.471,09. Apabila diprediksi Pendapatan Retribusi daerah Tahun 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp207.621.922.192,18 lebih rendah dari rencana target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp237.607.762.886,00, sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Retribusi Daerah sebesar Rp29.985.840.593,82. Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Retribusi Daerah: a) retribusi jasa umum semula Rp233.645.000.000,00 berkurang Rp2.672.572.114,00 menjadi Rp230.972.427.886,00 yang diuraikan dalam rincian objek pendapatan meliputi: - retribusi pelayanan kesehatan semula Rp223.750.000.000,00 berkurang Rp2.672.572.114,00 menjadi Rp221.077.427.886,00 terdiri dari: - retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas semula Rp25.200.000.000,00 bertambah Rp6.827.427.886,00 menjadi Rp32.027.427.886,00; - retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah semula Rp198.500.000.000,00 berkurang Rp9.500.000.000,00 menjadi Rp189.000.000.000,00; dan - retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar Rp50.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025. - retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar Rp1.595.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; - retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp4.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; - retribusi pelayanan pasar sebesar Rp4.300.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; - retribusi jasa usaha sebesar Rp2.668.800.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; yang diuraikan dalam sub rincian objek meliputi: - retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp10.890.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; - retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp2.156.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; - retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebesar Rp21.900.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; - retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebesar Rp60.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; - retribusi penjualan hasil produksi usaha - retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp282.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025. b) retribusi perizinan tertentu sebesar Rp2.691.341.000,00 bertambah Rp1.275.194.000,00 menjadi Rp3.966.535.000,00, yang diuraikan dalam rincian objek: - retribusi persetujuan bangunan gedung semula Rp2.500.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp3.500.000.000,00; dan - retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) semula Rp191.341.000,00 bertambah Rp275.194.000,00 menjadi Rp466.535.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tabanan serta memperhatikan keadaan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan: - memberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; - kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan - insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan open PBD harus berdasarkan pada ketentuan PBD paling sedikit 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Sedangkan, untuk hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Tabanan menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, sebesar 75 dan 50% realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak masing-masing Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/13.1/4528/SJ tentang Penyesuaian Penetapan Kelangkaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp10.817.447.000,00 bertambah sebesar Rp874.622.000,00 menjadi sebesar Rp11.692.069.000,00 atau 0,51% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Tabel 8, dapat dilihat bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.682.003.186,62 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.591.690.175,01 atau meningkat sebesar Rp1.090.313.011,61. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan potensi penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan juga berdasarkan atas realisasi penerovoran bagian laba atas perrivertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Pemilik Modal (KPM). Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD semula sebesar Rp10.817.447.000,00 bertambah sebesar Rp874.622.000,00 menjadi sebesar Rp11.692.069.000,00, diuraikan ke dalam rincian objek meliputi: - bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula Rp8.792.447.000,00 bertambah Rp874.622.000,00 menjadi Rp9.667.069.000,00; - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Anaka Usaha) sebesar Rp25.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; dan - bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Badang Air Minum) sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar melakukan langkah langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Selubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: - keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; - peningkatan berupa jasa dan keuntungan bag hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; - peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; - peningkatan penyerangan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan - peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;	Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap melakukan langkah langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir 3.3.1.2.b. Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus lebih mengoptimalkan peran dewan komisaris/pengawas dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp122.500.000.000,00 bertambah Rp16.881.684.072,00 menjadi Rp139.381.684.072,00 atau 6,11% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Tabel 8, dapat dilihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.414.000.036,70 lebih rendah apabila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp120.172.966.613,11 atau menurun sebesar Rp99.758.966.576,41. Apabila direvisi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 berdasarkan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025, maka di proyeksikan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp40.828.000.073,40 lebih rendah dari rencana target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp139.381.684.072,00, sehingga akan berpotensi tidak mencapai target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp98.553.683.998,60. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: (a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp500.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam rincian objek: (1) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp300.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari: - i Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel sebesar Rp200.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; dan - ii Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025. (2) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp200.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025. (b) Hasil Kerja Sama Daerah semula Rp120.000.000,00 bertambah Rp13.000.000,00 menjadi Rp133.000.000,00; (c) Jasa Giro semula Rp1.800.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp2.000.000,00; (d) Pendapatan Bunga semula Rp200.000.000,00 berkurang Rp200.000.000,00 menjadi Rp0,00; (e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula Rp0,00 bertambah Rp2.315.605.000,00 menjadi Rp2.315.605.000,00; (f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula Rp0,00 bertambah Rp56.292.000,00 menjadi Rp56.292.000,00; (g) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula Rp0,00 bertambah Rp1.299.996.000,00 menjadi Rp1.299.996.000,00 yang diuraikan dalam rincian objek: (1) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula Rp0,00 bertambah Rp575.145.000,00 menjadi Rp575.145.000,00; (2) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula Rp0,00 bertambah Rp9.647.000,00 menjadi Rp9.647.000,00; (3) Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula Rp0,00 bertambah Rp132.195.000,00 menjadi Rp132.195.000,00 terdiri dari: - i Pendapatan Denda PBJT Makanan dan/atau Minuman Restoran semula Rp0,00 bertambah Rp63.088.000,00 menjadi Rp63.088.000,00; - ii Pendapatan Denda PBJT Jasa Perhotelan-Hotel semula Rp0,00 bertambah Rp57.385.000,00 menjadi Rp57.385.000,00; iii. Pendapatan Denda PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu semula Rp0,00 bertambah Rp11.722.000,00 menjadi Rp11.722.000,00; (4) Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp0,00 bertambah Rp574.578.000,00 menjadi Rp574.578.000,00; dan (5) Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula Rp0,00 bertambah Rp8.431.000,00 menjadi Rp8.431.000,00. (h) Pendapatan Denda Retribusi Daerah semula Rp0,00 bertambah Rp25.982.000,00 menjadi Rp25.982.000,00, yang diuraikan dalam rincian objek: (1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha semula Rp0,00 bertambah Rp1.064.000,00 menjadi Rp1.064.000,00 terdiri dari: i. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Karyawan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan semula Rp0,00 bertambah Rp874.000,00 menjadi Rp874.000,00; dan ii. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Aset Daerah-Pemakaian Aset Daerah semula Rp0,00 bertambah Rp190.000,00 menjadi Rp190.000,00; (2) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu semula Rp0,00 bertambah Rp24.918.000,00 menjadi Rp24.918.000,00. (i) Pendapatan Hasil Eksekusi atau Jaminan semula Rp0,00 bertambah Rp62.204.000,00 menjadi Rp62.204.000,00; (j) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp0,00 bertambah Rp121.605.072,00 menjadi Rp121.605.072,00 yang diuraikan dalam rincian objek: (1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS semula Rp0,00 bertambah Rp84.107.807,00 menjadi Rp84.107.807,00; (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS semula Rp0,00 bertambah Rp32.997.265,00 menjadi Rp32.997.265,00; dan (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp0,00 bertambah Rp4.500.000,00 menjadi Rp4.500.000,00. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tabanan agar lebih realistis dan cermat dalam perencanaan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi Pendapatan Daerah, sehingga perencanaan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi Pendapatan Daerah dimaksud. b. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp1.496.860.341.638,00 bertambah Rp13.719.952.783,00 menjadi Rp1.510.580.294.421,00 atau 66,22% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.352.178.513.000,00 berkurang Rp65.106.982.000,00 menjadi Rp1.287.071.531.000,00 atau 56,42% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain: a) dana desa sebesar Rp122.816.563.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; b) insentif fiskal semula Rp24.227.708.000,00 berkurang Rp70.007.000,00 menjadi Rp24.157.701.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; c) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp26.986.617.000,00 tidak mengalami perubahan dari dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023; d) dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp877.045.544.000,00 berkurang Rp20.158.582.000,00 menjadi Rp856.886.962.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp856.886.962.000,00; e) dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari: (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula Rp96.926.148.000,00 berkurang 45.100.693.000,00 menjadi 51.825.455.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.825.455.000,00; dan (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula Rp204.175.933.000,00 bertambah Rp222.300.000,00 menjadi Rp204.398.233.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nondak Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyeluruh Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp204.398.233.000,00. 2) Pendapatan Transfer antar Daerah semula Rp144.681.828.638,00 bertambah Rp78.826.934.783,00 menjadi Rp223.508.763.421,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut: a) Target Pendapatan Bagi Hasil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 semula	

URAIAN EVALUASI														URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT													
(1) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor semula Rp0,00 bertambah Rp13.494.403.891,00 menjadi Rp13.494.403.891,00; (2) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor semula Rp0,00 bertambah Rp11.965.458.060,00 menjadi Rp11.965.458.060,00; (3) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor semula Rp35.589.607.717,00 bertambah Rp21.127.324.233,00 menjadi Rp56.716.931.950,00; (4) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan semula Rp75.442.472,00 bertambah Rp239.748.599,00 menjadi Rp315.191.071,00; dan (5) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp26.718.858.500,00 tidak mengalami perubahan dan APBD Induk Tahun Anggaran 2025. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/5338/PADFE/BPKAD tanggal 12 Agustus 2025 hal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk Kabupaten Tabanan dialokasikan sebesar Rp75.880.407.691,00 sebagai berikut: (1) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp483.782.117,00; (2) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp611.335.972,00; (3) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp47.804.133.127,00; (4) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp262.297.975,00; dan (5) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp26.718.858.500,00. Pemerintah Kabupaten Tabanan juga agar mengalokasikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah atas Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/5341/PADFE/BPKAD tanggal 12 Agustus 2025 hal Kewajiban Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2024, untuk Kabupaten Tabanan dialokasikan sebesar Rp33.330.435.781,00, sebagai berikut: (1) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar RpRp13.010.621.774,00; (2) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp11.354.122.088,00; (3) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp8.912.798.823,00; dan (4) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp52.893.096,00. Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi harus mempedomani ketentuan sebagai berikut: (1) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dari hak Kabupaten/Kota, harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; (2) penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan (3) dalam rangka mendukung Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Tabanan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (3) Bantuan Keuangan semula Rp82.297.919.949,00 bertambah Rp32.000.000.000,00 menjadi Rp114.297.919.949,00 yang diuraikan pada: (a) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp25.297.919.949,00 tidak mengalami perubahan dan APBD Induk Tahun Anggaran 2025; dan (b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota semula Rp57.000.000.000,00 bertambah Rp32.000.000.000,00 menjadi Rp89.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengalokasikan Tambahan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/6415/PADFE/BPKAD tanggal 25 September 2025 hal Pagu Definitif Perubahan Belanja Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp553.448.246,00. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud, dengan mempedomani butir 3.3.2.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp15.318.412.871,00 menjadi sebesar Rp15.318.412.871,00 yaitu Pendapatan atas Pengembalian Hibah semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp15.318.412.871,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp15.318.412.871,00 menjadi sebesar Rp15.318.412.871,00 yaitu Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah yang merupakan pengembalian Hibah Pemuliharaan, untuk itu agar kode rekeningnya disesuaikan menjadi: Lain-lain PAD yang Sah pada rincian obyek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat.																											
VI. Kebijakan Belanja Daerah																											
A. Alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing urusan sebagaimana Tabel 9, sebagai berikut:																											
1. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menganggarkan belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli Masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan stunting, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem;																											
2. Dalam rangka sinergi dan penyejajaran, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintah yang dilakukan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;																											
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;																											
4. Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sebagaimana maksud butir 3.2.2 a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;																											
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Tabanan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;																											
6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan																											
7. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.																											
B. Alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing urusan sebagaimana Tabel 9, sebagai berikut:																											
Tabel 9																											
Uraian Pemerintah Daerah																											
Kode	Uraian Pemerintah Daerah	Pendapatan		Opener		Modal		Tindakan Tindakan		Tindakan		Jumlah Belanja (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Berkas/ Belanja (Rp)													
		Saluran (Rp)	Saluran (Rp)	Saluran (Rp)	Saluran (Rp)	Saluran (Rp)	Saluran (Rp)	Saluran (Rp)	Saluran (Rp)	Saluran (Rp)	Saluran (Rp)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													

Revisi	URAIAN EVALUASI												B.Persentase Perubahan	
	Rpt			Rpt			Rpt			Rpt				
	TARGET	Realisasi	Nilai	TARGET	Realisasi	Nilai	TARGET	Realisasi	Nilai	TARGET	Realisasi	Nilai		
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8	9	10=8/7	11	12=10/11	13	14=13/12	
Belanja Daerah	1.980.889.145,912	1.781.989.335.453,80	89,96%	1.930.248.998,026	2.018.741.873.453,22	104,57%	3.272.486.024,324	3.166.094.287.622,33	96,47%	1.977.075.530,139	2.004.013.219.131,24	2.021.148.077.002,09	1.087.234.807.581	254,11%
Belanja Operatif	1.538.269.039,059	1.296.099.189,289	84,25%	1.544.061.689,382	1.621.441.281,15	105,02%	1.575.624.527,380	1.581.538.073,889	100,34%	1.176.844.587.944	1.174.819.619.753	1.174.819.619.753	1.096.116.163,009	93,39%
Belanja Pegawai	889.432.250,487	789.248.407,289	88,76%	1.221.441.281,15	1.221.441.281,15	100,00%	984.829.791,393	887.277.409,312	89,78%	1.089.478.218,000	1.089.478.218,000	1.089.478.218,000	93.333.277,790	227,11%
Belanja Barang dan Jasa	547.243.189,000	513.580.417,117	93,71%	619.270.745,943	597.265.988,943	96,29%	689.277.409,312	594.420.402,937	86,35%	34.961.680,000	43.900.632,217	104.348.214.759,00	694.239.791,390	4125,50%
Belanja Hibah	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
Belanja Dinas	7.766.750,000	7.766.750,000	100,00%	7.766.750,000	7.766.750,000	100,00%	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
Belanja Tidak Tersebut	90.941.750,000	88.937.283.232	97,81%	155.889.630.457	145.131.204,971	93,10%	155.889.630,457	145.131.204,971	93,10%	77.343.279,279	25.871.753,000	171.637.339,279	93.967.536,299	463,21%
Belanja Bantuan Sosial	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
Belanja Modal	198.524.254,751	198.524.254,751	100,00%	198.524.254,751	198.524.254,751	100,00%	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
Belanja Modal Tanah	2.000,000	10.251.400	5,13%	196.524.254,751	198.524.254,751	100,00%	198.524.254,751	198.524.254,751	100,00%	198.524.254,751	198.524.254,751	198.524.254,751	198.524.254,751	100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Meubel	76.243.876,876	60.885.209,016	79,86%	60.885.209,016	27.469.638,287	45,16%	22.465.100,000	29.119.614,000	72,96%	62.977.430,000	13.882.833,873	76.860.263,873	87.179.219,000	538,24%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.141.750,750	24.044.750,750	48,93%	80.424.914,900	15.238.011,000	18,94%	115.408.116,100	108.279.280,174	93,86%	107.791.414,750	10.090.589,224	109.149.584,000	104.543.580,000	1030,66%
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangunan	71.473.132,913	30.252.259,813	42,33%	108.074.132,913	127.008.887,913	117,53%	114.545.768,400	102.403.000,000	89,50%	33.270.759,000	4.190.180,889	19.141.220.100,00	86.181.080,214	2571,27%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%
Belanja Modal Lain-lain	1.238.452,779	1.143.763,390	92,29%	2.231.126,114	2.231.126,114	100,00%	2.231.126,114	2.231.126,114	100					

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 5.3.6.a.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. f) hak keuangan dan administratif dewan perwakilan rakyat daerah, antara lain: (1) belanja gaji dan tunjangan DPRD semula Rp38.238.400.000,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 atau 3,92% menjadi Rp39.738.400.000,00, yaitu: (a) belanja uang representasi DPRD sebesar Rp892.290.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g) belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.293.820.500,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% dari uang representasi. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan harus tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. h) belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp146.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i) belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.056.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mempertahankan secara terus menerus dan tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. j) belanja tunjangan rees DPRD sebesar Rp1.764.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan harus mempertahankan secara terus menerus dan tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Rees DPRD tersebut dan Tunjangan Rees dimaksud diberikan setiap melaksanakan rees kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. k) penyediaan alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian objek belanja: (1) belanja tunjangan perumahan DPRD semula Rp16.300.000.000,00 bertambah Rp342.524.000,00 atau 2,10% menjadi Rp16.642.524.000,00; (2) belanja tunjangan transportasi DPRD semula Rp8.211.600.000,00 bertambah Rp1.157.476.000,00 atau 14,10% menjadi Rp9.369.076.000,00; dan (3) belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp385.000.000,00 tidak mengalami perubahan. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. l) penyediaan anggaran belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp332.640.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Tabanan belum memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, yang seharusnya Rp473.760.000,00 atau lebih kurang Rp141.120.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. m) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp1.110.000.000,00 tidak mengalami perubahan dan anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2025 dapat dianggarkan dengan penentuan besarnya disesuaikan dengan pemendapan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp1.133.030.212,44. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan penyediaan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH pemendapan Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. n) Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah semula Rp1.891.852.300,00 bertambah Rp702.771.700,00 atau 37,15% menjadi Rp2.594.624.000,00; dan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah semula Rp49.288.650,00 berkurang Rp10.000.000,00 atau 20,29% menjadi Rp39.288.650,00. o) Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp349.987.279.404,00 berkurang Rp20.021.786.068,00 atau 5,72% menjadi Rp329.965.493.336,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN semula Rp212.638.084.152,00 berkurang Rp83.552.423.436,00 atau 39,29% menjadi Rp129.085.660.716,00; (2) tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN semula Rp11.826.424.954,00 bertambah Rp35.052.891.403,00 atau 296,39% dan APBD menjadi Rp46.879.316.357,00; (3) tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN semula Rp50.000.000,00 berkurang Rp145.202.000,00 atau 290,40% menjadi Rp195.202.000,00; (4) tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp27.033.449.665,00 atau 27.033,45% menjadi Rp127.133.449.665,00; dan (5) tambahan penghasilan berdasarkan pertambahan objektif lainnya ASN semula Rp125.372.770.298,00 bertambah Rp1.299.094.300,00 atau 1,04% menjadi Rp126.671.864.598,00.	Pemerintah Kabupaten Tabanan mempertahankan dan meniadakan dengan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati Kabupaten Tabanan dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tabanan juga memperhatikan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (6) belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp57.213.954.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; (7) belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp307.116.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; (8) belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp52.858.291.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; (9) belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp307.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.3.2.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (10) belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. ii) belanja pegawai BLUD Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
2. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang/Jasa semula Rp639.595.771.162,00 bertambah Rp21.534.743.547,00 atau 3,37% menjadi Rp661.130.514.709,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Harus dianggarkan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua) belas bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: a. belanja barang semula Rp124.626.126.746,00 bertambah Rp20.499.755.060,00 atau 16,45% menjadi Rp145.125.881.806,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek: 1) belanja barang pakai habis semula Rp122.881.152.276,00 bertambah Rp20.461.677.060,00 atau 16,65% menjadi Rp143.342.829.336,00 yang antara lain diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: a) belanja bahan-bahan/bibit tanaman semula Rp19.373.800,00 bertambah Rp150.905.000,00 atau 778,91% menjadi Rp170.278.800,00; b) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga semula Rp2.352.000,00 berkurang Rp2.352.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; c) belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat semula Rp35.209.570.500,00 bertambah Rp19.228.472.750,00 atau 54,61% menjadi Rp54.438.043.250,00; dan d) belanja Pakain Sipil Lengkap (PSL) semula Rp8.562.600,00 bertambah Rp5.000.000,00 atau 58,39% menjadi Rp13.562.600,00. 2) belanja barang tak habis pakai semula Rp1.617.664.300,00 bertambah Rp38.078.000,00 atau 2,35% menjadi Rp1.655.742.300,00 yang diuraikan ke dalam subrincian objek belanja komponen-komponen rambu-rambu; 3) belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi semula Rp127.310.170,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: a) belanja peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya semula Rp21.285.770,00 tidak mengalami perubahan; dan b) belanja peralatan dan mesin komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya semula Rp3.057.200,00 tidak mengalami perubahan. Harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi asa perediaan barang Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebagaimana butir 1) a) (22) dan butir 1) a) (23) b) atas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintahan Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintahan Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.b dan butir 3.4.1.2.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b. belanja jasa semula Rp219.360.402.347,00 bertambah Rp15.755.219.740,00 atau 7,18% menjadi Rp235.115.622.087,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) belanja jasa kantor semula Rp125.726.415.896,00 a) honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan semula Rp5.000.000,00 berkurang Rp5.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; b) belanja jasa tenaga kesehatan semula Rp3.410.346.000,00 bertambah Rp225.816.900,00 atau 6,62% menjadi Rp3.636.162.900,00; c) belanja jasa tenaga laboratorium semula Rp459.479.800,00 berkurang Rp29.700.000,00 atau 6,46% menjadi Rp429.779.800,00; d) belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertibn umum, dan perlindungan masyarakat semula Rp3.306.600.000,00 berkurang Rp59.400.000,00 atau 1,80% menjadi Rp3.247.200.000,00; e) belanja jasa tenaga perancangan sosial semula Rp550.400.000,00 bertambah Rp16.000.000,00 atau 2,91% menjadi Rp566.400.000,00; f) belanja jasa tenaga perhubungan semula Rp4.488.000.000,00 berkurang Rp242.400.000,00 atau 5,40% menjadi Rp4.245.600.000,00; g) belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan semula Rp120.600.000,00 berkurang Rp15.000.000,00 atau 12,43% menjadi Rp105.600.000,00; h) belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan semula Rp3.742.600.000,00 bertambah Rp1.436.610.700,00 atau 38,39% menjadi Rp5.179.210.700,00; i) belanja jasa tenaga administrasi semula Rp28.859.908.000,00 berkurang Rp116.709.000,00 atau 0,40% menjadi Rp28.743.199.000,00; j) belanja jasa tenaga pelayanan umum semula Rp18.797.997.000,00 berkurang Rp3.019.127.500,00 atau 16,06% menjadi Rp15.778.869.500,00; k) belanja jasa tenaga ahli semula Rp4.224.447.000,00 bertambah Rp746.940.000,00 atau 17,68% menjadi Rp4.971.387.000,00; l) belanja jasa tenaga kebersihan semula Rp4.898.107.000,00 bertambah Rp6.998.695.500,00 atau 142,89% menjadi Rp11.896.802.500,00; m) belanja jasa tenaga keamanan semula Rp2.106.996.000,00 berkurang Rp76.856.000,00 atau 3,65% menjadi Rp2.030.140.000,00; n) belanja jasa tenaga supir semula Rp171.507.856,00 bertambah Rp526.440,00 atau 0,30% menjadi Rp172.034.296,00; o) belanja jasa perancangan: ustalah telepon, air, dan listrik semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp1.800.000,00. Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan subkegiatan dalam rangka mencapai target kinerja subkegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam subkegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran jasa juga sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya, serta untuk penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
Selanjutnya untuk penganggaran gaji bagi pegawai non ASN serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK Paruh Waktu) agar tetap dialokasikan dan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tentang Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.	
2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja iuran jaminan/asuransi semula Rp59.336.686.752,00 bertambah Rp3.799.962.200,00 atau 6,40% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp63.136.648.952,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	
a) belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3 semula Rp45.454.564.503,00 bertambah Rp2.961.420.000,00 atau 6,25% menjadi Rp48.415.984.503,00; dan b) belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN semula Rp4.923.861.000,00 bertambah Rp19.490.400,00 atau 0,40% menjadi Rp4.943.351.400,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan ketentuan untuk penganggaran iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, dan iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, mendafarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan iuran jaminan kesehatan selalu pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendafarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran iuran 1% kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembawaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan atas seluruhnya PBI jaminan kesehatan nasional yang penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manifest pelayanan di Ruang Perawatan Kelas II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KD Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBIU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBIU/BP dan iuran bantuan iuran PBIU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan iuran baik sebagai satu seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manifest pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendafaran PBP dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terseleskannya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan relokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional, dan penganggaran atas kerja sama dalam pendafaran PBP dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua) belas bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Keneseraan Peserta Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak diwajibkan menuliskan sendiri/tambahan atau seluruhnya Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manifest yang sama dengan penduduk yang tercantum pada belanja sewa tanah semula tidak dianggarkan bertambah menjadi Rp1.500.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.	
4) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa peralatan dan mesin semula Rp21.631.892.300,00 berkurang Rp145.692.899,00 atau 0,67% menjadi Rp21.486.199.401,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	
a) belanja sewa kendaraan bermotor penumpang semula Rp701.168.000,00 bertambah Rp133.000.000,00 atau 18,97% menjadi Rp834.168.000,00; dan b) belanja sewa komputer jaringan semula Rp150.000.000,00 berkurang Rp267.500.000,00 atau 59,44% menjadi Rp182.500.000,00; 5) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp1.750.994.400,00 berkurang Rp29.000.000,00 atau 1,66% menjadi Rp1.721.994.400,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan semula Rp1.564.994.400,00 berkurang Rp29.000.000,00 atau 1,85% menjadi Rp1.535.994.400,00; b) belanja sewa mesa/wisma/bungalow/tempat istirahat/sebesar Rp10.000.000,00 tidak mengalami perubahan; c) belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp171.000.000,00 tidak mengalami perubahan; dan d) belanja sewa bangunan menara telekomunikasi sebesar Rp5.000.000,00 tidak mengalami perubahan.	
6) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa aset tetap lainnya semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp20.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja sewa alat pemaca kenangan. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
7) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:	
a) belanja jasa konsultansi konstruksi semula Rp2.248.500.000,00 bertambah Rp707.000.000,00 atau 31,44% menjadi Rp2.955.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;	
b) belanja jasa konsultansi non konstruksi semula Rp2.627.747.400,00 bertambah Rp290.000.000,00 atau 11,04% menjadi Rp2.917.747.400,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
Selain itu, uraian tersebut juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.	
c) belanja beasiswa pendidikan ASN semula Rp104.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;	
d) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan semula Rp4.121.676.999,00 bertambah Rp586.970.000,00 atau 14,24% menjadi Rp4.708.646.999,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;	
e) belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah semula Rp1.804.013.000,00 bertambah Rp245.000.000,00 atau 13,58% menjadi Rp2.049.013.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan	
f) belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp30.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	
g) belanja sewa aset tidak berwujud semula Rp8.475.600,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta terbit anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif mengingat terdapat kebutuhan atas terbatasnya kapasitas sumber daya serta terbatasnya penghematan SDM yang kompeten, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2) dan butir 3.4.1.2.2.f.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan, penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
h) belanja pendafaran semula Rp3.306.620.820,00 bertambah Rp233.300.600,00 atau 7,06% menjadi Rp3.539.921.420,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	
1) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin semula Rp2.774.149.620,00 berkurang Rp170.000,00 atau 0,01% menjadi Rp2.773.979.620,00.	

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
2) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan semula Rp9.960.000,00 tidak mengalami perubahan; 3) belanja pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi semula sebesar Rp432.511.200,00 bertambah Rp201.070.000,00 atau 46,49% menjadi Rp633.581.800,00; dan 4) belanja pemeliharaan aset tetap lainnya semula tidak di anggarakan bertambah sebesar Rp32.400.000,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pembelian barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta butir 3.4.1.2.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. d. belanja perjalanan dinas semula Rp24.089.149.900,00 atau 52,07% menjadi Rp22.171.380.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri. Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan yang bersifat urgen dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: 1) Sekretariat Daerah semula Rp3.562.040.000,00 berkurang Rp2.017.446.000,00 atau 56,04% menjadi Rp1.544.594.000,00; dan 2) Sekretariat DPRD semula Rp29.840.183.000,00 berkurang Rp16.819.636.000,00 atau 56,37% menjadi Rp13.020.547.000,00. Penambahan pagu anggaran belanja perjalanan dinas diperkenankan sepanjang Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kepatutan, kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan: 1) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Aksi Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen); 2) kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan; 3) batasan minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus Papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RD; dan 4) belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga. e. belanja yang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula Rp18.389.838.400,00 bertambah Rp3.257.225.000,00 atau 17,71% menjadi Rp21.647.063.400,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam rincian objek belanja: 1) belanja yang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula Rp4.748.550.000,00 bertambah Rp1.914.100.000,00 atau 40,31% menjadi Rp6.662.650.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: a) belanja penghargaan atas suatu prestasi semula Rp1.357.250.000,00 bertambah Rp1.709.850.000,00 atau 125,98% menjadi Rp3.067.100.000,00; - bi) belanja beasiswa semula Rp16.000.000,00 bertambah Rp19.000.000,00 atau 118,75% menjadi Rp35.000.000,00 dan - ci) belanja penanganun dampak sosial kemasyarakatan semula Rp1.190.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 atau 84,03% menjadi Rp2.190.000.000,00. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 2) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula Rp13.641.288.400,00 bertambah Rp1.343.125.000,00 atau 9,85% menjadi Rp14.984.413.400,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam subrincian objek belanja: - ai) jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain semula Rp11.120.688.400,00 bertambah Rp1.349.125.000,00 atau 12,13% menjadi Rp12.469.813.400,00; dan - bi) belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat semula Rp2.520.600.000,00 berkurang Rp6.000.000,00 atau 0,42% menjadi Rp2.514.600.000,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganun dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. f. belanja barang dan jasa BOSP semula Rp45.286.220.075,00 bertambah Rp430.945.331,00 atau 0,95% menjadi Rp45.717.165.406,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; g. belanja barang dan jasa BOK Pk dan jasa BOK Pk semula Rp10.726.026.000,00 bertambah Rp158.806.200,00 atau 1,48% menjadi Rp10.884.832.200,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan h. belanja barang dan jasa HJUD semula Rp171.640.006.874,00 bertambah Rp5.288.641.516,00 atau 3,08% menjadi Rp176.928.648.390,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Belanja Bunga Belanja Bunga sebesar Rp6.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat. 4. Belanja Hibah Belanja Hibah semula Rp76.854.620.000,00 bertambah Rp42.982.709.278,00 atau 55,93% menjadi Rp119.837.329.278,00 dengan uraian sebagai berikut: a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula Rp0,00 bertambah Rp199.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp199.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp63.112.300.000,00 bertambah Rp42.603.639.278,00 atau 67,50% menjadi Rp105.715.939.278,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;	

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
c. Belanja Hibah dana BOS semula Rp1.385.200.000,00 bertambah Rp165.050.000,00 atau 3,76% menjadi Rp939.880.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp3.031.310.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan e. Belanja Hibah Dana BOSP semula Rp6.325.810.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 atau 0,24% menjadi Rp6.340.810.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.	
Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan serta untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terdenggunya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terdenggunya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasayarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait atau SKPD yang tidak terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang dialokasikan urusan Pemerintahan Umum, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang lainnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menggunakan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat mencairkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.	
Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp3.031.310.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Terbit Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Terbit Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam hal terdapat kenaikan atau bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tabanan mencantumkan dalam KIA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 berdasarkan otonomi pemerintah untuk tingkat kabupaten/kota, sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.e.61.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Tabanan agar berhati-hati dalam melaksanakan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Pemerintah Kabupaten Tabanan selalu memperhatikan dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tahun Anggaran 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten Tabanan belum memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan, alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah, alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,50% dari total Belanja di luar Gaji dan Tunjangan pada Inspektori Daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00, alokasi belanja iuran jaminan kesehatan ASN dan KDH/WKDH, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatory dan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, mengoptimalkan dan/atau meningkatkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Kabupaten Tabanan, antara lain meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, optimalisasi bidang infrastruktur, serta belanja wajib dalam pemangnan inflasi, kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi, yang dilaksanakan secara terbit, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Tabanan akan memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan, alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah, alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,50% dari total Belanja di luar Gaji dan Tunjangan pada Inspektori Daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00, alokasi belanja iuran jaminan kesehatan ASN dan KDH/WKDH, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatory dan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, mengoptimalkan dan/atau meningkatkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Kabupaten Tabanan, antara lain meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, optimalisasi bidang infrastruktur, serta belanja wajib dalam pemangnan inflasi, kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi, yang dilaksanakan secara terbit, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
S. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp252.843.673.058,00bertambah Rp25.732.776.853,00 atau 10,18% menjadi Rp278.576.449.911,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran belanja modal yang antara lain tercantum pada: a. belanja modal tanah sebesar Rp6.025.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja modal tanah perole; b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp64.664.346.293,00 bertambah Rp5.541.869.174,00 atau 8,57% menjadi Rp70.206.155.467,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal alat besar semula Rp2.322.659.200,00 bertambah Rp41.610.800,00 atau 1,79% menjadi Rp2.364.270.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek: a) belanja modal alat besar darat sebesar Rp1.848.000.000,00tidak mengalami perubahan; dan b) belanja modal alat bantu semula Rp474.659.200,00 bertambah Rp41.610.800,00 atau 8,77% menjadi Rp516.270.000,00 2) belanja modal alat angkutan semula Rp4.127.158.600,00 bertambah Rp2.681.234.400,00 atau 64,97% menjadi Rp6.808.393.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat angkutan darat bermotor: 3) belanja modal alat berkecil dan alat ukur semula Rp131.989.100,00 bertambah Rp13.946.300,00 atau 10,57% menjadi Rp145.935.400,00; 4) belanja modal alat pertanian semula Rp138.416.000,00 berkurang Rp136.416.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; 5) belanja modal alat kantor dan rumah tangga semula Rp11.396.080.600,00 bertambah Rp942.122.900,00 atau 8,27% menjadi Rp12.338.203.500,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal alat kantor semula Rp9.543.732.100,00 bertambah Rp670.354.900,00 atau 7,02% menjadi Rp10.214.087.000,00; b) belanja modal alat rumah tangga semula Rp1.490.792.500,00 bertambah Rp322.672.000,00 atau 21,64% menjadi Rp1.813.464.500,00; dan c) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat semula Rp361.556.000,00 berkurang Rp50.904.000,00 atau 14,08% menjadi Rp310.652.000,00. 6) belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar semula Rp874.761.000,00 bertambah Rp16.313.070,00 atau 1,86% menjadi Rp891.074.070,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal alat studio semula Rp868.440.100,00 bertambah Rp16.313.070,00 atau 1,86% menjadi Rp884.753.170,00; dan b) belanja modal alat komunikasi sebesar Rp6.320.900,00 tidak mengalami perubahan. 7) belanja modal alat laboratorium semula Rp1.661.881.880,00berkurang Rp1.023.284.500,00 atau 61,57% menjadi Rp638.597.380,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal urut alat laboratorium semula Rp472.302.180,00 bertambah Rp4.162.200,00 atau 0,88% menjadi Rp476.464.380,00; dan b) belanja modal alat peraga praktik sekolah semula Rp760.000.000,00 berkurang Rp1.027.446.700,00 atau 86,37% menjadi Rp162.133.000,00. 8) belanja modal komputer semula Rp6.080.169.600,00 berkurang Rp1.061.618.000,00 atau 17,46% menjadi Rp5.018.551.600,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal komputer unit semula Rp4.991.856.700,00 berkurang Rp1.039.849.200,00 atau 20,83% menjadi Rp3.952.007.500,00; dan b) belanja modal peralatan komputer semula Rp1.088.312.900,00berkurang Rp221.768.800,00 atau 20,39% menjadi Rp1.066.544.100,00; 9) belanja modal peralatan olahraga semula Rp0,00 bertambah Rp272.556.000,00 atau 100,00% menjadi Rp272.556.000,00; 10) belanja modal peralatan dan mesin BOSP semula Rp9.505.641.570,00 bertambah Rp390.208.000,00 atau 4,11% menjadi Rp9.895.849.600,00; dan 11) belanja modal peralatan dan mesin BLUD semula Rp8.188.177.543,00 bertambah Rp1.882.089.874,00 atau 22,99% menjadi Rp10.070.267.417,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp20.239.411.200,00 bertambah Rp923.046.300,00 atau 4,56% menjadi Rp21.162.457.500,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat kedokteran. Disupl dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat Alai kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
c. belanja modal gedung dan bangunan semula Rp103.637.505.110,00 bertambah Rp5.496.663.434,00 atau 5,30% menjadi Rp109.134.168.544,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: - belanja modal bangunan gedung semula Rp93.707.330.110,00 bertambah Rp14.861.604.434,00 atau 15,86% menjadi Rp108.568.934.544,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal; dan - belanja modal gedung dan bangunan BLUD semula Rp9.930.175.000,00 berkurang Rp9.364.941.000,00 atau 94,31% menjadi Rp565.234.000,00. d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp75.675.913.100,00 bertambah Rp14.665.307.000,00 atau 19,38% menjadi Rp90.341.220.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - belanja modal jalan dan jembatan semula Rp63.918.250.000,00 bertambah Rp20.819.250.000,00 atau 32,57% menjadi Rp84.737.500.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja belanja modal jalan dan belanja modal jembatan; - belanja modal bangunan air semula Rp11.392.443.000,00 berkurang Rp6.192.443.000,00 atau 54,36% menjadi Rp5.200.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; - belanja modal instalasi semula Rp0,00 bertambah Rp38.500.000,00 atau 100,00% menjadi Rp38.500.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal instalasi gardu listrik; - belanja modal jaringan sebesar Rp265.220.100,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal jaringan air minum dan belanja modal jaringan listrik; dan - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. e. belanja modal aset tetap lainnya semula Rp2.840.908.555,00 bertambah Rp28.997.245,00 atau 1,02% menjadi Rp2.869.905.800,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek: - belanja modal bahan perupastakan semula Rp171.560.200,00 bertambah Rp209.705.700,00 atau 44,47% menjadi Rp381.265.900,00; - belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga semula Rp0,00 bertambah Rp63.500.000,00 atau 100,00% menjadi Rp63.500.000,00 tidak mengalami perubahan; - belanja modal biota perairan semula Rp0,00 bertambah Rp272.832.000,00 atau 100,00% menjadi Rp272.832.000,00; - belanja modal tanaman semula Rp43.150.000,00 bertambah Rp64.725.000,00 atau 150,00% menjadi Rp107.875.000,00; - belanja modal barang koleksi non budaya semula Rp565.000.000,00 bertambah Rp405.000.000,00 atau 71,68% menjadi Rp970.000.000,00; dan - belanja modal aset tetap lainnya BOSP semula Rp1.761.198.355,00 berkurang Rp986.765.455,00 atau 56,03% menjadi Rp774.432.900,00. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir 3.4.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, berasing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan pengajuan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar kebutuhan pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pemadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.k. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah agar tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan Belanja Modal agar memperhatikan waktu tahapan pengadaan barang/jasa hingga penyelesaian pekerjaan secara cermat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5.a.(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 6. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang dulat bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RKMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan butir 3.4.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp6.513.555.170,00 bertambah Rp7.477.540.552,00 atau 114,80% menjadi Rp13.991.095.722,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan kegiatan yang nantinya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 7. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp272.307.696.100,00 bertambah Rp11.653.302.000,00 atau 4,28% menjadi Rp283.960.998.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut: - belanja bagi hasil semula Rp38.273.969.100,00 bertambah Rp10.126.518.000,00 atau 26,46% menjadi Rp48.400.487.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek: - belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula Rp36.749.455.000,00 bertambah Rp9.595.434.000,00 atau 26,11% menjadi sebesar Rp46.344.889.000,00; dan - belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa semula Rp1.524.514.100,00 bertambah Rp531.064.000,00 atau 34,84% menjadi Rp2.055.598.100,00. Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Pajak Daerah namun belum mengalokasikan Belanja Bagi Hasil untuk Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan	

URAIAN EVALUASI						URAIAN PENJELASAN / TIRDAK LANJUT					
Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta butir 3.4.4.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, besaran alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah tersebut dianggarkan secara bruto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.4.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 b. belanja bantuan keuangan semula Rp234.033.727.000,00 bertambah Rp1.526.784.000,00 atau 0,65% menjadi Rp235.560.511.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 12, sebagai berikut:											
Tabel 11 Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah											
Tahun Anggaran	Belanja Bantuan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)	Total Belanja Daerah (Rp)	Persentase (%)						
APBD TA 2023	227.511.676.000,00	227.261.856.000,00	99,89	2.018.741.872.404,53	11,26						
APBD TA 2024	236.657.721.000,00	228.549.071.000,00	96,57	2.160.699.587.623,13	10,58						
APBD TA 2025	234.033.727.000,00	137.240.259.800,00	58,64	2.313.446.473.573,00	13,95						
RP-APBD TA 2025	235.560.511.000,00	137.240.259.800,00	58,26	2.351.348.077.093,00	10,02						
Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mempertimbangkan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.4.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari DTU (Dana Alokasi Umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.											
VII. Kebijakan Pembiayaan Daerah											
Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.											
A. Kebijakan Pembiayaan Daerah, yaitu:											
1. pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; 2. identifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD, sebagaimana maksud butir 3.2.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; dan 3. pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutupi defisit anggaran, sebagaimana maksud butir 3.2.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan alokasi pembiayaan daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 13 sebagai berikut:											
Tabel 12 Pembiayaan Daerah											
Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		Persentase (%)	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		R-PAPBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target P-APBD 7=6-5	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target P-APBD 8=6-5			
	Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d 31 Juni	Target					
1	2	3	4=3:2	5	6	7	8	9			
Pembiayaan Daerah	3.193.131.719,00	3.342.538.003,91	104,68%	82.569.000.000,00	77.837.631.842,00	70.095.894.843,00	7.741.736.999,00	90,05%			
Penerimaan Pembiayaan	21.324.131.719,00	21.324.131.719,91	100,00%	101.800.000.000,00	88.326.894.843,00	88.326.894.843,00	0	100,00%			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	21.324.131.719,00	21.324.131.719,91	100,00%	101.800.000.000,00	88.326.894.843,00	88.326.894.843,00	0	100,00%			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%			
Pengeluaran Pembiayaan	18.131.000.000,00	17.981.593.716,00	99,18%	19.231.000.000,00	10.489.263.001,00	18.231.000.000,00	7.741.736.999,00	173,81%			
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%			
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang yang	18.131.000.000,00	17.981.593.716,00	99,18%	19.231.000.000,00	10.489.263.001,00	18.231.000.000,00	7.741.736.999,00	173,81%			
1. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan penerimaan pembiayaan semula Rp96.000.000.000,00 berkurang Rp7.673.105.157,00 atau 7,99% menjadi Rp88.326.894.843,00 yang diuraikan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp96.000.000.000,00 berkurang Rp7.673.105.157,00 atau 7,99% menjadi Rp88.326.894.843,00 atau 3,76% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam Penghematan Belanja. 2. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tabanan menganggarkan pengeluaran pembiayaan semula Rp19.231.000.000,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 atau 94,80% menjadi Rp18.231.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula Rp19.231.000.000,00berkurang Rp1.000.000.000,00 atau 94,80% menjadi Rp18.231.000.000,00 yang diuraikan ke dalam Pembayaran Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).											
VIII. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:											
A. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPA serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, serta dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI), sebagaimana dimaksud butir D.1.a.3.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan diuraikan dengan sumber organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.											

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
C. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, dan penambahan subkegiatan baru dalam RAPBD yang tidak tercantum dalam KUA dan PPAS perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; D. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu: 1. penanggulangan kemiskinan; 2. peningkatan investasi; 3. pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi; 4. peningkatan penggunaan PDN; dan 5. pengendalian inflasi antara lain: a. peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; b. pengendalian laju alih fungsi lahan; c. pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; d. penguatan tata kelola logistik daerah; dan e. pengawasan harga dan operasi pasar; sebagaimana maksud butir E.2.ad.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. E. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar Pemerintah Kabupaten Tabanan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: a. rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; b. pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; c. pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; d. pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan e. pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. 2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat: a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 4. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan 5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali, sebagaimana maksud butir 5.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, selain itu dalam pelaksanaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem F. Pemerintah Kabupaten Tabanan menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu: 1. penanggulangan kemiskinan; 2. peningkatan investasi; 3. pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi; 4. peningkatan penggunaan PDN; dan 5. pengendalian inflasi antara lain: a. peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; b. pengendalian laju alih fungsi lahan; c. pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; d. penguatan tata kelola logistik daerah; dan e. pengawasan harga dan operasi pasar; sebagaimana maksud pada butir E.2.ad.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. G. Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan agar mengalokasikan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/0335/Ranada (raueval 17 Januari 2024) hal Hasil Pemetaan subkegiatan Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. H. Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka pengendalian Inflasi mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi: 1. peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; 2. pengendalian laju alih fungsi lahan; 3. pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; 4. penguatan tata kelola logistik daerah; dan 5. pengawasan harga dan operasi pasar. Selanjutnya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabanan menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. I. Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Prabencana" yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain: 1. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; 2. pengurangan risiko dan pencegahan bencana; 3. pelaksanaan dan peningkatan rencana tata ruang; 4. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan 5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, sebagaimana maksud butir 5.3.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;	

URAIAN EVALUASI	URAIAN PENJELASAN / TINDAK LANJUT
Pemerintah Kabupaten Tabanan agar menganggarkan belanja untuk pembayaran kewajiban tersebut sebagai prioritas yang berpedoman pada butir C.4.b.2).a). (2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; W. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dianggarkan sesuai kewenangan dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Selanjutnya, penganggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dialokasikan pada: 1. subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 ha (sepuluh hektare); dan 2. subkegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru. X. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dianggarkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Y. Alokasi anggaran untuk mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Digitalisasi Pembelajaran sesuai kewenangan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran; Z. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dianggarkan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana mkaud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; AA. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung Program Sekolah Rakyat dianggarkan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah melakukan perviapan lahan, perintan, penyipan guru dan tenaga pendidik; AB. Alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dianggarkan sesuai kewenangan antara lain guna mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; AC. Alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan swasembada energi dianggarkan sesuai kewenangan antara lain guna memenuhi kebutuhan energi di tingkat daerah melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; AD. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana mkaud butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; AE. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabanan; dan AF. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.	


 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TABANAN

 HYOMAN ARNAWA



PROVINSI BALI
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan telah menyepakati perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tabanan Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun
2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 5) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2025
berjumlah Rp2.371.659.004.339,00 (dua triliun tiga
ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh
sembilan juta empat ribu tiga ratus tiga puluh
sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.283.332.109.496,00
b. Belanja Daerah	Rp.	2.353.428.004.339,00
defisit/surplus	Rp.	(70.095.894.843,00)

c. Pembiayaan Daerah			
i.	penerimaan	Rp.	88.326.894.843,00
ii.	pengeluaran	Rp.	18.231.000.000,00
	pembiayaan netto	Rp.	70.095.894.843,00
	sisa lebih		
	pembiayaan		
	anggaran tahun		
	berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.332.109.496,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp772.198.366.829,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.198.438.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.607.762.886,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.692.069.000,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.700.096.943,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.133.742.667,00 (satu triliun lima ratus sebelas miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp1.287.071.531.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.062.211.667,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam puluh dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.353.428.004.339,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.776.320.715.306,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp988.181.689.373,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp662.301.696.655,00 (enam ratus enam puluh dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp119.837.329.278,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp279.155.195.087,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta

seratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.104.889.467,00 (enam puluh sembilan miliar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.617.054.720,00 (seratus sembilan miliar enam ratus tujuh belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.871.220.100,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.537.030.800,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp13.991.095.846,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp283.960.998.100,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
 - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.400.487.100,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.560.511.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp70.095.894.843,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh

lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp88.326.894.843,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.326.894.843,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp18.231.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp18.231.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya *surplus/(defisit)* sebesar Rp(70.095.894.843,00) minus tujuh puluh miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah.
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp70.095.894.843,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
14. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
15. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
18. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
20. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
22. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
23. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 15 Oktober 2025
BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 15 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 5 NOMOR 2025
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(5,60/2025)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI TABANAN,



Diundangkan di Singasana
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 5 NOMOR 2025
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(5,60/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM.

Bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan Daerah perlu diwujudkan dalam APBD sehingga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. APBD merupakan kejelasan terhadap target-target perubahan Pendapatan Daerah, Perubahan Belanja Daerah dan Perubahan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2025.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5

LAMPIRAN I

**RINGKASAN PERUBAHAN
APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**



KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	739.817.131.935,00	772.198.366.829,00	32.381.234.894,00
4.1.01	Pajak Daerah	367.494.543.935,00	368.198.438.000,00	703.894.065,00
4.1.02	Retribusi Daerah	239.005.141.000,00	237.607.762.886,00	-1.397.378.114,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.817.447.000,00	11.692.069.000,00	874.622.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.500.000.000,00	154.700.096.943,00	32.200.096.943,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.496.860.341.638,00	1.511.133.742.667,00	14.273.401.029,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.352.178.513.000,00	1.287.071.531.000,00	-65.106.982.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.681.828.638,00	224.062.211.667,00	79.380.383.029,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.236.677.473.573,00	2.283.332.109.496,00	46.654.635.923,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.781.781.549.245,00	1.776.320.715.306,00	-5.460.833.939,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.059.331.158.083,00	988.181.689.373,00	-71.149.468.710,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639.595.771.162,00	662.301.696.655,00	22.705.925.493,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.854.620.000,00	119.837.329.278,00	42.982.709.278,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	252.843.673.058,00	279.155.195.087,00	26.311.522.029,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.025.000.000,00	6.025.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.664.346.293,00	69.104.889.467,00	4.440.543.174,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.637.505.110,00	109.617.054.720,00	5.979.549.610,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.675.913.100,00	91.871.220.100,00	16.195.307.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.840.908.555,00	2.537.030.800,00	-303.877.755,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	7.477.540.676,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	7.477.540.676,00
5.4	BELANJA TRANSFER	272.307.696.100,00	283.960.998.100,00	11.653.302.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	38.273.969.100,00	48.400.487.100,00	10.126.518.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.033.727.000,00	235.560.511.000,00	1.526.784.000,00
	Jumlah Belanja	2.313.446.473.573,00	2.353.428.004.339,00	39.981.530.766,00
	Total Surplus/(Defisit)	-76.769.000.000,00	-70.095.894.843,00	6.673.105.157,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.000.000.000,00	88.326.894.843,00	-7.673.105.157,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.000.000.000,00	88.326.894.843,00	-7.673.105.157,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	-1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	-1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	76.769.000.000,00	70.095.894.843,00	-6.673.105.157,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.000.000.000,00	88.326.894.843,00	-7.673.105.157,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.000.000.000,00	88.326.894.843,00	-7.673.105.157,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	-1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	-1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	76.769.000.000,00	70.095.894.843,00	-6.673.105.157,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA.

LAMPIRAN II

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



KABUPATEN TABANAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja									Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	223.750.000.000,00	221.077.427.886,00	1.181.977.535.295,00	1.177.461.666.810,00	207.712.784.658,00	225.911.402.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.690.319.953,00	1.403.373.069.786,00	13.682.749.833,00	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	509.959.342.075,00	470.649.053.473,00	18.868.621.835,00	17.131.826.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.827.963.910,00	487.780.879.783,00	-41.047.084.127,00	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	509.959.342.075,00	470.649.053.473,00	18.868.621.835,00	17.131.826.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.827.963.910,00	487.780.879.783,00	-41.047.084.127,00	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	223.750.000.000,00	221.077.427.886,00	525.967.351.820,00	529.962.325.909,00	68.241.062.923,00	61.077.525.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.208.414.743,00	591.039.851.206,00	-3.168.563.537,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	50.000.000,00	50.000.000,00	304.422.238.563,00	300.180.781.213,00	4.580.289.180,00	4.493.859.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.002.527.743,00	304.674.640.393,00	-4.327.887.350,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	PUSKESMAS BATURITI 1	2.076.950.619,00	2.500.000.000,00	2.721.426.879,00	3.295.208.995,00	219.140.740,00	219.140.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.567.619,00	3.514.349.735,00	573.782.116,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS BATURITI 2	964.123.219,00	964.123.219,00	1.389.616.219,00	1.561.542.498,00	94.329.000,00	144.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.945.219,00	1.705.871.498,00	221.926.279,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS KEDIRI 1	1.997.887.604,00	2.950.000.000,00	2.680.931.604,00	3.719.901.143,00	240.000.000,00	735.876.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.931.604,00	4.455.777.379,00	1.534.845.775,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS KEDIRI 2	725.535.306,00	911.036.663,00	1.142.343.482,00	1.351.251.000,00	52.442.824,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.786.306,00	1.449.251.000,00	254.464.694,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS KEDIRI 3	982.763.678,00	1.050.000.000,00	1.370.951.678,00	1.620.909.549,00	80.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.951.678,00	1.740.909.549,00	289.957.871,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS KERAMBITAN 1	1.111.103.640,00	1.308.796.738,00	1.650.270.000,00	1.867.963.102,00	6.983.640,00	307.266.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.253.640,00	2.175.229.606,00	517.975.966,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS KERAMBITAN 2	923.665.069,00	1.355.690.700,00	1.286.701.069,00	1.729.143.856,00	80.000.000,00	175.378.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.701.069,00	1.904.522.201,00	537.821.132,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS MARGA 1	1.293.981.859,00	1.782.500.000,00	1.914.761.859,00	2.536.219.893,00	118.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.761.859,00	2.736.219.893,00	703.458.034,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS MARGA 2	1.003.180.342,00	1.190.000.000,00	1.438.775.342,00	1.677.739.436,00	30.000.000,00	164.192.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.775.342,00	1.841.931.924,00	373.156.582,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS PENEDEL 1	2.170.184.726,00	2.600.000.000,00	2.695.202.726,00	3.243.345.745,00	262.500.000,00	293.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.702.726,00	3.536.345.745,00	578.643.019,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS PENEDEL 2	940.873.518,00	1.250.000.000,00	1.521.564.518,00	2.030.188.419,00	58.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.564.518,00	2.184.188.419,00	604.623.901,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS PUPUAN 1	1.730.948.871,00	1.849.024.176,00	2.248.744.871,00	2.526.162.221,00	95.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.744.871,00	2.701.162.221,00	357.417.350,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS PUPUAN 2	1.028.332.978,00	1.260.000.000,00	1.611.699.680,00	1.860.733.723,00	102.833.298,00	175.505.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.532.978,00	2.036.238.762,00	321.705.784,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS SELEMADEG	1.770.989.303,00	2.010.000.000,00	2.793.973.303,00	3.094.719.999,00	100.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.973.303,00	3.216.719.999,00	322.746.696,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS SELEMADEG BARAT	1.376.458.932,00	1.855.675.602,00	2.334.024.932,00	2.826.206.495,00	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.024.932,00	2.976.206.495,00	592.181.563,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1	975.998.484,00	1.147.714.926,00	1.309.569.484,00	1.399.242.976,00	108.400.000,00	238.157.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.969.484,00	1.637.400.651,00	219.431.167,00	

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2	451.969.221,00	558.000.000,00	790.486.221,00	896.517.000,00	0,00	50.478.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.486.221,00	946.995.332,00	156.509.111,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS TABANAN 1	1.093.449.183,00	1.663.000.000,00	1.695.239.183,00	2.284.055.080,00	42.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.239.183,00	2.364.055.080,00	626.815.897,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS TABANAN 2	927.616.043,00	1.400.000.000,00	1.392.744.043,00	1.979.518.620,00	30.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.744.043,00	2.129.518.620,00	706.774.577,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS TABANAN 3	1.653.987.405,00	2.421.865.862,00	1.934.311.664,00	2.924.943.946,00	165.398.741,00	339.852.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.710.405,00	3.264.796.704,00	1.165.086.299,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN	153.500.000.000,00	144.000.000.000,00	140.366.675.700,00	140.506.675.700,00	42.026.053.062,00	32.386.053.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.392.728.762,00	172.892.728.762,00	-9.500.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.255.098.800,00	44.849.355.300,00	19.699.692.438,00	20.105.435.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.954.791.238,00	64.954.791.238,00	0,00		
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	107.356.145.700,00	138.248.377.028,00	119.830.081.600,00	146.929.181.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.186.227.300,00	285.177.558.297,00	57.991.330.997,00		
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	105.014.645.700,00	135.974.468.328,00	119.630.081.600,00	146.729.181.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.644.727.300,00	282.703.649.597,00	58.058.922.297,00		
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	2.341.500.000,00	2.273.908.700,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.500.000,00	2.473.908.700,00	-67.591.300,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	29.148.509.800,00	26.134.465.000,00	723.036.900,00	722.888.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.871.546.700,00	26.857.353.700,00	-3.014.193.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	23.098.422.400,00	20.025.291.700,00	464.713.100,00	464.564.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563.135.500,00	20.489.856.600,00	-3.073.278.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	6.050.087.400,00	6.109.173.300,00	258.323.800,00	258.323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.411.200,00	6.367.497.100,00	59.085.900,00		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	9.546.185.900,00	12.467.445.400,00	49.981.400,00	49.981.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596.167.300,00	12.517.426.800,00	2.921.259.500,00		
1	06	1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	9.546.185.900,00	12.467.445.400,00	49.981.400,00	49.981.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596.167.300,00	12.517.426.800,00	2.921.259.500,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.507.341.000,00	11.782.535.000,00	196.538.069.100,00	221.307.684.819,00	28.300.331.000,00	31.541.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.838.400.100,00	252.848.872.819,00	28.010.472.719,00		
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	6.653.523.700,00	6.763.887.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.523.700,00	6.763.887.700,00	110.364.000,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	6.653.523.700,00	6.763.887.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.523.700,00	6.763.887.700,00	110.364.000,00		
2	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	100.000.000,00	5.096.329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	5.096.329.100,00	4.996.329.100,00		
2	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	100.000.000,00	5.096.329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	5.096.329.100,00	4.996.329.100,00		
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	783.527.600,00	718.938.000,00	2.968.067.600,00	2.968.067.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.595.200,00	3.687.005.600,00	-64.589.600,00		
2	06	1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	783.527.600,00	718.938.000,00	2.968.067.600,00	2.968.067.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.595.200,00	3.687.005.600,00	-64.589.600,00		
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	0,00	4.129.744.500,00	4.118.022.900,00	28.111.500,00	28.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157.856.000,00	4.146.134.400,00	-11.721.600,00		
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	4.129.744.500,00	4.118.022.900,00	28.111.500,00	28.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157.856.000,00	4.146.134.400,00	-11.721.600,00		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	33.977.962.100,00	33.838.309.900,00	13.299.865.800,00	15.611.881.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.277.827.900,00	49.450.191.700,00	2.172.363.800,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	33.977.962.100,00	33.838.309.900,00	13.299.865.800,00	15.611.881.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.277.827.900,00	49.450.191.700,00	2.172.363.800,00		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	8.198.161.900,00	8.461.877.700,00	721.187.600,00	721.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.349.500,00	9.183.065.300,00	263.715.800,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	8.198.161.900,00	8.461.877.700,00	721.187.600,00	721.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.349.500,00	9.183.065.300,00	263.715.800,00		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	12.814.091.200,00	13.129.566.069,00	48.571.000,00	48.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862.662.200,00	13.178.137.069,00	315.474.869,00		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	12.814.091.200,00	13.129.566.069,00	48.571.000,00	48.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862.662.200,00	13.178.137.069,00	315.474.869,00		
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	11.299.453.500,00	10.134.478.250,00	1.704.469.800,00	1.804.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003.923.300,00	11.939.334.050,00	-1.064.589.250,00		
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	11.299.453.500,00	10.134.478.250,00	1.704.469.800,00	1.804.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003.923.300,00	11.939.334.050,00	-1.064.589.250,00		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.156.000.000,00	6.156.000.000,00	45.090.218.000,00	44.627.842.800,00	633.481.000,00	672.091.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723.699.000,00	45.299.934.600,00	-423.764.400,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	6.156.000.000,00	6.156.000.000,00	45.090.218.000,00	44.627.842.800,00	633.481.000,00	672.091.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723.699.000,00	45.299.934.600,00	-423.764.400,00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	17.230.167.900,00	18.094.088.100,00	7.744.909.100,00	7.744.897.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.975.077.000,00	25.838.986.000,00	863.909.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	17.080.167.900,00	18.004.154.100,00	7.744.909.100,00	7.744.897.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825.077.000,00	25.749.052.000,00	923.975.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	50.000.000,00	36.751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.751.400,00	-13.248.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	100.000.000,00	53.182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	53.182.600,00	-46.817.400,00		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	7.921.947.600,00	8.335.919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.947.600,00	8.335.919.000,00	413.971.400,00		
2	17	2.17.2.07.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	7.732.389.100,00	7.713.913.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732.389.100,00	7.713.913.100,00	-18.476.000,00		
2	17	2.17.2.07.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	189.558.500,00	622.005.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.558.500,00	622.005.900,00	432.447.400,00		
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.691.341.000,00	3.966.535.000,00	9.794.352.500,00	8.751.384.500,00	421.618.000,00	374.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215.970.500,00	9.125.688.600,00	-1.090.281.900,00		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.691.341.000,00	3.966.535.000,00	9.794.352.500,00	8.751.384.500,00	421.618.000,00	374.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215.970.500,00	9.125.688.600,00	-1.090.281.900,00		
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	60.000.000,00	60.000.000,00	30.880.104.200,00	52.114.964.000,00	613.018.800,00	1.450.237.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.493.123.000,00	53.565.201.100,00	22.072.078.100,00		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN	60.000.000,00	60.000.000,00	29.383.203.000,00	50.214.082.800,00	49.920.000,00	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.433.123.000,00	50.264.002.800,00	20.830.879.800,00		
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA	0,00	0,00	1.496.901.200,00	1.900.881.200,00	563.098.800,00	1.400.317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000.000,00	3.301.198.300,00	1.241.198.300,00		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	7.664.814.400,00	7.122.076.800,00	117.030.800,00	116.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781.845.200,00	7.239.058.600,00	-542.786.600,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	0,00	219.000.000,00	201.396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000.000,00	201.396.300,00	-17.603.700,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	0,00	7.445.814.400,00	6.920.680.500,00	117.030.800,00	116.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562.845.200,00	7.037.662.300,00	-525.182.900,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.645.800.000,00	4.645.800.000,00	55.365.112.250,00	49.459.088.430,00	2.208.651.600,00	4.572.727.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.573.763.850,00	54.031.816.030,00	-3.541.947.820,00		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	131.010.000,00	131.010.000,00	7.773.464.900,00	8.114.617.700,00	1.234.416.000,00	1.370.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007.880.900,00	9.485.449.700,00	477.568.800,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	131.010.000,00	131.010.000,00	7.773.464.900,00	8.114.617.700,00	1.234.416.000,00	1.370.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007.880.900,00	9.485.449.700,00	477.568.800,00		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	0,00	5.816.212.400,00	5.764.833.800,00	49.270.600,00	49.270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865.483.000,00	5.814.104.400,00	-51.378.600,00		
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	5.816.212.400,00	5.764.833.800,00	49.270.600,00	49.270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865.483.000,00	5.814.104.400,00	-51.378.600,00		
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	203.900.000,00	203.900.000,00	30.082.598.600,00	24.524.594.680,00	95.836.000,00	2.593.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.178.434.600,00	27.118.570.680,00	-3.059.863.920,00		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	203.900.000,00	203.900.000,00	30.082.598.600,00	24.524.594.680,00	95.836.000,00	2.593.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.178.434.600,00	27.118.570.680,00	-3.059.863.920,00		
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.310.890.000,00	4.310.890.000,00	11.692.836.350,00	11.055.042.250,00	829.129.000,00	558.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521.965.350,00	11.613.691.250,00	-908.274.100,00		
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	9.742.836.350,00	9.197.483.950,00	829.129.000,00	558.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571.965.350,00	9.756.132.950,00	-815.832.400,00		
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.310.890.000,00	4.310.890.000,00	1.950.000.000,00	1.857.558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00	1.857.558.300,00	-92.441.700,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	172.329.183.400,00	158.851.241.800,00	11.198.396.000,00	13.210.543.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.527.579.400,00	172.061.784.841,00	-11.465.794.559,00		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	82.176.577.500,00	80.136.621.400,00	4.541.551.400,00	6.552.948.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.718.128.900,00	86.689.569.841,00	-28.559.059,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	82.176.577.500,00	80.136.621.400,00	4.541.551.400,00	6.552.948.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.718.128.900,00	86.689.569.841,00	-28.559.059,00		
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	90.152.605.900,00	78.714.620.400,00	6.656.844.600,00	6.657.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.809.450.500,00	85.372.215.000,00	-11.437.235.500,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	90.152.605.900,00	78.714.620.400,00	6.656.844.600,00	6.657.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.809.450.500,00	85.372.215.000,00	-11.437.235.500,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.997.774.332.573,00	2.045.826.346.610,00	98.148.243.100,00	98.488.103.427,00	2.013.036.500,00	2.949.921.100,00	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	272.307.696.100,00	283.960.998.100,00	378.982.530.870,00	399.390.118.473,00	20.407.587.603,00		
5	01		PERENCANAAN	0,00	0,00	11.713.854.700,00	10.251.755.900,00	99.994.800,00	227.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813.849.500,00	10.479.328.300,00	-1.334.521.200,00		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	11.713.854.700,00	10.251.755.900,00	99.994.800,00	227.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813.849.500,00	10.479.328.300,00	-1.334.521.200,00		
5	02		KEUANGAN	1.997.774.332.573,00	2.045.826.346.610,00	65.152.763.300,00	66.514.776.947,00	1.439.534.900,00	2.078.798.800,00	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	272.307.696.100,00	283.960.998.100,00	345.413.549.470,00	366.545.669.693,00	21.132.120.223,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.997.774.332.573,00	2.045.826.346.610,00	65.152.763.300,00	66.514.776.947,00	1.439.534.900,00	2.078.798.800,00	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	272.307.696.100,00	283.960.998.100,00	345.413.549.470,00	366.545.669.693,00	21.132.120.223,00		
5	03		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	14.275.102.800,00	13.604.028.080,00	99.687.200,00	269.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374.790.000,00	13.873.758.380,00	-501.031.620,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	3.415.628.100,00	3.081.711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.628.100,00	3.081.711.900,00	-333.916.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	10.859.474.700,00	10.522.316.180,00	99.687.200,00	269.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959.161.900,00	10.792.046.480,00	-167.115.420,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	7.006.522.300,00	8.117.542.500,00	373.819.600,00	373.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.341.900,00	8.491.362.100,00	1.111.020.200,00		
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	0,00	7.006.522.300,00	8.117.542.500,00	373.819.600,00	373.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.341.900,00	8.491.362.100,00	1.111.020.200,00		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	29.776.832.000,00	24.346.378.400,00	757.486.200,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534.318.200,00	24.649.499.670,00	-5.884.818.530,00		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	29.776.832.000,00	24.346.378.400,00	757.486.200,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534.318.200,00	24.649.499.670,00	-5.884.818.530,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0,00	0,00	29.776.832.000,00	24.346.378.400,00	757.486.200,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534.318.200,00	24.649.499.670,00	-5.884.818.530,00		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	36.672.640.800,00	35.805.797.020,00	553.503.500,00	566.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226.144.300,00	36.372.503.820,00	-853.640.480,00		
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	36.672.640.800,00	35.805.797.020,00	553.503.500,00	566.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226.144.300,00	36.372.503.820,00	-853.640.480,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN KEDIRI	0,00	0,00	3.847.352.000,00	3.560.207.000,00	101.744.300,00	101.744.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.096.300,00	3.661.951.300,00	-287.145.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN TABANAN	0,00	0,00	3.680.033.400,00	3.703.719.160,00	41.678.300,00	41.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.711.700,00	3.745.397.460,00	23.685.760,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN MARGA	0,00	0,00	3.960.021.900,00	3.845.692.600,00	24.126.500,00	37.329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.148.400,00	3.883.022.400,00	-101.126.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BATURITI	0,00	0,00	4.089.960.700,00	4.086.459.700,00	49.395.000,00	49.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.355.700,00	4.135.854.700,00	-3.501.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PENEDEL	0,00	0,00	4.246.193.800,00	3.897.460.400,00	96.536.600,00	96.536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.730.400,00	3.993.997.000,00	-348.733.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KERAMBITAN	0,00	0,00	3.363.761.400,00	3.277.714.260,00	47.988.000,00	47.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.749.400,00	3.325.702.260,00	-86.047.140,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	0,00	0,00	3.377.329.300,00	3.244.452.300,00	49.521.100,00	49.521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.850.400,00	3.293.973.400,00	-132.877.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SELEMADEG	0,00	0,00	3.471.343.100,00	3.373.940.900,00	47.820.800,00	47.820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.163.900,00	3.421.761.700,00	-97.402.200,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT	0,00	0,00	3.009.709.800,00	2.936.663.000,00	49.833.600,00	49.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.543.400,00	2.986.496.600,00	-73.046.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN PUPUAN	0,00	0,00	3.626.935.400,00	3.879.487.700,00	44.859.300,00	44.859.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.794.700,00	3.924.347.000,00	252.552.300,00		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	10.973.933.300,00	10.600.754.600,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.416.900,00	10.700.338.900,00	-373.078.000,00		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	10.973.933.300,00	10.600.754.600,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.416.900,00	10.700.338.900,00	-373.078.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	10.973.933.300,00	10.600.754.600,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.416.900,00	10.700.338.900,00	-373.078.000,00		
			TOTAL	2.236.677.473.573,00	2.283.332.109.496,00	1.781.781.549.245,00	1.776.320.715.306,00	252.843.673.058,00	279.155.195.087,00	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	272.307.696.100,00	283.960.998.100,00	2.313.446.473.573,00	2.353.428.004.339,00	39.981.530.766,00		

Belanja																
Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	7.006.522.300,00	8.117.542.500,00	373.819.600,00	373.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.341.900,00	8.491.362.100,00	1.111.020.200,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	0,00	7.006.522.300,00	8.117.542.500,00	373.819.600,00	373.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.341.900,00	8.491.362.100,00	1.111.020.200,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	29.778.832.000,00	24.346.378.400,00	757.486.200,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534.318.200,00	24.649.499.570,00	-5.884.818.530,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	29.778.832.000,00	24.346.378.400,00	757.486.200,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534.318.200,00	24.649.499.570,00	-5.884.818.530,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0,00	0,00	29.778.832.000,00	24.346.378.400,00	757.486.200,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534.318.200,00	24.649.499.570,00	-5.884.818.530,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	36.672.640.800,00	35.805.797.020,00	553.503.500,00	566.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226.144.300,00	36.372.503.820,00	-853.640.480,00
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	36.672.640.800,00	35.805.797.020,00	553.503.500,00	566.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226.144.300,00	36.372.503.820,00	-853.640.480,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN KEDIRI	0,00	0,00	3.847.352.000,00	3.660.207.000,00	101.744.300,00	101.744.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.096.300,00	3.661.951.300,00	-287.145.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN TABANAN	0,00	0,00	3.680.033.400,00	3.703.719.180,00	41.678.300,00	41.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.711.700,00	3.745.397.460,00	23.685.760,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN MARGA	0,00	0,00	3.880.021.900,00	3.845.692.600,00	24.126.500,00	37.329.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.148.400,00	3.883.022.400,00	-101.126.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BATURITI	0,00	0,00	4.069.960.700,00	4.086.458.700,00	49.395.000,00	49.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.355.700,00	4.135.854.700,00	-3.501.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PENEHEL	0,00	0,00	4.246.193.800,00	3.897.480.400,00	96.536.600,00	96.536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.730.400,00	3.993.997.000,00	-348.733.400,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KERAMBITAN	0,00	0,00	3.363.761.400,00	3.277.714.260,00	47.088.000,00	47.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.748.400,00	3.325.702.260,00	-85.047.140,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	0,00	0,00	3.377.329.300,00	3.244.452.300,00	49.521.100,00	49.521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.850.400,00	3.293.973.400,00	-132.877.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SELEMADEG	0,00	0,00	3.471.343.100,00	3.373.949.900,00	47.820.800,00	47.820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.163.900,00	3.421.761.700,00	-97.402.200,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT	0,00	0,00	3.009.709.600,00	2.936.663.000,00	49.833.600,00	49.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.543.400,00	2.986.496.600,00	-73.046.800,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN PUPUAN	0,00	0,00	3.626.935.400,00	3.878.487.700,00	44.859.300,00	44.859.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.794.700,00	3.924.547.000,00	252.552.300,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	10.973.933.300,00	10.600.754.600,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.416.900,00	10.700.336.900,00	-373.078.000,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	10.973.933.300,00	10.600.754.600,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.416.900,00	10.700.336.900,00	-373.078.000,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	10.973.933.300,00	10.600.754.600,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.416.900,00	10.700.336.900,00	-373.078.000,00
			TOTAL	2.236.677.473.573,0	2.283.332.109.486,0	1.781.781.549.245,0	1.778.326.715.306,0	252.843.673.058,0	279.155.195.087,0	8.913.695.170,0	13.991.095.646,0	272.367.696.100,0	283.960.998.100,0	2.313.446.473.573,0	2.353.428.004.339,0	39.981.530.766,0



LAMPIRAN III

**RINCIAN PERUBAHAN APBD
MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**



KABUPATEN TABANAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.236.677.473.573,0 0	2.283.332.109.496,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	739.817.131.935,00	772.198.366.829,00	
4.1.01	Pajak Daerah	367.494.543.935,00	368.198.438.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	239.005.141.000,00	237.607.762.886,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.817.447.000,00	11.692.069.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.500.000.000,00	154.700.096.943,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.496.860.341.638,0 0	1.511.133.742.667,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.352.178.513.000,0 0	1.287.071.531.000,0 0	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.681.828.638,00	224.062.211.667,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tercapainya dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	438.601.333.000,00	397.815.666.767,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.640.000,00	80.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.499.000,00	7.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.942.000,00	11.942.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.934.000,00	104.884.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.798.000,00	11.786.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase ketersediaan barang milik daerah untuk kelancaran urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.026.400,00	58.312.900,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Presentase penyediaan jasa penunjang kantor			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.768.882.300,00	2.768.882.300,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.728.000,00	133.728.000,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Persentase Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar			
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Presentase Sekolah Dasar yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.250.000,00	179.896.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.283.030.210,00	2.283.030.210,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.187.144.800,00	4.185.704.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.055.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.280.000,00	38.080.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.720.000,00	7.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.369.253.185,00	28.067.880.010,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.942.400.000,00	4.107.450.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.643.384.680,00	6.155.925.790,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.326.262.135,00	410.594.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.454.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.555.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.268.100,00	4.268.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	320.731.900,00	320.731.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.374.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	77.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.794.000,00	1.794.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	856.000.000,00	856.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Presentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.136.624.000,00	1.110.206.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.405.600,00	

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000.000,00	3.794.914.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	246.276.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.509.608.890,00	17.250.227.396,00	
5.1.05	Belanja Hibah	442.800.000,00	442.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.652.054.890,00	3.536.421.810,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	434.936.220,00	363.838.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.845.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.647.300,00	2.279.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.352.700,00	72.721.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.226.300,00	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.773.700,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.000.000,00	228.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Indikator Keluaran	: Presentase Sekolah PAUD yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	92.722.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	972.000.000,00	900.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.718.700,00	40.243.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.657.300,00	162.133.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	21.805.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.638.000,00	280.468.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.022.900.000,00	6.022.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.402.000,00	178.702.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.282.800,00	1.042.927.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.582.579.200,00	338.195.200,00	

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	218.739.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	420.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Presentase Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.423.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	9.204.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.720.000,00	118.590.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	302.910.000,00	317.910.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.800.000,00	24.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.423.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.500,00	25.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.289.500,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.423.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.423.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.232.000,00	24.603.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.621.000,00	287.250.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			

Indikator Hasil	: Presentase penerapan kurikulum Bali Unggul pada satuan Pendidikan			
Kegiatan	: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan Dasar			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	1.289.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	23.710.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Indikator Keluaran	: Presentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Presentase guru yang sudah bersertifikat pendidik			
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Presentase Guru yang sudah bersertifikat Pendidik			
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	193.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.677.200,00	52.981.200,00	

Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.931.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.931.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	234.209.676.000,00	225.851.437.184,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.220.000,00	96.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.738.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.437.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dihasilkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	57.792.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.471.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.601.500,00	17.601.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.398.500,00	2.398.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	43.013.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	125.476.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	40.044.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.000,00	488.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.242.000,00	4.242.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.300,00	579.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.353.700,00	49.391.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	111.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	119.889.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	349.995.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.693.347.856,00	4.065.306.416,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.973.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	436.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	36.692.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.000.000,00	407.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.963.000.000,00	1.963.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.425.000,00	73.879.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.196.000.000,00	639.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.450.000,00	23.105.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	476.550.000,00	476.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.316.060,00	190.356.060,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.302.180,00	27.302.180,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.176.835.106,00	6.174.075.106,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.470.200,00	54.414.200,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.136.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.168.000,00	210.168.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.411.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.403.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	28.845.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.920.000,00	684.299.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.308.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.576.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.127.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	18.550.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.174.700,00	173.174.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.251.800,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.316.000,00	55.316.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.194.760,00	121.772.760,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.838.100,00	167.838.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.505.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.360.000,00	91.304.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.278.000,00	4.278.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.223.939.100,00	2.260.189.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.884.005.552,00	54.635.787.398,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	89.184.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.620.000,00	182.132.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.664.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.240.690,00	448.391.550,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.321.800,00	365.964.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	16.063.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.856.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	57.584.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.791.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	4.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	4.240.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.220.000,00	29.241.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.248.900,00	539.248.900,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.148.500,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi Standar Perijinan			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.689.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.232.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar			
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.568.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki dokumen perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.682.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.752.000,00	137.320.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.893.000,00	1.087.314.000,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Persentase usaha farmasi, alat keseha-tan dan makanan mi-numan yang meme-nuhi standar perijinan			
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki ijin sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.617.739,00	84.617.739,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Persentase Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.310.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
Indikator Keluaran	: Persentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan sticker Pembinaan			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	16.540.000,00	

Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.256.000,00	192.256.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.121.000,00	2.121.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.485.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	344.800.000,00	344.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS BATURITI 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.134.809.879,00	1.584.809.879,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.000.000,00	846.782.116,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.140.740,00	219.140.740,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.584.000,00	55.584.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.960.000,00	30.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.394.000,00	43.394.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.797.000,00	219.797.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	6.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.680.000,00	64.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: -			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.060.000,00	86.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.839.000,00	169.839.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.560.000,00	37.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.323.000,00	4.323.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.240.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS BATURITI 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Presentase Peningkatan pembiayaan operasional fasilitas pelayanan kesehatan pada faskes blud guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	578.000.000,00	720.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.794.219,00	321.720.498,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.329.000,00	144.329.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	51.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.787.000,00	23.787.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	12.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.162.000,00	143.162.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	8.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	27.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.100.000,00	47.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.400.000,00	140.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	5.120.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Presentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Publik yang dibuat di bidang kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.793.000,00	7.793.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS KEDIRI 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.198.732.562,00	1.791.562.101,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.155.042,00	1.005.295.042,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.000.000,00	735.876.236,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.976.000,00	20.976.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.240.000,00	60.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	13.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.318.000,00	326.318.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.111.000,00	2.111.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	18.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.020.000,00	81.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.550.000,00	196.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.794.000,00	25.794.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.460.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.075.000,00	8.075.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS KEDIRI 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	435.321.184,00	588.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.771.298,00	294.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.442.824,00	98.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.640.000,00	28.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.027.000,00	27.027.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	13.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.489.000,00	131.489.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.740.000,00	19.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.080.000,00	39.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	59.451.000,00	59.451.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.104.000,00	51.104.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	4.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.360.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS KEDIRI 3			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	589.658.206,00	679.988.843,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.105.472,00	472.732.706,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	120.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.960.000,00	32.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			

Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.840.000,00	18.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.491.000,00	136.491.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.160.000,00	67.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.380.000,00	144.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.617.000,00	6.617.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS KERAMBITAN 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	801.000.000,00	801.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.120.000,00	520.813.102,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.983.640,00	307.266.504,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.577.000,00	20.577.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.880.000,00	27.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	11.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.018.000,00	175.018.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.165.000,00	13.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.145.000,00	59.145.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.605.000,00	140.605.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan usia			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.220.000,00	12.220.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS KERAMBITAN 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	554.199.041,00	876.891.720,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.466.028,00	409.216.136,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	175.378.345,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.720.000,00	14.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.677.000,00	14.677.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	21.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	15.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.980.000,00	80.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.370.000,00	34.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.629.000,00	149.629.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.520.000,00	27.520.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS MARGA 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	776.389.115,00	1.150.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.592.744,00	647.439.893,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.000.000,00	200.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.840.000,00	135.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.360.000,00	36.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	10.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.554.000,00	177.554.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.120.000,00	33.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.886.000,00	152.886.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.430.000,00	50.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.000,00	897.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	19.980.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.173.000,00	8.173.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS MARGA 2			

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	711.180.342,00	850.144.436,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.000.000,00	362.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	164.192.488,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.488.000,00	19.488.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.040.000,00	35.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.107.000,00	151.107.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	18.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.620.000,00	28.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	9.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.898.000,00	38.898.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.960.000,00	91.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.457.000,00	9.457.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.180.000,00	12.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.605.000,00	9.605.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS PENEDEL 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.280.408.988,00	1.500.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.275.738,00	955.827.745,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.500.000,00	293.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.987.000,00	96.987.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	19.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.960.000,00	48.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	24.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.336.000,00	224.336.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.420.000,00	88.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.035.000,00	166.035.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.120.000,00	33.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	16.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	31.680.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan undefined			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS PENEHEL 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	659.087.920,00	819.856.580,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.785.598,00	571.640.839,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.000.000,00	154.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.767.000,00	90.767.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.120.000,00	39.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.880.000,00	122.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.310.000,00	11.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.420.000,00	45.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.300.000,00	92.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.039.000,00	155.039.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.916.000,00	17.916.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000,00	264.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.600.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.995.000,00	6.995.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS PUPUAN 1			

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.038.569.328,00	1.148.601.312,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.379.543,00	764.764.909,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	175.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	53.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	11.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.216.000,00	105.216.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.580.000,00	65.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	6.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	91.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.393.000,00	158.393.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.067.000,00	31.067.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			

Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	7.620.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS PUPUAN 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	606.716.457,00	756.021.707,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.783.223,00	418.512.016,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.833.298,00	175.505.039,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.040.000,00	80.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.680.000,00	19.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	17.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	11.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.758.000,00	181.758.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	12.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.980.000,00	25.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.280.000,00	68.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.092.000,00	142.092.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.480.000,00	39.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	757.000,00	757.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	7.320.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.253.000,00	14.253.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS SELEMADEG			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.176.000.000,00	1.200.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.989.303,00	771.735.999,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	122.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.400.000,00	140.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.120.000,00	39.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.520.000,00	65.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.855.000,00	300.855.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.640.000,00	11.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.320.000,00	67.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.920.000,00	37.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.950.000,00	119.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.953.000,00	192.953.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.760.000,00	32.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.000,00	551.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.760.000,00	35.760.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			

Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.635.000,00	17.635.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS SELEMADEG BARAT			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan pembiayaan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	825.875.359,00	1.050.522.762,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.583.573,00	768.117.733,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	150.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Layanan Kesehatan yang mampu dilayani Secara Prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	23.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.540.000,00	72.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.698.000,00	358.698.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.560.000,00	25.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.199.000,00	69.199.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.280.000,00	26.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.904.000,00	95.904.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.440.000,00	182.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.015.600,00	23.015.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.990.400,00	5.990.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.520.000,00	47.520.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Layanan Kesehatan yang mampu dilayani Secara Prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Layanan Kesehatan yang mampu dilayani Secara Prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.339.000,00	9.339.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi PD (diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan pembiayaan operasional fasilitas pelayanan kesehatan pada faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	585.599.090,00	610.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.999.394,00	347.271.976,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.400.000,00	238.157.675,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase capaian upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.360.000,00	24.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.620.000,00	13.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	12.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.783.000,00	131.783.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	5.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	15.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.403.000,00	36.403.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.462.000,00	33.462.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.330.000,00	126.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.108.000,00	9.108.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	7.560.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan sisitem informasi kesehatan secara terintegrasi di layani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.505.000,00	6.505.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	271.181.533,00	334.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.787.688,00	223.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	50.478.332,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.152.000,00	49.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	8.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.290.000,00	45.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.280.000,00	8.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.400.000,00	58.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.768.000,00	111.768.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.312.000,00	6.312.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	5.730.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS TABANAN 1			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	634.949.510,00	972.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.499.673,00	667.425.080,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	80.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.360.000,00	24.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.560.000,00	58.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.770.000,00	121.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	12.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.480.000,00	30.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.960.000,00	91.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.178.000,00	153.178.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	22.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.107.000,00	1.107.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.055.000,00	8.055.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS TABANAN 2			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Presentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Presentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	556.569.626,00	865.472.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.046.417,00	618.918.620,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	150.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Presentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	18.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	7.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.379.000,00	146.379.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	12.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.280.000,00	53.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.420.000,00	61.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.471.000,00	105.471.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.010.000,00	11.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.497.000,00	1.497.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.760.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Presentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.111.000,00	7.111.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS TABANAN 3			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	992.392.443,00	1.459.662.666,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.196.221,00	1.019.558.280,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.398.741,00	339.852.758,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.968.000,00	7.968.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.959.000,00	33.959.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	20.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.355.000,00	80.355.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	4.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.360.000,00	33.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.305.000,00	32.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.040.000,00	135.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000,00	29.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.545.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			

Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Siaga Madya			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.016.000,00	5.016.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0021 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi RSUD Tabanan-Hasil LKjIP			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000.000,00	8.000.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.366.675.700,00	132.506.675.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.003.149.300,00	3.393.324.300,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.030.175.000,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Capaian Indikator SPM dibagi Jumlah Target SPM dikali 100% - Jumlah Capaian Indikator Mutu Pelayanan dibagi Jumlah Target Indikator Mutu Pelayanan dikali 100% Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan Jumlah Alat Kesehatan Diadakan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.530.000.000,00	15.530.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.362.728.762,00	13.362.728.762,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0022 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.495.000.000,00	9.825.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.355.000.000,00	32.482.861.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.250.000.000,00	1.974.505.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	900.000.000,00	717.634.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.954.791.238,00	4.954.791.238,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.405.098.800,00	2.541.494.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	493.637.200,00	1.357.241.700,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.101.264.000,00	1.101.264.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPUPRPKP Tabanan)			
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.900.200,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.460.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	18.867.590.400,00	13.367.590.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.720.000,00	54.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	49.356.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.358.400,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.744.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.443.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	85.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	11.062.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.305.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.428.300,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.089.600,00	168.089.600,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	270.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.446.000,00	1.306.446.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.887.000,00	86.498.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	270.530.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.700.000,00	132.450.000,00	

Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Indeks Kinerja Jaringan Irigasi			
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase daerah irigasi yang terdata dan direncanakan di aplikasi e-PAKSI (dokumen PAI dan DED) di Kabupaten Tabanan			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.310.000,00	267.869.000,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Daerah Irigasi yang terpelihara			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000.000,00	3.782.133.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.392.443.000,00	5.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	1.900.447.200,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			

Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Air Minum Kabupaten			
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	38.378.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	2.337.670.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000.000,00	1.712.837.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat			
Kegiatan	: 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terbangunnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan limbah sesuai standar			
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	194.589.000,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Indikator Hasil	: Persentase genangan yang dapat ditangani			
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.319.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.680.000.000,00	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.546.800,00	1.074.093.300,00	
Program	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	: 1.03.07.2.01.0007 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	5.752.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	38.500.000,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Persentase bangunan gedung yang berijin dan laik fungsi			
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000.000,00	982.215.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.307.500.000,00	55.211.292.669,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	223.805.700,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang terselenggara			
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.269.500.000,00	17.265.682.850,00	
5.1.05	Belanja Hibah	41.102.500.000,00	57.346.159.278,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Persentase jalan berkategori mantap			
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase jalan kabupaten yang tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000.000,00	21.346.930.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.958.250.000,00	70.907.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000.000,00	6.060.685.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.650.000.000,00	12.300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000.000,00	1.711.242.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	485.000.000,00	485.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.201.000,00	2.085.879.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.799.000,00	43.799.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Persentase tenaga terampil jasa konstruksi bersertifikat			
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Persentase Tenaga Terampil yang memperoleh pelatihan			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.754.500,00	37.754.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.740.000,00	22.253.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	27.276.700,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Indikator Hasil	: Persentase terselenggaranya penataan ruang			
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen yang memiliki legalitas tata ruang			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	360.225.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah data SHP Peta Dasar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	121.206.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	186.310.500,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	133.405.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	49.450.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani			
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.373.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.373.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.016.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	37.061.400,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Rumah Korban Bencana yang tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	296.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	408.986.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman di wilayah Kumuh			
Kegiatan	: 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
Indikator Keluaran	: Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.429.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	35.729.500,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.200.000,00	194.617.000,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			

Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	1.093.533.000,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Persentase PSU yang telah diserahterimakan			
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: Persentase PSU perumahan yang terselenggara			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.842.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.999.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.300.000,00	60.837.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Satpol PP Tabanan)			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.821.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.907.700,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.784.748.000,00	13.784.748.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	28.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.405.300,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.900,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.900,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.496.300,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	71.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.845.000,00	17.845.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.997.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.974.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.500.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.933.000,00	364.933.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.780.100,00	99.631.900,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	50.873.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	4.940.600.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.999.700,00	119.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.980.000,00	14.980.000,00	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keindahan			
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Menurunnya Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.304.000,00	41.028.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.204.000,00	37.948.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.288.000,00	92.025.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.023.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	153.612.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.023.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Indikator Keluaran	: Menurunnya kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.235.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.009.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Optimalnya penyidikan dan penyelidikan terhadap Pelanggar Perda/perkada			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS			
Indikator Keluaran	: Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.736.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.049.500,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Indikator Hasil	: Persentase tingkat penyelesaian penanggulangan kebakaran			
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	71.379.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	170.966.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.309.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.900,00	199.781.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi BPBD			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yg Disusun			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.000,00	2.644.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.116.400,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pesentase Terpenuhinya Admiistrasi Keuangan BPBD			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.149.358.000,00	4.149.406.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.400,00	2.231.400,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum BPBD			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.400,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.500,00	1.997.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	20.251.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.880.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.974.000,00	6.868.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.998.800,00	4.684.900,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Pengadaan BMD Pada BPBD			

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.323.800,00	258.323.800,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.997.000,00	51.197.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.122.397.600,00	1.122.397.600,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya BMD yang Menunjang Urusan Kantor			

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.757.000,00	92.755.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.597.300,00	55.851.300,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase Wilayah yang Memenuhi Stansar Kesiapsiagaan Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.478.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.731.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.994.500,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.212.400,00	349.212.400,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana yg Terdata			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	25.805.000,00	

Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah			
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.848.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.016.131.000,00	5.710.251.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	28.080.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Kantor yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.700,00	2.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.400.000,00	58.227.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.976.000,00	6.868.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.862.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadakan Sesuai Kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.981.400,00	49.981.400,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang kantor yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.997.600,00	419.955.400,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.991.600,00	49.991.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS			
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase PSKS yang dibina			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.568.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	174.229.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.481.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	223.514.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.685.000.000,00	4.975.000.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Panti Yang Tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	72.870.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.090.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase data kemiskinan yang valid			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.230.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan sosial			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan sosial pada saat dan tanggap darurat bencana			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	224.265.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA			
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA			
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah pencari kerja terdaftar			
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja untuk Mendapat Pelatihan yang Berbasis Masyarakat dan Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.963.000,00	137.963.000,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	5.499.400,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah pencari kerja			
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan terhadap Jumlah Pencari Kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.555.500,00	16.831.500,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Lowongan Kerja yang Ada			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	14.832.000,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	446.880.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase capaian indeks pemberdayaan gender (IDG)			
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: jumlah pokja PUG aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.219.000,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani			
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai SOP			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	101.500.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga penanganan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.168.400,00	217.568.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	491.641.600,00	491.641.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.476.426.000,00	2.476.426.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	66.023.500,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: Persentase kecamatan dan desa layak anak			
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah forum anak daerah aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.599.000,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase gugus tugas KLA aktif			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.178.900,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani			
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah mas			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.749.200,00	70.269.200,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.070.000,00	165.070.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase lembaga yang mendapat penguatan			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	34.510.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN			
Unit Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN			
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			
Kegiatan	: 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.874.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.385.153.000,00	3.385.153.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	27.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.353.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya administrasi umum			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.500,00	1.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.500,00	1.998.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.998.500,00	19.809.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.948.000,00	14.824.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.888.500,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.111.500,00	28.111.500,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.998.600,00	19.998.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	161.433.800,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.989.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.640.000,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan			
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Indikator Keluaran	: Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.900,00	27.063.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.631.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			
Indikator Keluaran	: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.108.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani			

Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			
Indikator Keluaran	: Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.952.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	27.720.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Indikator Keluaran	: Persentase capaian target konsumsi pangan			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.300.000,00	159.326.000,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya penatagunaan tanah			
Kegiatan	: 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah			
Sub Kegiatan	: 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	5.096.329.100,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)			
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.524.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.460.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	15.325.946.000,00	13.325.946.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.280.000,00	50.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.810.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.911.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.149.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.251.900,00	62.251.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	49.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.303.000,00	16.472.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	12.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.000,00	758.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.242.000,00	4.242.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.632.500,00	390.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.367.500,00	99.446.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.000.000,00	181.961.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.442.046.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.844.000,00	261.798.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Proklm			
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Indeks Kualitas Air			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	334.241.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.510.000,00	64.655.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.010.500,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.121.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	78.926.000,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.355.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.998.800,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan RTH			
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Taman Yang Terpelihara			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.550.000,00	2.084.440.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	615.185.700,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	390.241.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	608.150.000,00	745.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.933.000,00	25.117.900,00	

Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase timbulan Sampah Yang Terkelola			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	71.333.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.015.893.700,00	4.698.950.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.025.000.000,00	6.025.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.959.106.300,00	6.127.767.100,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000.000,00	10.781.439.500,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana			

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.707.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.900,00	1.929.400,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.473.640.000,00	4.473.640.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.360.000,00	22.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mendukung tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.192.400,00	2.192.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.496.500,00	3.496.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.000,00	19.997.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	30.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.954.100,00	49.954.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.436.000,00	14.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.984.500,00	4.984.500,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.057.200,00	3.057.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	721.187.600,00	721.187.600,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.996.500,00	94.996.500,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.068.000,00	517.068.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.525.000,00	76.525.000,00	
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk			
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.711.700,00	708.896.700,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Indikator Hasil	: Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil			
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	2.199.158.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.332.000,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Persentase Penduduk yang Terlayani Administrasi Kependudukan			
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Tersedianya database kependudukan tingkat kabupaten			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.199.800,00	48.258.800,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang terkelola			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.443.300,00	113.443.300,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPMD Tabanan)			
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Renja dan Sakip			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.831.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.878.500,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.676.873.000,00	6.008.805.769,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	36.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.358.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.982.200,00	1.982.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.500,00	1.499.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.497.600,00	27.495.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.996.000,00	9.758.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.571.000,00	48.571.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.100,00	14.998.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.195.623.500,00	3.324.089.500,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.988.400,00	49.988.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase desa tertib hukum			
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Penataan Desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0002 Fasilitas Tata Wilayah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0003 Fasilitas Penataan Kewenangan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.484.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0004 Fasilitas Penamaan dan Kode Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.160.000,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Desa Tertib Administrasi			
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Desa yang dibina			
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	699.729.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	14.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	34.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0006 Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.880.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	82.515.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	14.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	21.021.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0016 Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	153.127.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga kemasyarakatan Desa			
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	239.944.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	19.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	39.051.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0008 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900,00	19.531.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.963.513.000,00	2.036.692.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Unit Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Program	: 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PD			
Kegiatan	: 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP silahkan ubah			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.306.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	3.387.700,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.519.779.000,00	3.519.779.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	36.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	3.832.200,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.498.600,00	7.498.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.400,00	4.998.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	29.859.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.995.500,00	2.995.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.474.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.095.000,00	45.541.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.469.800,00	175.855.800,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.492.000,00	25.361.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.597.500,00	313.170.500,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.992.000,00	183.904.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.890.000,00	19.890.000,00	
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif			
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA			
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.842.000,00	486.842.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.989.000,00	199.989.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	103.668.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Persentase PKB/PLKB yang mendapat penguatan KKBPK			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.914.000,00	1.159.914.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah PUS Miskin terlayani KB			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.892.000,00	63.892.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.171.000,00	339.171.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.310.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.195.000,00	45.195.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.223.500,00	28.257.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.496.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	149.561.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
Indikator Hasil	: PERSENTASE KEUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA			
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKA)			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	41.151.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	80.028.000,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.548.000,00	73.664.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.846.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.903.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.935.742.000,00	9.055.242.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.560.000,00	74.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.356.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.850.300,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.799.500,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.997.600,00	6.527.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.754.000,00	2.754.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	69.496.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.857.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.490.000,00	25.166.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.493.400,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.997.400,00	49.997.400,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.295.800,00	137.295.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.049.996.400,00	6.049.996.400,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.610.300,00	408.603.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	9.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten tabanan			
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapi Dengan Fasilitas Keselamatan Yang Memadai			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.071.169.900,00	2.081.016.600,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.220.100,00	235.220.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.873.091.900,00	14.838.091.600,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal Di Kabupaten Tabanan Dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.000.000,00	225.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Parkir Di Kabupaten Tabanan Yang Terkelola			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.736.500,00	468.963.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.263.500,00	86.874.300,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Persentase Kendaraan Laik Jalan			

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.813.600,00	222.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.866.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Tabanan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	922.094.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.119.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.027.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.869.450,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaksanaan Andalalin			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.049.900,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Indikator Keluaran	: Persentase Awak Angkutan Umum Yang Terbina			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	46.665.400,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Kecamatan Terlayani Angkutan Umum			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	9.959.602.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SAKIP tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.287.911.000,00	6.287.911.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	36.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	14.762.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.501.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.998.400,00	11.998.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.480.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	6.260.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.100,00	920.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.549.079.900,00	7.549.068.700,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	375.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.200,00	199.998.200,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.988.400,00	75.345.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.960.000,00	104.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan			

Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Pameran Pembangunan, Media Online, Media Cetak, Media Elektronik dan Kelompok Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	220.916.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	397.569.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.000.000,00	614.436.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	370.000.000,00	1.679.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi			
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Internal dan layanan publik Kabupaten Tabanan yang berbasis elektronik			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000.000,00	1.502.599.101,00	

Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengembangan TIK yang diterapkan dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	20.987.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	28.804.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	19.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.654.170.800,00	6.340.718.699,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.829.200,00	195.829.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	29.898.200,00	

Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA			
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.937.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.258.791.000,00	5.958.791.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.360.000,00	30.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.884.000,00	12.314.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	29.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.999.900,00	304.999.900,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.467.200,00	55.467.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Persentase Koperasi berkualitas			
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.000.000,00	781.072.000,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: Persentase UMKM berdaya saing			
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah UMKM yang Berdaya Saing			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.767.000,00	282.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.120.000,00	31.915.000,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPMPTSP Tabanan)			
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.874.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.916.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Laporan Keuangan			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.234.831.000,00	6.234.831.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.320.000,00	49.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.353.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.662.200,00	4.662.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.199.400,00	21.199.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.987.000,00	69.434.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.054.000,00	3.054.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.942.000,00	8.942.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.797.000,00	9.863.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.685.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	421.618.000,00	315.886.100,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	58.418.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.300.000,00	260.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.293.098.800,00	1.293.098.800,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.992.800,00	54.992.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.690.000,00	105.523.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah rencana investor berskala nasional (PMDN/PMA)			
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Masuk Pada Front Office Sampai Perijinan dan Non Perijinan Terbit Kurang lebih 10 Hari dan Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terbit			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.828.300,00	158.896.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.608.000,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat			
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengendalian Perkembangan Penanaman Modal dan Perijinan			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.222.000,00	25.674.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.483.000,00	85.449.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.445.000,00	77.706.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Pengembangan daya saing kepemudaan dalam pembangunan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	17.850.000,00	
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengembangan daya saing kepemudaan dalam pembangunan daerah			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAMHRAGAAN			
Indikator Hasil	: Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi			
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kejuaraan olahraga yang diselenggarakan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.165.673.700,00	1.165.673.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	125.000.000,00	125.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Rangkaing Porjar Tingkat Provinsi			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah penerima Penghargaan olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	720.364.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.925.000.000,00	4.015.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			

Indikator Hasil	: Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi			
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersusunya Dokumen Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabanan			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	26.576.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	26.605.800,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat diamankan melalui persandian dan sesuai dengan standar BSSN			
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah dengan Sistem Informasi yang terlayani Keamanan Informasi sesuai Standar BSSN			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.751.400,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terealisasinya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.848.383.000,00	6.375.623.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.320.000,00	49.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terealisasinya Administrasi Umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	18.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.920.000,00	49.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.604.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Adat Yang Terjaga Kelestariannya			
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebudayaan Daerah yang dibina			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.000.000,00	825.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000.000,00	1.554.790.600,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.950.000.000,00	11.375.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jantra Tradisi Bali yang Dibina			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.074.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.689.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga adat yang dibina			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.000.000,00	842.519.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.470.000.000,00	13.270.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	68.212.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.421.500,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase Kesenian Terasional yang Dilestarikan			
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kesenian tradisional yang dibina			
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.073.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.605.000.000,00	8.080.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	210.211.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000.000,00	3.762.826.000,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase Cagar Budaya Yang Diinventarisasi			

Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Cagar Budaya yang dibina			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	352.959.000,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Indikator Hasil	: Persentase Museum Yang Edukatif			
Kegiatan	: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah museum yang dibina			
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.832.000,00	365.832.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.295.000,00	801.295.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.873.000,00	22.873.000,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN			
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0001 TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA			
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.22.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.436.901.200,00	1.840.881.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.903.300,00	208.121.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	502.195.500,00	1.192.195.500,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.926.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.913.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.838.393.000,00	5.335.753.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	30.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.403.100,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.600,00	1.997.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.997.200,00	24.765.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.982.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	4.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.928.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	19.945.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.923.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.269.600,00	3.269.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.618.400,00	46.618.400,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.978.400,00	339.978.400,00	

Kegiatan	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Nilai LKJIP			
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.996.000,00	158.377.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.100.000,00	52.100.000,00	
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perpustakaan yang Prima			
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang di kelola dengan baik			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.965.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.992.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.600,00	491.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.417.400,00	9.417.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	71.496.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.995.000,00	30.946.000,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengunjung Perpustakaan			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	68.784.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.883.000,00	485.350.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.784.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.117.000,00	156.212.400,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang mengelola Arsip Sesuai NSPK			
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD, Desa BUMD, Swasta dan Ormas yang Dibina			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	45.313.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.492.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	31.189.900,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen/Arsip Daerah yang di Selamatkan dan dilestarikan			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			
Indikator Keluaran	: Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	308.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.495.000,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan			
Kegiatan	: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip OPD yang di data dan dimusnahkan			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.489.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.830.000,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Arsip Kakibat bencana yang dapat di selamatkan			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.012.000,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Arsip yang dapat di Selamatkan Akibat Penggabungan dan Pemekaran			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	3.436.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN			
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN			
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Prosentase Layanan Menunjang Tugas Pokok Dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SAKIP Dihasilkan Setahun			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.532.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.800,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Diberikan			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.093.471.000,00	5.093.471.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	40.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Layanan Perangkat Daerah Diberikan Setahun			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.400,00	1.499.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.600,00	2.999.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.780.000,00	19.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.760.000,00	17.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis BMD Disediakan Menunjang Operasional Dinas			

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Jasa Penunjang Kinerja Pelayanan Dinas			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.998.600,00	539.998.600,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis BMD Terpeliharaan Menunjang Operasional Dinas			
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.987.300,00	67.487.300,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.914.000,00	19.802.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	698.000.000,00	698.000.000,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum setahun			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.672.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	280.000.000,00	480.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah KUB Nelayan Terbina Produktif Setahun			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.120.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokdakan Produktif Terbina			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.875.000,00	325.875.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.416.000,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	272.832.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.040.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kaji Terap Teknologi Produktif Dihasilkan Setahun			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	70.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.000.000,00	127.000.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan			
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah PoklhasrYang Dapat Difasilitasi Pendaftaran Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Setahun			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.582.000,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Poklhasr Produkif Terbina			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	69.530.000,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Ikan Sebagai Bahan Baku Olahan Produk Bernilai Tambah Dimanfaatkan			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.000.000,00	962.069.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA			
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA			
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.400,00	2.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan PD			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.807.753.000,00	4.807.753.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.360.000,00	30.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum PD			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.841.800,00	1.841.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.472.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.270.600,00	49.270.600,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Irusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.000,00	24.999.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.302.400,00	219.302.400,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.998.800,00	79.998.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.990.000,00	
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase DTW Yang Berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020			
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah DTW yang terkelola			

Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	14.707.800,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Wisata yang berkembang			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.668.000,00	15.268.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	78.731.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.947.800,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya data usaha pariwisata			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0006 Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0008 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke DTW			
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelenggaraan event pariwisata			
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Indikator Hasil	: Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas			

Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	195.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	26.961.900,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN			
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.376.306.000,00	17.576.306.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	49.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.559.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.217.400,00	55.217.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.973.000,00	10.394.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.836.000,00	93.976.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000,00	1.154.349.880,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.988.000,00	89.988.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.942.200,00	64.935.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi pertanian			
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000.000,00	125.806.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	2.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	125.303.800,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.743.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.655.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan benih/bibit			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.500.000,00	131.330.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	370.000.000,00	860.000.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan			
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase Penggunaan Prasarana Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	12.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	130.000.000,00	445.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	108.233.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.752.000,00	1.947.378.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			
Indikator Keluaran	: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: -			

Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	36.535.000,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh			
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan Yang Berhasil Meningkatkan Kelas			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	92.203.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	72.645.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.793.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	222.300.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Disperindag Tabanan)			
Kegiatan	: 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.937.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.135.680.000,00	5.343.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.320.000,00	41.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.458.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Lancarnya Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.300,00	2.999.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.442.500,00	31.190.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.920.000,00	14.873.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800,00	4.999.800,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.729.000,00	64.729.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.900,00	1.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.999.700,00	82.097.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.998.600,00	469.998.600,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Lancarnya Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.991.400,00	108.551.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.920.000,00	9.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.960.000,00	99.960.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	249.900.000,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Yang Legal dan Representatif			
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terfasilitasi dan Terawasi			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.313.186.000,00	2.278.328.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	764.400.000,00	244.020.000,00	
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.831.900,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Persentase UTP yang di Tera/Tera Ulang yang diawasi			
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.919.150,00	33.623.150,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.512.000,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Indikator Hasil	: Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang Mampu Difasilitasi Dalam Pemasaran			
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam pemasaran			
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	549.519.000,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase Industri Kreatif yang berkembang			
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.499.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000.000,00	1.111.731.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	623.663.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.664.200,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH			
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Dokumen LKJP dan Dokumen Renja Setda			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.586.200,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Kesejahteraan PNS Setda Kabupaten Tabanan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	38.549.710.000,00	32.049.710.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.840.000,00	45.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.321.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang Administrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.988.900,00	139.964.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.516.745.300,00	2.702.871.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.724.900,00	2.724.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.439.200,00	360.439.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.599.662.800,00	2.824.037.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	179.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.260.000,00	147.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	404.536.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.908.304.000,00	1.486.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.600,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.939.400,00	4.939.400,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	551.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	630.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.192.175.700,00	2.927.953.800,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	63.500.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase lancarnya tugas dan fungsi perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.901.000,00	1.155.901.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.388.518.800,00	9.898.518.800,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa pemeliharaan biaya, pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.236.000,00	1.359.236.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.400.000,00	537.738.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	190.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.341.711.400,00	3.553.830.341,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Kesejahteraan KDH dan WKDH Terfasilitasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	171.882.000,00	218.682.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.200.000,00	95.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			
Indikator Keluaran	: Prosentase Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan sesuai aturan dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	169.158.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.400.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	33.829.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan terselenggaranya komunikasi pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.500.000,00	338.232.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.843.104.500,00	5.007.270.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.364.400,00	177.537.900,00	
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: Persentase kebijakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi.			
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Perumusan/ bimbingan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah Pelaksanaan Perumusan/ bimbingan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah			

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	107.284.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	24.142.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000,00	4.054.667.200,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: Presentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000.000,00	13.537.898.500,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Perda dan Produk Hukum lainnya serta pendampingan bantuan hukum			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.710.000,00	170.471.500,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.000.000,00	206.067.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	65.272.000,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Kerjasama			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.750.000,00	17.794.800,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan			
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Laporan Program BUMD dan BLUD, serapan KUR, hasil Survey Pasar dan Terkendalnya Pasokan Harga BBM LPG Bersubsidi			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	41.899.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.848.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.116.600,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kualitas rekomendasi kebijakan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	6.829.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.899.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.814.700,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Prosentase Tersedianya Dokumen pengadaan Barang dan Jasa, RUP, dan Meningkatnya SDM			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	131.993.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.935.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	34.084.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.301.384.000,00	7.301.384.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.923.500,00	1.315.638.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.026.500,00	87.026.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	133.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800,00	46.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.155.600,00	216.905.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	516.193.600,00	516.193.600,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	257.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	430.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.757.600,00	150.757.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.242.400,00	4.242.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.920.253.000,00	5.920.253.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	38.571.040.000,00	40.071.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	473.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.662.000,00	220.662.000,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Indikator Hasil	: Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana			
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000.000,00	2.408.452.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	660.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.340.000.000,00	6.340.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.740.765.500,00	12.271.613.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Bappeda			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.450.303.000,00	7.450.303.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	28.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.979.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.999.700,00	15.889.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.300,00	29.999.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.900,00	35.697.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.968.000,00	101.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kebutuhan Barang Kantor			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.994.800,00	227.572.400,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	146.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.465.100,00	285.463.600,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Kantor dalam Kondisi Baik			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.994.500,00	133.994.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.272.800,00	50.272.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD dalam RKPD			
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Indikator Keluaran	: Prosentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.089.772.400,00	646.103.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Capaian Pembangunan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	135.367.000,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	234.908.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	201.713.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	493.754.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.393.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	93.608.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	84.300.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bakeuda Tabanan)			
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	35.930.179.000,00	37.513.181.747,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.932.653.000,00	2.177.653.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	13.499.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	67.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	88.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.926.000,00	39.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Pesentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penunjang urusan Pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.651.620.700,00	12.702.832.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	753.379.300,00	1.358.379.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.155.600,00	370.419.500,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000.000,00	1.472.944.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.992.200,00	54.992.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.300,00	9.999.300,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK			
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	194.408.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	200.577.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.213.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.000.000,00	351.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.000.000,00	511.456.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	213.202.600,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Indikator Keluaran	: Pesentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	29.236.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.517.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi dan pelaporan keuangan daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: rPersentase penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	
5.1.03	Belanja Bunga	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.108.300,00	48.108.300,00	
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.033.727.000,00	235.560.511.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	38.273.969.100,00	48.400.487.100,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik			
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.344.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.080.000,00	33.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	1.110.458.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	235.338.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	350.000.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase terpenuhinya dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.028.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	273.068.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	663.924.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.804.800,00	1.191.287.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	151.139.200,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN			
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Sakip tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.853.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.874.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.410.705.000,00	7.410.705.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	28.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.937.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.499.400,00	5.499.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.998.700,00	24.830.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.417.000,00	28.157.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.687.200,00	269.730.300,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	56.997.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.500.800,00	488.500.800,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	91.959.880,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.870.000,00	22.870.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: INDEKS MERIT SISTEM			
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan formasi dan informasi kepegawaian			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	19.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	28.894.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.600.000,00	812.857.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	123.539.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.500.000,00	426.811.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan mutasi dan promosi ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	63.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.500.000,00	456.911.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Presentase ASN yang memperoleh peningkatan kualifikasi			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang berkinerja baik			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.000.000,00	147.527.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.803.800,00	89.421.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	18.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	14.765.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Indikator Hasil	: Persentase ASN yang memperoleh Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional			
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.273.846.100,00	1.136.247.900,00	
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.141.782.000,00	1.945.464.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Kajian Kebijakan Yang Disusun Terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah			
Kegiatan	: 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.864.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.886.400,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.753.791.000,00	3.213.791.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.360.000,00	22.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.195.300,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.987.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.860.000,00	46.414.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.090.400,00	214.090.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.729.200,00	159.729.200,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.998.300,00	79.998.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	420.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.200,00	79.989.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Kajian Kebijakan Yang Disusun Terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah			
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.109.915.000,00	2.372.707.600,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	516.940.400,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.500.000,00	851.658.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.598.800,00	220.774.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	220.661.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT			
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT			
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD			
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.594.700,00	14.214.700,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.069.800,00	3.724.800,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Keuangan OPD yang tersusun tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	15.026.320.100,00	14.328.480.100,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	34.080.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase SDM yang bersertifikat			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.451.925.000,00	1.443.824.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhnya penunjang administrasi umum perkantoran			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.179.100,00	6.179.100,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.948.300,00	14.833.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.526.900,00	60.526.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.410.500,00	52.110.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.075.700,00	108.075.700,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.330.000,00	402.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	35.500.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	757.486.200,00	303.121.270,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.199.100,00	50.799.100,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.162.000,00	207.162.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.989.400,00	366.116.600,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.610.000,00	36.610.000,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan			
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.679.000,00	580.264.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.085.000,00	580.264.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.764.000,00	473.632.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.219.564.000,00	710.032.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.253.764.000,00	743.732.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.064.000,00	178.632.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.764.000,00	223.632.000,00	

Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.589.000,00	97.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.669.000,00	112.410.000,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan			
Kegiatan	: 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.988.000,00	13.455.000,00	
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.181.535.700,00	532.952.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.202.215.000,00	556.832.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.807.120.700,00	2.364.864.700,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KEDIRI			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KEDIRI			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.436.652.000,00	3.136.652.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	38.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.744.300,00	31.744.300,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	190.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Pesentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	37.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang Difasilitasi Untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	33.495.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kediri			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	36.050.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TABANAN			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TABANAN			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Sakip			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.748.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.832.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.212.665.000,00	3.212.665.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.769.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.100,00	1.991.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.700,00	2.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.207.460,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.852.900,00	2.562.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.848.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.205.400,00	3.205.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.678.300,00	41.678.300,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	44.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.998.200,00	174.998.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.999.300,00	25.999.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.861.800,00	4.861.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.940.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	72.611.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Peringatan Hari-hari Nasional yang diselenggarakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.580.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MARGA			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN MARGA			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Sakip			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.645.392.000,00	3.545.392.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.500,00	886.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.400,00	2.999.400,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	672.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.854.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.126.500,00	37.329.800,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.490.000,00	41.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.990.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	79.216.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum di Kecamatan Marga			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	31.566.700,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BATURITI			

Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BATURITI			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Baturiti)			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Sakip			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Baturiti)			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.614.971.000,00	3.614.971.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.600,00	2.998.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.800,00	1.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.395.000,00	49.395.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.998.200,00	174.998.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.993.200,00	41.993.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	4.860.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baturiti			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	69.658.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Tepat Guna			

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0005 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.900,00	2.680.900,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	37.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PENEHEL			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PENEHEL			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.937.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.874.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.744.520.000,00	3.394.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.000,00	1.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.200,00	2.999.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	39.132.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.900,00	1.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.477.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.536.600,00	96.536.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	49.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.993.500,00	188.993.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.996.000,00	42.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya tugas pelimpahan yang diberikan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.278.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	82.747.800,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Koordinasi yang dilaksanakan atas permasalahan ketentraman dan ketertiban umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Persentase koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Penebel			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	37.933.300,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KERAMBITAN			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KERAMBITAN			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD(Kecamatan Kerambitan)			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.974.880.000,00	2.874.880.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.500,00	1.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.800,00	2.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.995.500,00	44.995.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.854.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.988.000,00	47.988.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	44.998.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.999.900,00	100.999.900,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.990.400,00	42.990.360,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kerambitan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.292.400,00	5.292.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	66.808.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.900,00	34.999.900,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SELEMADEG TIMUR			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Selemadeg Timur)			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sakip			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.993.078.000,00	2.893.078.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.600,00	1.991.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.997.200,00	2.997.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	54.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.807.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.521.100,00	49.521.100,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.997.500,00	109.997.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.228.000,00	28.228.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.770.000,00	11.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Timur			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	41.950.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.350.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SELEMADEG			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SELEMADEG			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Selemadeg)			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Sakip			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.032.953.000,00	2.932.953.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.600,00	2.158.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.820.800,00	47.820.800,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.784.700,00	28.784.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.323.800,00	156.323.800,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.988.000,00	34.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang Difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.218.000,00	71.993.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SELEMADEG BARAT			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN SELEMADEG BARAT			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Selemadeg Barat)			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Sakip			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.866.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.076.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.672.040.000,00	2.622.040.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	27.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.748.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	54.349.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.836.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.833.600,00	49.833.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	18.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.400.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.985.200,00	39.985.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang Difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.398.600,00	2.604.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	82.664.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	16.880.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUPUAN			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PUPUAN			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Pupuan)			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen SAKIP			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.899.900,00	1.899.900,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.146.246.000,00	3.386.825.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.497.000,00	1.497.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.900,00	2.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.800,00	1.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.600,00	9.999.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.854.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.399.900,00	4.399.900,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.859.300,00	44.859.300,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.999.000,00	26.998.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.672.000,00	167.670.900,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.989.400,00	54.981.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	9.281.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pupuan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.999.900,00	6.999.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.999.000,00	81.935.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Pupuan			

Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	40.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kesbangpol Tabanan)			
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen perencanaan yang baik			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.580.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya administrasi keuangan OPD			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.793.867.000,00	4.793.867.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.765.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam kondisi baik dalam menunjang kelancaran tugas PD.			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	979.900,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.974.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.997.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.942.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	17.248.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang milik daerah dalam menunjang kelancaran tugas PD			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	319.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.483.600,00	99.584.300,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Kantor dalam melancarkan tugas PD			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	28.111.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	283.050.800,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah dalam menunjang kelancaran tugas PD			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	49.992.400,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.888.200,00	9.888.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai-Nilai Kebangsaan			
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang mendapatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.			
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	998.930.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	277.819.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.280.000,00	36.787.400,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Indikator Hasil	: Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu			
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang mendapatkan pendidikan politik pengembangan etika serta budaya politik			
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.810.100,00	73.830.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	18.400.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.031.310.000,00	3.031.310.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Indikator Hasil	: Prosentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan			
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pemberdayaan Ormas			
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.580.000,00	19.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.750.000,00	59.790.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase partisipasi masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi			
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya di kabupaten Tabanan			
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.570.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	650.000.000,00	525.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalinya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan			
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Data Keterlibatan Pemuda dalam pembangunan			
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.968.000,00	14.829.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.360.000,00	87.772.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	174.758.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.000.000.000,00	88.326.894.843,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.000.000.000,00	88.326.894.843,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	



Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	174.758.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96.000.000.000,00	88.326.894.843,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.000.000.000,00	88.326.894.843,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.231.000.000,00	18.231.000.000,00	

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA.

LAMPIRAN IV

**REKAPITULASI BELANJA
MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN BESERTA HASIL DAN
SUB KEGIATAN BESERTA SUB
KELUARAN KABUPATEN TABANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN TABANAN

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PENDIDIKAN													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya dokumen SAKIP	3 Dokumen											
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %											
3	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3705 Orang/bulan	438.681.973.000,00	397.896.306.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.681.973.000,00	397.896.306.767,00	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU)
4	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %											
5	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.499.000,00	7.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499.000,00	7.499.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
6	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.942.000,00	11.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942.000,00	11.942.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	105.934.000,00	104.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.934.000,00	104.884.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
9	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
11	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	19.798.000,00	11.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798.000,00	11.786.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketersediaan barang milik daerah untuk kelancaran urusan pemerintah daerah	97 %											
13	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	49.026.400,00	58.312.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.026.400,00	58.312.900,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang kantor	100 %											
14	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
15	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
16	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.768.882.300,00	2.768.882.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.882.300,00	2.768.882.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %											
17	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit	133.728.000,00	133.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.728.000,00	133.728.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	76,70 %											
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase Sekolah Dasar yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar	95 %											
18	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	228.250.000,00	179.896.000,00	2.283.030.210,00	2.283.030.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.280.210,00	2.462.926.210,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
19	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	242 Orang	4.187.144.800,00	4.185.704.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.144.800,00	4.185.704.800,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
21	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	289 Orang	50.000.000,00	49.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.055.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
22	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	5 Satuan Pendidikan	42.280.000,00	38.080.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	45.800.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
23	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	287 Satuan Pendidikan	31.311.653.185,00	32.175.330.010,00	6.969.646.815,00	6.566.519.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.281.300.000,00	38.741.850.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler
24	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	289 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	289 Orang	30.000.000,00	28.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.950.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
26	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	30.000.000,00	28.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.470.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
27	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	289 Orang	50.000.000,00	48.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.470.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
28	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	20.000.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.350.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
29	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	10.000.000,00	9.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.454.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
30	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	30.000.000,00	27.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.555.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
31	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	25.000.000,00	24.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.340.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
32	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	28900 Buku	4.268.100,00	4.268.100,00	320.731.900,00	320.731.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
33	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	74 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
34	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	289 Orang	40.000.000,00	38.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.374.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	289 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
37	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	100.000.000,00	77.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	77.390.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1.794.000,00	1.794.000,00	856.000.000,00	856.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.794.000,00	857.794.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar	95 %											
39	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.136.624.000,00	1.110.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.624.000,00	1.110.206.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
40	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	100.000.000,00	90.405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	90.405.600,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
42	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	465 Orang	3.800.000.000,00	3.794.914.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	3.794.914.700,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
43	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	202 Orang	50.000.000,00	47.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	47.975.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
44	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	38 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	246.276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	246.276.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
45	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	38 Satuan Pendidikan	17.952.408.890,00	17.693.027.396,00	4.086.991.110,00	3.900.260.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.039.400.000,00	21.593.287.906,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Reguler
46	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	39 Orang	30.000.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.750.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
47	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	30.000.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.650.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
48	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	39 Orang	50.000.000,00	47.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	47.750.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
49	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	30.000.000,00	28.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.845.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
50	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	30.000.000,00	28.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.410.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
51	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	50.000.000,00	47.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	47.240.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
52	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	27.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.825.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
53	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
54	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	39 Orang	40.000.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.200.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3800 Buku	6.647.300,00	2.279.000,00	68.352.700,00	72.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
56	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	4.226.300,00	20.000.000,00	15.773.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
57	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentase Sekolah PAUD yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar	25 %											
58	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	28.000.000,00	92.722.000,00	972.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	992.722.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
59	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	324 Paket	20.718.700,00	40.243.000,00	181.657.300,00	162.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.376.000,00	202.376.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
60	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			0	20 0	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
61	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
62	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	40.000.000,00	21.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	21.805.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
63	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	303 Satuan Pendidikan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
64	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	297 Satuan Pendidikan	6.310.538.000,00	6.303.368.000,00	185.402.000,00	178.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.940.000,00	6.482.070.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-BOP PAUD
65	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	20.000.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.360.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
66	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	658 Orang	40.000.000,00	24.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	24.235.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
67	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
68	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			0	1 0	20.000.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.360.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
69	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	20.000.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.360.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
70	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	20.000.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.360.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
71	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	32 Paket	17.282.800,00	1.042.927.600,00	1.582.579.200,00	556.934.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.862.000,00	1.599.862.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Non Fisik-BOP PAUD
72	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	303 Satuan Pendidikan	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki sarana prasarana Pendidikan sesuai Standar	17 %											
73	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5 Peserta Didik	10.000.000,00	5.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.423.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
74	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	9.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.204.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
75	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	422.630.000,00	436.500.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.430.000,00	461.300.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
76	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	6 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
77	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
78	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	6 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
79	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	10.000.000,00	5.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.423.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
80	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
81	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
82	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
83	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	3.710.500,00	25.000.000,00	26.289.500,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	10.000.000,00	5.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.423.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
85	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	6 Peserta Didik	10.000.000,00	5.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.423.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
86	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	1.232.000,00	24.603.000,00	310.621.000,00	287.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.853.000,00	311.853.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase penerapan kurikulum Bali Unggul pada satuan Pendidikan	100 %											
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan Dasar	100 %											
87	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
88	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	80 Buku	25.000.000,00	1.289.600,00	0,00	23.710.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
89	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	150 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
90	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100 %											
91	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
92	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	50 Buku	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
93	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru yang sudah bersertifikat pendidik	100 %											
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Guru yang sudah bersertifikat Pendidik	95 %											
94	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	200.000.000,00	193.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	193.280.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
95	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	67.677.200,00	52.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.677.200,00	52.981.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-											
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan daya saing kepemudaan dalam pembangunan daerah	35 %											
96	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	550.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota													
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5 Orang	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan daya saing kepemudaan dalam pembangunan daerah	35 %											
98	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Organisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi	3 Ranking											
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	1 Dokumen											
99	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1.290.673.700,00	1.290.673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.673.700,00	1.290.673.700,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rangking Porjar Tingkat Provinsi	3 Rangking											
100	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga													
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	200 Orang	750.000.000,00	720.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	720.364.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-											
101	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota													
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
102	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.925.000.000,00	4.015.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.000.000,00	4.015.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		DINAS KESEHATAN													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100 %											
103	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000,00	2.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.931.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
104	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.931.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %											
105	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17524 Orang/bulan	234.305.896.000,00	225.947.657.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.305.896.000,00	225.947.657.184,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
106	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	4.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.738.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
107	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	2.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.437.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dihasilkan	100 %											
108	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
109	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	60.000.000,00	57.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	57.792.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %											
110	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	9.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.471.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
112	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	17.601.500,00	17.601.500,00	2.398.500,00	2.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
113	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.200.000,00	43.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200.000,00	43.013.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
114	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.940.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
115	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
116	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	125.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	125.476.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
117	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	80.000.000,00	40.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	40.044.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
118	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400 Dokumen	758.000,00	488.000,00	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.730.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang tersedia	100 %											
119	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
120	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	646.300,00	579.700,00	49.353.700,00	49.391.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.971.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
121	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
122	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	111.000,00	0,00	119.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
123	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %											
124	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
125	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	349.995.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	349.995.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
126	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
127	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.693.347.856,00	4.065.306.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.347.856,00	4.065.306.416,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %											
128	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	200.000.000,00	199.973.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.973.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
129	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
130	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
131	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
132	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan	100 %											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %											
134	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas													
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	436.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
135	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
136	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	37.000.000,00	36.692.000,00	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.000.000,00	2.406.692.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
137	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
138	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	74.425.000,00	73.879.000,00	1.196.000.000,00	639.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.425.000,00	713.479.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
139	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	23.450.000,00	23.105.000,00	476.550.000,00	476.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	499.655.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
140	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
141	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
142	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
143	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	520 Unit	191.316.060,00	190.356.060,00	27.302.180,00	27.302.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.618.240,00	217.658.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
144	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 Paket	6.176.835.106,00	6.174.075.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.835.106,00	6.174.075.106,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
145	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	22 Paket	55.470.200,00	54.414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.470.200,00	54.414.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
146	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5643 Orang	20.000.000,00	19.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.136.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
147	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5387 Orang	210.168.000,00	210.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.168.000,00	210.168.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
148	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4951 Orang	10.000.000,00	9.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.411.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
149	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24726 Orang	10.000.000,00	9.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.403.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51629 Orang	25.000.000,00	23.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.620.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
151	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289769 Orang	40.000.000,00	28.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	28.845.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
152	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80461 Orang	684.920.000,00	684.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.920.000,00	684.299.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Alokasi Umum (DAU)
153	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131099 Orang	7.500.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.308.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
154	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5525 Orang	10.000.000,00	8.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.576.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
155	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1362 Orang	25.000.000,00	15.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	15.127.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
156	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2967 Orang	168.550.000,00	168.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.550.000,00	168.550.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
157	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6963 Orang	273.174.700,00	273.174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.174.700,00	273.174.700,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
158	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
159	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
160	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	15.000.000,00	14.251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.251.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
161	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	55.316.000,00	55.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.316.000,00	55.316.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
162	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	23.194.760,00	121.772.760,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.194.760,00	121.772.760,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
163	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	167.838.100,00	167.838.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.838.100,00	167.838.100,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
164	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	10.000.000,00	9.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.505.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
165	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	92.360.000,00	91.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.360.000,00	91.304.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
166	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2769 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
167	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11 Orang	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.000,00	4.278.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
168	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
169	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	2.423.939.100,00	2.460.189.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.939.100,00	2.460.189.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
170	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	50.884.005.552,00	54.635.787.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.884.005.552,00	54.635.787.398,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
171	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah													
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	309791 Orang	250.000.000,00	239.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	239.184.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
172	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	183.620.000,00	182.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.620.000,00	182.132.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
173	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	40.000.000,00	38.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.620.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
174	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	5 Unit	15.000.000,00	14.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.664.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
175	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	446.240.690,00	448.391.550,00	352.321.800,00	365.964.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.562.490,00	814.356.150,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
176	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit	25.000.000,00	16.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	16.063.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
177	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	5.000.000,00	4.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.856.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
178	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	83.000.000,00	57.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	57.584.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
179	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	25.000.000,00	23.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.791.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
180	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	551 Orang	12.200.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	4.240.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
181	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1456 Orang	12.200.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	4.240.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
182	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	589 Orang	38.220.000,00	29.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220.000,00	29.241.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
183	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	539.248.900,00	539.248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.248.900,00	539.248.900,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
184	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000,00	48.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.148.500,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi Standar Perijinan	50 %											
185	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25 Unit	10.000.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.520.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
186	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	25 Unit	20.000.000,00	16.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.175.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
187	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	25.000.000,00	23.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.689.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
188	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	15.000.000,00	14.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.232.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar	60 %											
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	86 %											
189	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
190	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	10.000.000,00	9.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.568.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki dokumen perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja	100 %											
191	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24 Dokumen	10.000.000,00	9.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.682.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
192	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
193	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	137.752.000,00	137.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.752.000,00	137.320.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR	100 %											
194	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	1.087.893.000,00	1.087.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.893.000,00	1.087.314.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha farmasi, alat keseha-tan dan makanan mi-numan yang meme-nuhi standar perijinan	70 %											
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki ijin sesuai standar	70 %											
195	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69 Dokumen	84.617.739,00	84.617.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.617.739,00	84.617.739,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat	100 %											
196	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137 Dokumen	15.000.000,00	14.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.310.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	75 %											
197	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan sticker Pembinaan	78 %											
198	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	17.500.000,00	16.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	16.540.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	70 %											
199	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	192.256.000,00	192.256.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.377.000,00	194.377.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan	1 Dokumen											
200	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	364.800.000,00	363.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800.000,00	363.285.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	85 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	75 %											
202	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
		PUSKESMAS BATURITI 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
203	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.857.809.879,00	2.431.591.995,00	219.140.740,00	219.140.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.950.619,00	2.650.732.735,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
204	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2765 Orang	55.584.000,00	55.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.584.000,00	55.584.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
205	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4311 anak usia pendid Orang	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
206	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67 Orang	30.960.000,00	30.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960.000,00	30.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
207	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191terduga tubercolo Orang	43.394.000,00	43.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.394.000,00	43.394.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
208	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	219.797.000,00	219.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.797.000,00	219.797.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
209	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
210	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00	6.540.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
211	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	64.680.000,00	64.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680.000,00	64.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
212	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			[object Object]	[object Object]	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
213	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	114.060.000,00	86.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.060.000,00	86.820.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
214	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	169.839.000,00	169.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.839.000,00	169.839.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
215	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
216	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
217	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	111 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
218	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.560.000,00	37.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
219	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	4.323.000,00	4.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.000,00	4.323.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
220	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
221	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 LAPORAN Dokumen	0,00	27.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
222	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
223	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS BATURITI 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Peningkatan pembiayaan operasional fasilitas pelayanan kesehatan pada faskes blud guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
224	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	869.794.219,00	1.041.720.498,00	94.329.000,00	144.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.123.219,00	1.186.049.498,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
225	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
226	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	192 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
227	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1766 Orang	23.787.000,00	23.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787.000,00	23.787.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
228	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
229	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
230	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	238 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
231	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	143.162.000,00	143.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.162.000,00	143.162.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
232	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
233	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
234	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	27.960.000,00	27.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960.000,00	27.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
235	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
236	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100.000,00	47.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
237	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400.000,00	140.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
238	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
239	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
240	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
241	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
242	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
243	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
244	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %												
245	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Desa Siaga Madya	36 %												
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Publik yang dibuat di bidang kesehatan	100 %												
246	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.793.000,00	7.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793.000,00	7.793.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
		PUSKESMAS KEDIRI 1														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %												
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %												
247	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.757.887.604,00	2.796.857.143,00	240.000.000,00	735.876.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.887.604,00	3.532.733.379,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80 %												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
248	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562 Orang	20.976.000,00	20.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.976.000,00	20.976.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
249	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
250	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6506 Orang	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
251	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	147 Orang	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240.000,00	60.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
252	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	783 Orang	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560.000,00	13.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
253	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
254	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	326.318.000,00	326.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.318.000,00	326.318.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
255	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.111.000,00	2.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.000,00	2.111.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
256	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	18.120.000,00	18.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120.000,00	18.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
257	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
258	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	178 Orang	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
259	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	99.020.000,00	81.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.020.000,00	81.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
260	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	196.550.000,00	196.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.550.000,00	196.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
261	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	25.794.000,00	25.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.794.000,00	25.794.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
262	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
263	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	409 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
264	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
265	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
266	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
267	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
268	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
269	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
270	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS KEDIRI 2													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
271	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	673.092.482,00	882.000.000,00	52.442.824,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.535.306,00	980.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 % 80 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
272	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	28.640.000,00	28.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640.000,00	28.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
273	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
274	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - -
275	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
276	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	27.027.000,00	27.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027.000,00	27.027.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
277	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
278	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
279	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
280	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
281	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
282	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
283	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
284	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	131.489.000,00	131.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.489.000,00	131.489.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
285	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
286	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
287	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740.000,00	19.740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
288	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
289	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
290	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	55.080.000,00	39.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080.000,00	39.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
291	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	110.555.000,00	110.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.555.000,00	110.555.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
292	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
293	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
294	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
295	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
296	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
297	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
298	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
299	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS KEDIRI 3													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
300	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	902.763.678,00	1.152.721.549,00	80.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.763.678,00	1.272.721.549,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
301	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	263 Orang	32.960.000,00	32.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960.000,00	32.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
302	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
303	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
304	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1015 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
305	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1883 Orang	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.000,00	18.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
306	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12204 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
307	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3887 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
308	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6126 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
309	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
310	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	15 Orang	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
311	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	81 Orang	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
312	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
313	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	136.491.000,00	136.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.491.000,00	136.491.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
314	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
315	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
316	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
317	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
318	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
319	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
320	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	67.160.000,00	67.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.160.000,00	67.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
321	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
322	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	144.380.000,00	144.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.380.000,00	144.380.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
323	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
324	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
325	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
326	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
327	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
328	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.000,00	6.617.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS KERAMBITAN 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
329	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.104.120.000,00	1.321.813.102,00	6.983.640,00	307.266.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.103.640,00	1.629.079.606,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 % 80 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
330	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	302 Orang	20.577.000,00	20.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.577.000,00	20.577.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
331	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
332	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2097 Orang	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
333	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	64 Orang	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880.000,00	27.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
334	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 Orang	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160.000,00	11.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
335	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	352 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
336	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	175.018.000,00	175.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.018.000,00	175.018.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
337	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
338	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.165.000,00	13.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165.000,00	13.165.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
339	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
340	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	64 Orang	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
341	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	59.145.000,00	59.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.145.000,00	59.145.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
342	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	140.605.000,00	140.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.605.000,00	140.605.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
343	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
344	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
345	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
346	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	54 Orang	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
347	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
348	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
349	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
350	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	12.220.000,00	12.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.000,00	12.220.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS KERAMBITAN 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
351	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	843.665.069,00	1.286.107.856,00	80.000.000,00	175.378.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.665.069,00	1.461.486.201,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan	80 % 100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
352	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720.000,00	14.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
353	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
354	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	14.677.000,00	14.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677.000,00	14.677.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
355	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 Orang	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120.000,00	21.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
356	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	258 Orang	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480.000,00	15.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
357	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
358	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
359	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	80.980.000,00	80.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.980.000,00	80.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
360	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27 Dokumen	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
361	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
362	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
363	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	176 Orang	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
364	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	31.370.000,00	34.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370.000,00	34.010.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
365	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	149.629.000,00	149.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.629.000,00	149.629.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
366	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
367	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
368	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
369	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
370	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	27.520.000,00	27.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520.000,00	27.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
371	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
372	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS MARGA 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
373	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.175.981.859,00	1.797.439.893,00	118.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.981.859,00	1.997.439.893,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
374	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293 Orang	135.840.000,00	135.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.840.000,00	135.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
375	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
376	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2265 Orang	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360.000,00	36.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
377	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
378	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
379	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	177.554.000,00	177.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.554.000,00	177.554.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
380	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
381	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
382	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120.000,00	33.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
383	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4259 Orang	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
384	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
385	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	152.886.000,00	152.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.886.000,00	152.886.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
386	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
387	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	105 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
388	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
389	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	50.430.000,00	50.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.430.000,00	50.430.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
390	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	897.000,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00	897.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
391	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
392	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
393	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
394	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.173.000,00	8.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173.000,00	8.173.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS MARGA 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
395	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	973.180.342,00	1.212.144.436,00	30.000.000,00	164.192.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.180.342,00	1.376.336.924,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan	80 % 100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
396	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	183 Orang	19.488.000,00	19.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488.000,00	19.488.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
397	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
398	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2236 Orang	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
399	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47 Orang	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
400	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	103 Orang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
401	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	151.107.000,00	151.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.107.000,00	151.107.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
402	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
403	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	18.120.000,00	18.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120.000,00	18.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
404	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	28.620.000,00	28.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620.000,00	28.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
405	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	102 Orang	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
406	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	38.898.000,00	38.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.898.000,00	38.898.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
407	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	91.960.000,00	91.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960.000,00	91.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
408	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
409	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	131 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
410	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
411	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9.457.000,00	9.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457.000,00	9.457.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
412	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
413	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
414	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
415	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya Persentase Desa Siaga Madya	36 % 36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
416	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.605.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605.000,00	9.605.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS PENEBEL 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
417	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5% Unit Kerja	1.907.684.726,00	2.455.827.745,00	262.500.000,00	293.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.184.726,00	2.748.827.745,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 % 80 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
418	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	96.987.000,00	96.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.987.000,00	96.987.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
419	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
420	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2729 Orang	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
421	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	48.960.000,00	48.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960.000,00	48.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
422	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	186 Orang	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720.000,00	24.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
423	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	468 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
424	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	224.336.000,00	224.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.336.000,00	224.336.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
425	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
426	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
427	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
428	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	113 Orang	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
429	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	88.420.000,00	88.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.420.000,00	88.420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
430	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	166.035.000,00	166.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.035.000,00	166.035.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
431	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
432	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
433	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
434	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	33.120.000,00	33.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120.000,00	33.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
435	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
436	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560.000,00	16.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
437	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680.000,00	31.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
438	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan undefined	70 % undefined undefined											
439	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS PENEBEL 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
440	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	882.873.518,00	1.391.497.419,00	58.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.873.518,00	1.545.497.419,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 % 80 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
441	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	183 Orang	90.767.000,00	90.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.767.000,00	90.767.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
442	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
443	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1360 Orang	39.120.000,00	39.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120.000,00	39.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
444	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
445	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	67 Orang	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
446	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	218 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
447	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	122.880.000,00	122.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.880.000,00	122.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
448	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
449	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310.000,00	11.310.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
450	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	45.420.000,00	45.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.420.000,00	45.420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
451	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	113 Orang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
452	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	105.300.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300.000,00	92.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
453	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	155.039.000,00	155.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.039.000,00	155.039.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
454	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
455	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
456	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
457	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	17.916.000,00	17.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916.000,00	17.916.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
458	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
459	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
460	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
461	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya Persentase Desa Siaga Madya	36 % 36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
462	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS PUPUAN 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
463	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.635.948.871,00	1.913.366.221,00	95.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.948.871,00	2.088.366.221,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78,75 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
464	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
465	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
466	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2778 Orang	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00	53.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
467	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
468	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	124 Orang	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
469	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	105.216.000,00	105.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.216.000,00	105.216.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
470	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
471	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
472	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	65.580.000,00	65.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.580.000,00	65.580.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
473	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
474	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
475	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	158.393.000,00	158.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.393.000,00	158.393.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
476	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
477	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
478	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
479	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	31.067.000,00	31.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.067.000,00	31.067.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
480	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
481	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
482	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	30 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	65 %											
483	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		PUSKESMAS PUPUAN 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
484	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	925.499.680,00	1.174.533.723,00	102.833.298,00	175.505.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.332.978,00	1.350.038.762,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78,75 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
485	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	193 Orang	80.040.000,00	80.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.040.000,00	80.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
486	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
487	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1670 Orang	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680.000,00	19.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
488	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	57 Orang	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640.000,00	17.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
489	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	88 Orang	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
490	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	181.758.000,00	181.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.758.000,00	181.758.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
491	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
492	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840.000,00	12.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
493	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	25.980.000,00	25.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980.000,00	25.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
494	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
495	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	68.280.000,00	68.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.280.000,00	68.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
496	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	142.092.000,00	142.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.092.000,00	142.092.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
497	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
498	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
499	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
500	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480.000,00	39.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
501	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
502	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
503	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
504	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	30 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	65 %											
505	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	14.253.000,00	14.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253.000,00	14.253.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS SELEMADEG													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
506	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.670.989.303,00	1.971.735.999,00	100.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.989.303,00	2.093.735.999,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 % 80 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
507	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400.000,00	140.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
508	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	349 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
509	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2076 Orang	39.120.000,00	39.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120.000,00	39.120.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
510	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang	65.520.000,00	65.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520.000,00	65.520.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
511	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	77 Orang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
512	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	451 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
513	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	300.855.000,00	300.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.855.000,00	300.855.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
514	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
515	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
516	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	67.320.000,00	67.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.320.000,00	67.320.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
517	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4378 Orang	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.920.000,00	37.920.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
518	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	119.950.000,00	119.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.950.000,00	119.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
519	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	192.953.000,00	192.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.953.000,00	192.953.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
520	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
521	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
522	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
523	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760.000,00	32.760.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
524	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
525	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
526	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	35.760.000,00	35.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760.000,00	35.760.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya Persentase Desa Siaga Madya	36 % 36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
527	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	17.635.000,00	17.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635.000,00	17.635.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		PUSKESMAS SELEMADEG BARAT													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan pembiayaan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
528	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.326.458.932,00	1.818.640.495,00	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.458.932,00	1.968.640.495,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Layanan Kesehatan yang mampu dilayani Secara Prima	100 %											
529	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231 Orang	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
530	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
531	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1725 Orang	72.540.000,00	72.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540.000,00	72.540.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
532	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160.000,00	20.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
533	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	77 Orang	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
534	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	304 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
535	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	358.698.000,00	358.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.698.000,00	358.698.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
536	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
537	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560.000,00	25.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
538	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	69.199.000,00	69.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.199.000,00	69.199.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
539	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	110 Orang	26.280.000,00	26.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280.000,00	26.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
540	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	95.904.000,00	95.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.904.000,00	95.904.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
541	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	182.440.000,00	182.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.440.000,00	182.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
542	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
543	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
544	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
545	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	23.015.600,00	23.015.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.015.600,00	23.015.600,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
546	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	5.990.400,00	5.990.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990.400,00	5.990.400,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
547	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520.000,00	47.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jenis Layanan Kesehatan yang mampu dilayani Secara Prima	100 %											
548	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Layanan Kesehatan yang mampu dilayani Secara Prima	100 %											
549	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	100 %											
550	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.339.000,00	9.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339.000,00	9.339.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi PD (diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pembiayaan operasional fasilitas pelayanan kesehatan pada faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
551	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	867.598.484,00	957.271.976,00	108.400.000,00	238.157.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.998.484,00	1.195.429.651,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat	80 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
552	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	197 Orang	24.360.000,00	24.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360.000,00	24.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
553	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
554	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	628 Orang	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.000,00	13.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
555	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
556	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	82 Orang	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
557	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	131.783.000,00	131.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.783.000,00	131.783.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
558	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
559	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480.000,00	15.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
560	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan	12 Dokumen	36.403.000,00	36.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.403.000,00	36.403.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
561	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	56 Orang	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
562	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	33.462.000,00	33.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462.000,00	33.462.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
563	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	126.330.000,00	126.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.330.000,00	126.330.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
564	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
565	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
566	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
567	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	9.108.000,00	9.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108.000,00	9.108.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
568	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
569	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
570	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penyelenggaraan sisitem informasi kesehatan secara terintegrasi di layani secara prima	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
571	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
572	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.505.000,00	6.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.000,00	6.505.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
573	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	451.969.221,00	558.000.000,00	0,00	50.478.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.969.221,00	608.478.332,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
574	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64 Orang	49.152.000,00	49.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.152.000,00	49.152.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
575	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
576	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
577	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
578	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 Orang	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
579	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	64 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
580	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	45.290.000,00	45.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.290.000,00	45.290.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
581	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
582	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
583	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
584	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	17 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
585	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400.000,00	58.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
586	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	111.768.000,00	111.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.768.000,00	111.768.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
587	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pajak Rokok
588	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pajak Rokok
589	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pajak Rokok
590	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6.312.000,00	6.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312.000,00	6.312.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
591	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
592	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
593	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
594	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
595	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS TABANAN 1													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
596	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.051.449.183,00	1.640.265.080,00	42.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.449.183,00	1.720.265.080,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
597	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	367 Orang	24.360.000,00	24.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360.000,00	24.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
598	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
599	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4192 Orang	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.560.000,00	58.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
600	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
601	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	253 Orang	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
602	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	560 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
603	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	121.770.000,00	121.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.770.000,00	121.770.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
604	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
605	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
606	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
607	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang	30.480.000,00	30.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480.000,00	30.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
608	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	91.960.000,00	91.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960.000,00	91.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
609	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	153.178.000,00	153.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.178.000,00	153.178.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
610	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
611	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
612	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	253 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
613	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
614	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320.000,00	22.320.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
615	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
616	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
617	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
618	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	70 %											
619	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055.000,00	8.055.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS TABANAN 2													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
620	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	897.616.043,00	1.484.390.620,00	30.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.616.043,00	1.634.390.620,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78,75 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
621	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	262 Orang	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160.000,00	20.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
622	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
623	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1256 Orang	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
624	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
625	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	113 Orang	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
626	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	316 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
627	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	146.379.000,00	146.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.379.000,00	146.379.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
628	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	85 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
629	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
630	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.280.000,00	53.280.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
631	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	85 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
632	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	79.420.000,00	61.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.420.000,00	61.660.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
633	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	105.471.000,00	105.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.471.000,00	105.471.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
634	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	11.010.000,00	11.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
635	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
636	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
637	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
638	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
639	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
640	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	100 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
641	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
642	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
643	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Dokumen	7.111.000,00	7.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00	7.111.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		PUSKESMAS TABANAN 3													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	100 %											
644	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.488.588.664,00	2.479.220.946,00	165.398.741,00	339.852.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.987.405,00	2.819.073.704,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
645	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang	7.968.000,00	7.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
646	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7451 Orang	33.959.000,00	33.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.959.000,00	33.959.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
647	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	59 Orang	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
648	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	227 Orang	20.040.000,00	20.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040.000,00	20.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
649	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
650	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	80.355.000,00	80.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.355.000,00	80.355.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
651	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
652	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
653	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360.000,00	33.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
654	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	123 Orang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
655	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	68.305.000,00	32.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.305.000,00	32.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
656	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	135.040.000,00	135.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.040.000,00	135.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
657	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
658	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
659	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
660	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
661	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760.000,00	29.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
662	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
663	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
664	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	0,00	35.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.545.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %											
665	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	100 %											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	100 %											
666	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00	5.016.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi RSUD Tabanan-Hasil LKjIP	5 % 100 %											
667	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	140.366.675.700,00	140.506.675.700,00	13.133.324.300,00	3.493.324.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500.000.000,00	144.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Capaian Indikator SPM dibagi Jumlah Target SPM dikali 100% - Jumlah Capaian Indikator Mutu Pelayanan dibagi Jumlah Target Indikator Mutu Pelayanan dikali 100% Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan	80 % 39,1 % 100 %											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan Jumlah Alat Kesehatan Diadakan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Paket 13 Paket 100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
668	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	15.530.000.000,00	15.530.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530.000.000,00	15.530.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
669	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	69 Unit	0,00	0,00	13.362.728.762,00	13.362.728.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362.728.762,00	13.362.728.762,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Diskes Tabanan)	100 %											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Faskes BLUD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsinya	5 %											
670	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	41.850.000.000,00	42.307.861.000,00	3.150.000.000,00	2.692.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 % 80 %											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %											
671	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	535 Unit	0,00	0,00	14.954.791.238,00	14.954.791.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954.791.238,00	14.954.791.238,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100 %											
672	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	3.405.098.800,00	2.541.494.300,00	1.594.901.200,00	2.458.505.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPUPRPKP Tabanan)	100 %											
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen											
673	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.500.000,00	3.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.900.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
674	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.750.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.460.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
675	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1610 Orang/bulan	18.922.310.400,00	13.422.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922.310.400,00	13.422.310.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
676	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	55.000.000,00	49.356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	49.356.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
677	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	4.358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.358.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
678	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.500.000,00	6.744.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.744.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
679	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	4.443.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.443.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
680	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	95.000.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	85.500.000,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Pendapatan Bagi Hasil
681	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.500.000,00	11.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	11.062.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
682	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	15.000.000,00	13.305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.305.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
683	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	9.600.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
684	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	4.428.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.428.300,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
685	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar													
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
687	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	168.089.600,00	168.089.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.089.600,00	168.089.600,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Pendapatan Bagi Hasil
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
688	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
689	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000,00	270.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	300.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
690	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.306.446.000,00	1.306.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.446.000,00	1.306.446.000,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Pendapatan Bagi Hasil
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
691	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	71.887.000,00	86.498.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.887.000,00	86.498.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
692	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	350.000.000,00	270.530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	270.530.800,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
693	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	149.700.000,00	132.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700.000,00	132.450.000,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Pendapatan Bagi Hasil
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Jaringan Irigasi	70 %											
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah irigasi yang terdata dan direncanakan di aplikasi e-PAKSI (dokumen PAI dan DED) di Kabupaten Tabanan	65 Persen											
694	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	479.310.000,00	267.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.310.000,00	267.869.000,00	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Irigasi yang terpelihara	100 %											
695	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
696	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	9 KM	3.020.000.000,00	4.382.133.600,00	11.392.443.000,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412.443.000,00	9.582.133.600,00	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
697	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	26 KM	2.000.000.000,00	1.900.447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.900.447.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Air Minum Kabupaten	97 %											
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	91 %											
698	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	12 Orang	50.000.000,00	38.378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	38.378.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
699	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
700	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	2.000.000.000,00	2.337.670.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.337.670.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
701	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik	3.950.000.000,00	1.712.837.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000.000,00	1.712.837.600,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
702	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
703	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5 SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Layanan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	92 %											
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 Kawasan											
704	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS													
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
705	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan limbah sesuai standar	97 %											
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	85,36 %											
706	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
707	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	15 Orang	200.000.000,00	194.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	194.589.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase genangan yang dapat ditangani	96 %											
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	96 %											
708	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	5.000.000,00	4.319.400,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.319.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
709	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	7.500.000,00	2.680.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000.000,00	407.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
710	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.113.546.800,00	1.074.093.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.546.800,00	1.074.093.300,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-											
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	94 %											
711	1.03.07.2.01.0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	4 UNIT	50.000.000,00	5.752.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	44.252.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100 %											
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang berijin dan laik fungsi	98 %											
712	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	8 Bangunan Gedung	840.000.000,00	982.215.900,00	44.307.500.000,00	55.211.292.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.147.500.000,00	56.193.508.569,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
713	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	25 Dokumen	250.000.000,00	223.805.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	223.805.700,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	85 %											
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang terselenggara	80 %											
714	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	241 Kawasan	57.372.000.000,00	74.611.842.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.372.000.000,00	74.611.842.128,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan berkategori mantap	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten yang tertangani	100 %											
715	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan													
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
716	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
717	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	80 KM	3.300.000.000,00	21.346.930.500,00	52.958.250.000,00	70.907.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.258.250.000,00	92.254.430.500,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen PKB Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen PKB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
718	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	24 KM	4.500.000.000,00	6.060.685.200,00	5.650.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000.000,00	18.360.685.200,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Opsen PKB Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha
719	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	4 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	50 KM	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
721	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	1.715.000.000,00	1.911.242.000,00	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.396.242.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen PKB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
722	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	25 KM	2.106.201.000,00	2.085.879.400,00	1.643.799.000,00	1.643.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000.000,00	3.729.678.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB Opsen PKB
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi bersertifikat	40 %											
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil yang memperoleh pelatihan	40 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
723	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	25 Orang	37.754.500,00	37.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.754.500,00	37.754.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
724	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	24.740.000,00	22.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740.000,00	22.253.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Bagi Hasil
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25 Persen											
725	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	25 Lembaga	30.500.000,00	27.276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	27.276.700,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang	75 %											
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang memiliki legalitas tata ruang	2 Dokumen											
726	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
727	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	300.000.000,00	360.225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.225.200,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Bagi Hasil
728	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang													
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	3 Dokumen											
729	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar													
			Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	125.000.000,00	121.206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	121.206.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
730	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	186.310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	186.310.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	1 Dokumen											
731	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang													
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
732	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	60.000.000,00	133.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	133.405.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	2 Dokumen											
733	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	53.000.000,00	49.450.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	49.450.700,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
734	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang													
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	95 %											
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
735	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani													
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	27 Dokumen	25.000.000,00	22.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.373.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
736	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	36 Dokumen	25.000.000,00	22.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.373.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %											
737	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang	25.000.000,00	23.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.016.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
738	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator													
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	25 Orang	50.000.000,00	37.061.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	37.061.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana yang tertangani	95 %											
739	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	300.000.000,00	296.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	296.110.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
740	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	410.000.000,00	408.986.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00	408.986.900,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
741	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman di wilayah Kumuh	95 %											
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	20 Persen											
742	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	25.000.000,00	20.429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	20.429.700,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
743	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	50.000.000,00	35.729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	35.729.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	100 %											
744	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	195.200.000,00	194.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200.000,00	194.617.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	95 %											
745	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	24 Unit Rumah	1.100.000.000,00	1.093.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	1.093.533.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang telah diserahkan	80 %											
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan yang terselenggara	80 %											
746	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	50.000.000,00	49.842.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.842.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
747	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	10.000.000,00	8.999.600,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	208.999.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
748	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang													
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	24 Laporan	76.300.000,00	60.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300.000,00	60.837.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pendapatan Bagi Hasil
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah	100 Persen											
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah	1 Dokumen											
749	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000,00	5.096.329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	5.096.329.100,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Pendapatan Bagi Hasil
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Satpol PP Tabanan)	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
750	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.821.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
751	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.907.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.907.700,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
752	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/bulan	16.812.828.000,00	13.812.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812.828.000,00	13.812.828.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
753	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.000.000,00	2.405.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.405.300,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
754	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	999.900,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.900,00	900.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
755	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	999.900,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.900,00	900.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
756	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	4.496.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.496.300,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
757	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
758	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	71.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	71.910.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
759	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.845.000,00	17.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.845.000,00	17.845.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
760	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.700.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
761	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.997.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
762	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.974.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974.000,00	7.500.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
763	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.500.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
764	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
765	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	88 Unit	0,00	0,00	364.933.000,00	364.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.933.000,00	364.933.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
766	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	99.780.100,00	99.631.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.780.100,00	99.631.900,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
767	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
768	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	50.873.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	50.873.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
769	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000.000,00	4.940.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	4.940.600.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
770	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	119.999.700,00	119.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999.700,00	119.999.700,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
771	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980.000,00	14.980.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keindahan	100 %											
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1700 Pelanggar											
772	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.304.000,00	41.028.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.304.000,00	41.028.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Reklame
773	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	40.204.000,00	37.948.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.204.000,00	37.948.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Reklame
774	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 Orang	114.288.000,00	92.025.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.288.000,00	92.025.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Reklame

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
775	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	20.000.000,00	18.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.023.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Reklame
776	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 laporan	125.000.000,00	153.612.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	153.612.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Reklame
777	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	20.000.000,00	18.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.023.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Reklame
778	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	61 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Menurunnya kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	105 Kasus											
779	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	20.000.000,00	19.235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.235.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Reklame
780	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	94.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	94.009.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Optimalnya penyidikan dan penyelidikan terhadap Pelanggar Perda/perkada	5 Orang											
781	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS													
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	10.000.000,00	5.736.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.736.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
782	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	20.000.000,00	8.049.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	8.049.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase tingkat penyelesaian penanggulangan kebakaran	100 %											
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	10 Kecamatan											
783	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	75.000.000,00	71.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	71.379.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
784	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	175.000.000,00	170.966.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	170.966.600,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
785	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	25.000.000,00	23.309.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.309.100,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
786	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	199.999.900,00	199.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.900,00	199.781.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil (DBH)
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi BPBD	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yg Disusun	3 Dokumen											
787	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Dokumen	2.999.000,00	2.644.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.000,00	2.644.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
788	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan Laporan	2.500.000,00	2.116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.116.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesentase Terpenuhi nya Admiistrasi Keuangan BPBD	100 %											
789	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	4.169.158.000,00	4.169.206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.158.000,00	4.169.206.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
790	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan Laporan	2.499.400,00	2.231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.400,00	2.231.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum BPBD	100 %											
791	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	2.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.400,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
792	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket Paket	1.997.500,00	1.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.500,00	1.997.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
793	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	27.000.000,00	20.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	20.251.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
794	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket Paket	4.500.000,00	3.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.880.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
795	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket Paket	10.000.000,00	8.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
796	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan Laporan	12.974.000,00	6.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.974.000,00	6.868.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
797	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen Dokumen	4.998.800,00	4.684.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.800,00	4.684.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase Terpenuhi nya Pengadaan BMD Pada BPBD	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
798	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pajak Hotel
799	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit Unit	0,00	0,00	258.323.800,00	258.323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.323.800,00	258.323.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %											
800	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 laporan Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
801	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan Laporan	31.997.000,00	51.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.997.000,00	51.197.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
802	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	1.122.397.600,00	1.122.397.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.397.600,00	1.122.397.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya BMD yang Menunjang Urusan Kantor	100 %											
803	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit Unit	76.757.000,00	92.755.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.757.000,00	92.755.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
804	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit Unit	16.597.300,00	55.851.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597.300,00	55.851.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100 %											
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan											
805	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60 Orang Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Wilayah yang Memenuhi Stansar Kesiapsiagaan Bencana	100 %											
806	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 orang Orang	20.000.000,00	19.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.478.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
807	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana													
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 desa Kawasan	25.000.000,00	23.731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.731.300,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
808	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
809	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang Kawasan	25.000.000,00	23.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.994.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %											
810	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 dokumen Dokumen	349.212.400,00	349.212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.212.400,00	349.212.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana yg Terdata	1 Dokumen											
811	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 dokumen Kegiatan	20.000.000,00	25.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.805.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %											
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersedia	3 Dokumen											
812	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.775.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
813	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.848.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Tersedia	100 %											
814	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	6.038.331.000,00	5.738.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038.331.000,00	5.738.331.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Kantor yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
815	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.999.700,00	2.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.700,00	2.999.700,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
816	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.400.000,00	58.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400.000,00	58.227.500,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
817	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.850.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
818	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	19.976.000,00	6.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976.000,00	6.868.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
819	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	4.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.862.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Diadakan Sesuai Kebutuhan	100 %											
820	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	49.981.400,00	49.981.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.981.400,00	49.981.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor yang tersedia	100 %											
821	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
822	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
823	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	419.997.600,00	419.955.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.997.600,00	419.955.400,00	Pajak Daerah Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %											
824	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	49.991.600,00	49.991.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.991.600,00	49.991.600,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
825	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
826	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pajak Daerah
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS	70 %											
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	70 %											
827	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20.000.000,00	18.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.568.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
828	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	175.000.000,00	174.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	174.229.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
829	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 Keluarga	25.000.000,00	23.481.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.481.200,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
830	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Lembaga	1.915.000.000,00	5.198.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000.000,00	5.198.514.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Panti Yang Tertangani	100 %											
831	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
832	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100.000.000,00	72.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	72.870.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	100 %											
833	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.000.000,00	36.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.090.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 %											
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data kemiskinan yang valid	100 %											
834	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	20000 Keluarga	30.000.000,00	27.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.230.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan sosial	100 %											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan sosial pada saat dan tanggap darurat bencana	100 %											
835	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	225.000.000,00	224.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	224.265.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase capaian indeks pemberdayaan gender (IDG)	78,14 %											
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pokja PUG aktif	1 buah											
836	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	19.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.219.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani	100 %											
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai SOP	100 %											
837	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penanganan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	1 buah											
838	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	233.168.400,00	217.568.400,00	2.968.067.600,00	2.968.067.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.236.000,00	3.185.636.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif	1 buah											
839	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	69.020.000,00	66.023.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.020.000,00	66.023.500,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan dan desa layak anak	50 %											
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak daerah aktif	31 buah											
840	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	25.000.000,00	22.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.599.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase gugus tugas KLA aktif	100 %											
841	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	22.178.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	22.178.900,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani	100 %											
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah mas	100 Orang											
842	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	70.749.200,00	70.269.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.749.200,00	70.269.200,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tertangani	100 %											
843	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan	165.070.000,00	165.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.070.000,00	165.070.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat penguatan	100 %											
844	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang	69.020.000,00	34.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.020.000,00	34.510.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
		DINAS KETAHANAN PANGAN													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %											
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	3 Dokumen											
845	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.874.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
846	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
847	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.413.113.000,00	3.413.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.113.000,00	3.413.113.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
848	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	2.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.353.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum	100 %											
849	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.999.500,00	1.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.500,00	1.999.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
850	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.998.500,00	1.998.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.500,00	1.998.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
851	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.998.500,00	19.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998.500,00	19.809.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
852	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
854	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	29.948.000,00	14.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.948.000,00	14.824.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
855	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
856	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.888.500,00	0,00	28.111.500,00	28.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.111.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
857	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
858	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.998.600,00	19.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998.600,00	19.998.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
859	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000,00	161.433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	161.433.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
860	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	48.000.000,00	47.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	47.989.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
861	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	90 %											
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan dan penyaluran pangan	85 %											
862	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	34.999.900,00	27.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999.900,00	27.063.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
863	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia													
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	15.000.000,00	13.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
864	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota													
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000,00	18.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.631.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
865	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis													
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	15.000.000,00	14.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.108.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase lokasi rentan rawan pangan yang tertangani	95 %											
866	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal													
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	30.000.000,00	29.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
867	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Ton	100.000.000,00	99.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	99.952.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
868	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota													
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	6 Ton	15.000.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	27.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	95 %											
869	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	175.300.000,00	159.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.300.000,00	159.326.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %											
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen											
870	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.524.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
871	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.460.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
872	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/bulan	15.376.226.000,00	13.376.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376.226.000,00	13.376.226.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
873	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.810.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %											
874	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
875	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.911.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.000,00	7.000.000,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
876	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.149.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149.000,00	10.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
877	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	62.251.900,00	62.251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.251.900,00	62.251.900,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
878	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	49.500.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
879	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	18.303.000,00	16.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303.000,00	16.472.700,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
880	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	25.000.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	12.520.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
881	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	758.000,00	758.000,00	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pengadaaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
882	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar													
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
883	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
884	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	1.632.500,00	390.600,00	98.367.500,00	99.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	99.836.600,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %											
885	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
886	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	121.000.000,00	181.961.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	181.961.500,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
887	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.200.000.000,00	1.442.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.442.046.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
888	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	170.844.000,00	261.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.844.000,00	261.798.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
889	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
890	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
891	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Desa Proklim	12 %											
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	57.50 -											
892	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	350.000.000,00	334.241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	334.241.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
893	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	86.510.000,00	64.655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.510.000,00	64.655.200,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
894	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	50.000.000,00	49.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.010.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	15 %											
895	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	15.000.000,00	14.121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.121.600,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
896	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	100.000.000,00	78.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	78.926.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	11.28 %											
897	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	20.000.000,00	19.355.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.355.400,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
898	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1 Kegiatan	15.000.000,00	13.998.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.998.800,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ketersediaan RTH	100 %											
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Yang Terpelihara	12 Taman											
899	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25.35 Ha	1.499.550.000,00	2.084.440.800,00	608.150.000,00	1.750.426.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.700.000,00	3.834.867.500,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Air Tanah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Air Tanah
900	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
			Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	25.933.000,00	25.117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.933.000,00	25.117.900,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan Sampah Yang Terkelola	60 %											
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	18 Ton											
901	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	75.000.000,00	71.333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	71.333.300,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
902	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	6.015.893.700,00	4.698.950.300,00	12.589.106.300,00	13.757.767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.605.000.000,00	18.456.717.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
903	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	16 Ton	8.500.000.000,00	10.781.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000.000,00	10.781.439.500,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dang Fungsi PD	100 persen											
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 persen											
904	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.707.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
905	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.999.900,00	1.929.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	1.929.400,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen											
906	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.504.000.000,00	4.495.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.000.000,00	4.495.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
907	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mendukung tugas dan fungsi PD	100 persen											
908	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.192.400,00	2.192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.400,00	2.192.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
909	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.500,00	3.496.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
910	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.997.000,00	19.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997.000,00	19.997.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
911	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	30.650.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
912	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
913	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	49.954.100,00	49.954.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.954.100,00	49.954.100,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
914	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.436.000,00	14.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.436.000,00	14.290.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
915	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.984.500,00	4.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984.500,00	4.984.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen											
916	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	3.057.200,00	3.057.200,00	721.187.600,00	721.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.244.800,00	724.244.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
917	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
918	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	94.996.500,00	94.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.996.500,00	94.996.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
919	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	517.068.000,00	517.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.068.000,00	517.068.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen											
920	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
921	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	76.525.000,00	76.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.525.000,00	76.525.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	94 persen											
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	88 persen											
922	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	15000 Dokumen	399.711.700,00	708.896.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.711.700,00	708.896.700,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	61 persen											
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan	99 persen											
923	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2190 Dokumen	1.200.000.000,00	2.199.158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	2.199.158.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
924	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	300 Layanan	20.000.000,00	18.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.332.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penduduk yang Terlayani Administrasi Kependudukan	68 persen											
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya database kependudukan tingkat kabupaten	ada											
925	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5 Dokumen	60.199.800,00	48.258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.199.800,00	48.258.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola	100 persen											
926	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	116.443.300,00	113.443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.443.300,00	113.443.300,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPMD Tabanan)	100 %											
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Sakip	2 Dokumen											
927	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.831.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
928	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.878.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.878.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
929	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.713.113.000,00	6.045.045.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713.113.000,00	6.045.045.769,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
930	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.358.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
931	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.982.200,00	1.982.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.200,00	1.982.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.500,00	1.499.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
933	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.497.600,00	27.495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497.600,00	27.495.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
935	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
936	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	19.996.000,00	9.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996.000,00	9.758.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
937	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
938	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	48.571.000,00	48.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.571.000,00	48.571.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
939	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
940	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.998.100,00	14.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998.100,00	14.998.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
941	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.195.623.500,00	3.324.089.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.623.500,00	3.324.089.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
942	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	49.988.400,00	49.988.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.988.400,00	49.988.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
943	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa tertib hukum	22 %											
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terselenggaranya Penataan Desa	22 %											
944	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa													
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	94 Desa	10.000.000,00	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
945	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa													
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	27 Desa	10.000.000,00	9.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.484.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
946	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa													
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	133 Desa	10.000.000,00	9.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	100 %											
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	100 %											
947	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.000.000.000,00	699.729.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	699.729.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
948	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	133 Dokumen	5.000.000,00	14.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	14.528.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
949	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	133 Dokumen	40.000.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	34.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
950	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	133 Laporan	10.000.000,00	8.880.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.880.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
951	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	82.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	82.515.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
952	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	14.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	14.528.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
953	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	133 Dokumen	31.500.000,00	21.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	21.021.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
954	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	10 Laporan	5.000.000,00	4.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.528.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
955	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	175.000.000,00	153.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	153.127.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Strata Kelompok-kelompok Lembaga kemasyarakatan Desa	100 %											
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Memiliki Lembaga Kemasyarakatan	133 Desa											
956	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	125.000.000,00	239.944.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	239.944.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
957	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	19.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	19.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
958	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	50.000.000,00	39.051.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	39.051.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
959	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
960	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	4.999.900,00	19.531.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.900,00	19.531.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
961	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	1.963.513.000,00	2.036.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.513.000,00	2.036.692.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PD	100 persen											
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP silahkan ubah	75 persen 1 Laporan											
962	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	4.306.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.306.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
963	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	3.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.387.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	75 persen											
964	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	4.556.019.000,00	3.556.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556.019.000,00	3.556.019.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
965	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	3.832.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.832.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	75 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
966	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.498.600,00	7.498.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498.600,00	7.498.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
967	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.499.400,00	4.998.800,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.400,00	28.998.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
968	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00	29.859.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	29.859.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
969	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.995.500,00	2.995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.500,00	2.995.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
970	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
971	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	20.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	20.474.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
972	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.095.000,00	45.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.095.000,00	45.541.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
973	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKJIP	75 persen											
974	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	99.469.800,00	175.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.469.800,00	175.855.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP	75 persen											
975	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
976	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.492.000,00	25.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.492.000,00	25.361.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
977	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	417.597.500,00	313.170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.597.500,00	313.170.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP	75 persen											
978	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	187.992.000,00	183.904.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.992.000,00	183.904.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
979	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	19.890.000,00	19.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890.000,00	19.890.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	82 %											
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
980	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen											
981	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
982	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA	75 persen											
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	83 %											
983	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
984	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	486.842.000,00	486.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.842.000,00	486.842.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
985	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	199.989.000,00	199.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.989.000,00	199.989.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
986	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
987	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	105.000.000,00	103.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	103.668.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
988	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB/PLKB yang mendapat penguatan KKBPK	83 %											
989	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1330 Orang	1.159.914.000,00	1.159.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.914.000,00	1.159.914.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PUS Miskin terlayani KB	2005 PUS											
990	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	63.892.000,00	63.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.892.000,00	63.892.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
991	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2718 Orang	339.171.000,00	339.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.171.000,00	339.171.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
992	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	30.000.000,00	29.310.000,00	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000.000,00	1.634.310.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
993	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	45.195.000,00	45.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.195.000,00	45.195.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
994	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	30.223.500,00	28.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.223.500,00	28.257.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB	83 %											
995	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	15.000.000,00	14.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.496.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
996	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kampung	152.000.000,00	149.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	149.561.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE KEUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA	85 persen											
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKA)	1 laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
997	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	45.000.000,00	41.151.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	41.151.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
998	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	30 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
999	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	85.000.000,00	80.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	80.028.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan											
1000	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	92.548.000,00	73.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.548.000,00	73.664.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1001	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
1002	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
		DINAS PERHUBUNGAN													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	2 Dokumen											
1003	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	2.846.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.846.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1004	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.903.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1005	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	9.988.302.000,00	9.130.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.302.000,00	9.130.142.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1006	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.356.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen											
1007	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	1.850.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.850.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	12 Dokumen											
1008	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	3.000.000,00	2.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.799.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1009	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.997.600,00	6.527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.600,00	6.527.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1010	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.000,00	2.754.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1011	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00	69.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	69.496.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1012	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1013	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	28.857.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.857.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1014	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	50.490.000,00	25.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.490.000,00	25.166.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1015	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	4.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.493.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1016	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1017	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
1018	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	49.997.400,00	49.997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.997.400,00	49.997.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1019	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1020	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	137.295.800,00	137.295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.295.800,00	137.295.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1021	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.049.996.400,00	6.049.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.996.400,00	6.049.996.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
1022	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	344.610.300,00	408.603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.610.300,00	408.603.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1023	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1024	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten tabanan	5 %											
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapi Dengan Fasilitas Keselamatan Yang Memadai	60 %											
1025	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 Unit	2.071.169.900,00	2.081.016.600,00	235.220.100,00	235.220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.390.000,00	2.316.236.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1026	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000 Unit	14.873.091.900,00	14.838.091.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873.091.900,00	14.838.091.600,00	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Di Kabupaten Tabanan Dalam Kondisi Baik	2 Terminal											
1027	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C													
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1028	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)													
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Parkir Di Kabupaten Tabanan Yang Terkelola	30 Ruang Parkir											
1029	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	451.736.500,00	468.963.600,00	48.263.500,00	86.874.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	555.837.900,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Laik Jalan	99 %											
1030	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1031	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000 Dokumen	238.813.600,00	222.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.813.600,00	222.930.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
1032	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8 Unit	85.000.000,00	84.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	84.866.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Tabanan	2 Kasus Kecelakaan											
1033	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	500.000.000,00	922.094.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	922.094.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1034	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	19.119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.119.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1035	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	9.027.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.027.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1036	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	50.000.000,00	45.869.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	45.869.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaksanaan Andalalin	1 Dokumen											
1037	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin													
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan	20.000.000,00	18.049.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.049.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Awak Angkutan Umum Yang Terbina	25 %											
1038	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	55.000.000,00	46.665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	46.665.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Terlayani Angkutan Umum	100 %											
1039	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	10.000.000.000,00	9.959.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	9.959.602.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP tersedia	3 dokumen											
1040	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1041	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1042	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	6.324.151.000,00	6.324.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324.151.000,00	6.324.151.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1043	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1044	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1045	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1046	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	14.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	14.762.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1047	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	4.501.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.501.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	11.998.400,00	11.998.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998.400,00	11.998.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1049	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.480.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480.000,00	14.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1050	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1051	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	920.100,00	920.600,00	7.549.079.900,00	7.549.068.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000.000,00	7.549.989.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1052	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1053	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1054	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	199.999.200,00	199.998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.200,00	199.998.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1055	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	49.988.400,00	75.345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.988.400,00	75.345.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1056	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	89.960.000,00	104.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.960.000,00	104.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1057	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	90 %											
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Pameran Pembangunan, Media Online, Media Cetak, Media Elektronik dan Kelompok Masyarakat	80 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1058	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	40 Komunitas	405.000.000,00	220.916.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00	220.916.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1059	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Permohonan	450.000.000,00	397.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	397.569.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1060	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	50 Rekomendasi	1.025.000.000,00	2.293.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000.000,00	2.293.436.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi	90 %											
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Internal dan layanan publik Kabupaten Tabanan yang berbasis elektronik	100 %											
1061	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1.240.000.000,00	1.502.599.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000.000,00	1.502.599.101,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan TIK yang diterapkan dengan baik	100 %											
1062	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional													
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	40 Aplikasi	45.000.000,00	20.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	20.987.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1063	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE													
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	50.000.000,00	28.804.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	28.804.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1064	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	40.000.000,00	19.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	19.528.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1065	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	521 Perangkat Daerah	6.654.170.800,00	6.340.718.699,00	195.829.200,00	195.829.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000.000,00	6.536.547.899,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1066	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	50.000.000,00	29.898.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	29.898.200,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	85 %											
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunya Dokumen Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabanan	85 %											
1067	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral													
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	50.000.000,00	26.576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	26.576.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1068	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia													
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	50.000.000,00	26.605.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	26.605.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat diamankan melalui persandian dan sesuai dengan standar BSSN	20 %											
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dengan Sistem Informasi yang terlayani Keamanan Informasi sesuai Standar BSSN	40 %											
1069	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20 Perangkat Daerah	50.000.000,00	36.751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.751.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan terhadap jumlah pencari kerja terdaftar	100 %											
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja untuk Mendapat Pelatihan yang Berbasis Masyarakat dan Kompetensi	16 Orang											
1070	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	137.963.000,00	137.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.963.000,00	137.963.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Reklame DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Reklame
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 LPK											
1071	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	6.040.000,00	5.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00	5.499.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pajak Reklame
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang memasuki dunia kerja terhadap jumlah pencari kerja	75 %											
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan terhadap Jumlah Pencari Kerja	70 %											
1072	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja													
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	5 Orang	24.555.500,00	16.831.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.555.500,00	16.831.500,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Terpenuhinya Lowongan Kerja yang Ada	100 %											
1073	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	500 Orang	21.000.000,00	14.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	14.832.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-											
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1074	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6650 Orang	0,00	446.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %											
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia	3 Dokumen											
1075	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.937.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1076	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1077	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	6.289.151.000,00	5.989.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289.151.000,00	5.989.151.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1078	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1079	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1080	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1081	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1082	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1083	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1084	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1085	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.884.000,00	12.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.000,00	12.314.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1086	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1087	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1088	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1089	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	29.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1090	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	304.999.900,00	304.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.999.900,00	304.999.900,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	100 %											
1091	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	55.467.200,00	55.467.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.467.200,00	55.467.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1092	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi berkualitas	5 %											
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas	5 %											
1093	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 Unit Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1094	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota													
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	200 Unit Usaha	482.000.000,00	781.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000.000,00	781.072.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berdaya saing	14 %											
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah UMKM yang Berdaya Saing	14 %											
1095	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	397 Unit Usaha	286.767.000,00	282.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.767.000,00	282.057.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1096	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2300 Unit Usaha	34.120.000,00	31.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.120.000,00	31.915.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DPMPTSP Tabanan)	100 %											
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SAKIP	3 Dokumen											
1097	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.874.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1098	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.916.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1099	2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	2 Dokumen											
1100	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	7.284.151.000,00	6.284.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284.151.000,00	6.284.151.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Reklame Pajak Reklame

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1101	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.500.000,00	2.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.353.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1102	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.662.200,00	4.662.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.200,00	4.662.200,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1103	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.199.400,00	21.199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.199.400,00	21.199.400,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1104	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.987.000,00	69.434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987.000,00	69.434.500,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1105	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.054.000,00	3.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.000,00	3.054.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1106	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1107	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	8.942.000,00	8.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942.000,00	8.942.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1108	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	19.797.000,00	9.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797.000,00	9.863.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1109	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	4.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.685.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1110	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	421.618.000,00	374.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.618.000,00	374.304.100,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1111	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1112	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	260.300.000,00	260.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.300.000,00	260.300.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1113	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.293.098.800,00	1.293.098.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.098.800,00	1.293.098.800,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1114	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	54.992.800,00	54.992.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.992.800,00	54.992.800,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1115	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	61.690.000,00	105.523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.690.000,00	105.523.900,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1116	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah rencana investor berskala nasional (PMDN/PMA)	99,90 %											
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Masuk Pada Front Office Sampai Perijinan dan Non Perijinan Terbit Kurang lebih 10 Hari dan Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terbit	5500 Buah											
1117	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	193.828.300,00	158.896.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.828.300,00	158.896.300,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1118	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	7 Kegiatan Usaha	25.000.000,00	23.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.608.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Perkembangan Penanaman Modal dan Perijinan	48 Kali											
1119	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	43.222.000,00	25.674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.222.000,00	25.674.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1120	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	149 Pelaku Usaha	158.483.000,00	85.449.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483.000,00	85.449.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)
1121	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	9 Kegiatan Usaha	86.445.000,00	77.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.445.000,00	77.706.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		DINAS KEBUDAYAAN													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen											
1122	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1123	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
1124	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	6.933.703.000,00	6.425.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933.703.000,00	6.425.543.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1125	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	60.000.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1126	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1127	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen											
1128	2.22.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1129	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1130	2.22.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya Administrasi Umum perangkat daerah	90 %											
1131	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1132	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1133	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1134	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1135	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1136	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1137	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1138	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	18.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	18.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1139	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	18 Unit											
1140	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1141	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	49.920.000,00	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920.000,00	49.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1142	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1143	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1144	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1145	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	220.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1146	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	21 Unit											
1147	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	75.000.000,00	74.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	74.604.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1148	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1149	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1150	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1151	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat Yang Terjaga Kelestariannya	63,43 %											
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan Daerah yang dibina	25 Buah											
1152	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000.000,00	825.000.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1153	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	79 Orang	4.225.000.000,00	12.929.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.000.000,00	12.929.790.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jantra Tradisi Bali yang Dibina	7 Buah											
1154	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	50.000.000,00	48.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.074.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1155	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	5 Sertifikat	35.000.000,00	33.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	33.689.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	119 Buah											
1156	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat													
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	59 Objek	6.330.000.000,00	14.112.519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.000.000,00	14.112.519.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1157	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat													
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	40 Orang	75.000.000,00	68.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	68.212.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1158	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	20 Unit	30.000.000,00	27.421.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.421.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Terasional yang Dilestarikan	37 %											
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dibina	18 Buah											
1159	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	5 Orang	3.655.000.000,00	8.126.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.000.000,00	8.126.073.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1160	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	3 Sertifikat	220.000.000,00	210.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	210.211.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1161	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	3.450.000.000,00	3.762.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000.000,00	3.762.826.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Yang Diinventarisasi	2 %											
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dibina	1 Objek											
1162	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	375.000.000,00	352.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	352.959.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum Yang Edukatif	100 %											
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dibina	1 Buah											
1163	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu													
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	365.832.000,00	365.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.832.000,00	365.832.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
1164	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum													
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	801.295.000,00	801.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.295.000,00	801.295.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
1165	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	22.873.000,00	22.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.873.000,00	22.873.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
		TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-											
	2.22.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-											
1166	2.22.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari BLUD
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-											
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1167	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1.436.901.200,00	1.840.881.200,00	563.098.800,00	1.400.317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	3.241.198.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD	2 Dokumen											
1168	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.926.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1169	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.913.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1 WTP											
1170	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	5.866.113.000,00	5.366.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866.113.000,00	5.366.113.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1171	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	2.403.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.403.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	80 A											
1172	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1173	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.997.600,00	1.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.600,00	1.997.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1174	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.997.200,00	24.765.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997.200,00	24.765.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1175	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	1.982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.982.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1176	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1177	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	15.928.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.928.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1178	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.800.000,00	19.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	19.945.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1179	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	4.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.923.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKJIP	80 A											
1180	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	3.269.600,00	3.269.600,00	46.618.400,00	46.618.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.888.000,00	49.888.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP	80 A											
1181	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1182	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1183	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	339.978.400,00	339.978.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.978.400,00	339.978.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP	80 A											
1184	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	159.996.000,00	158.377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.996.000,00	158.377.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1185	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100.000,00	52.100.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Prima	100 %											
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang di kelola dengan baik	24 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1186	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	60.000.000,00	58.965.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	58.965.100,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1187	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Orang	10.000.000,00	8.992.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.992.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1188	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4344 Eksemplar	582.600,00	491.500,00	9.417.400,00	9.417.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.908.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1189	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Eksemplar	72.500.000,00	71.496.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	71.496.200,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1190	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	0,00	0,00	30.995.000,00	30.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995.000,00	30.946.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	8000 Orang											
1191	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang	80.000.000,00	68.784.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	68.784.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1192	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial													
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	7 Perpustakaan	486.883.000,00	485.350.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.883.000,00	485.350.900,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1193	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5.000.000,00	4.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.784.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1194	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	158.117.000,00	156.212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.117.000,00	156.212.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah, Swasta, BUMD dan Desa yang mengelola Arsip Sesuai NSPK	100 %											
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD, Desa BUMD, Swasta dan Ormas yang Dibina	41 PD											
1195	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis													
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	15 Berkas	20.000.000,00	45.313.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	45.313.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1196	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis													
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	20 Berkas	25.000.000,00	22.492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.492.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1197	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Laporan	35.000.000,00	31.189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	31.189.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen/Arsip Daerah yang di Selamatkan dan dilestarikan	30 %											
1198	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI													
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	30 Arsip	11.000.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	308.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1199	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip	25.000.000,00	22.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.495.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase Arsip yang Dapat Diselamatkan	100 %											
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip OPD yang di data dan dimusnahkan	10 OPD											
1200	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun													
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10 Berkas	25.000.000,00	22.489.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.489.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1201	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	15 Arsip	20.000.000,00	17.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Kakibat bencana yang dapat di selamatkan	40 %											
1202	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5 Arsip	20.000.000,00	17.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1203	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5 Arsip	20.000.000,00	18.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.012.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip yang dapat di Selamatkan Akibat Penggabungan dan Pemekaran	100 %											
1204	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Daftar	18.000.000,00	3.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	3.436.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS PERIKANAN													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Layanan Menunjang Tugas Pokok Dan Fungsi PD	100 %											
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Dihasilkan Setahun	4 Dokumen											
1205	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.532.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1206	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.800,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Diberikan	12 Bulan											
1207	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.134.151.000,00	5.134.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.151.000,00	5.134.151.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1208	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Perangkat Daerah Diberikan Setahun	4 Jenis											
1209	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.499.400,00	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.400,00	1.499.400,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1210	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.999.600,00	2.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.600,00	2.999.600,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1211	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.780.000,00	19.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780.000,00	19.780.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1212	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1213	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1214	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	34.760.000,00	17.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760.000,00	17.140.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1215	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis BMD Disediakan Menunjang Operasional Dinas	3 Jenis											
1216	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Kinerja Pelayanan Dinas	6 Jenis											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1217	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1218	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1219	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	539.998.600,00	539.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.998.600,00	539.998.600,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD Terpeliharaan Menunjang Operasional Dinas	1 Jenis											
1220	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	64.987.300,00	67.487.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.987.300,00	67.487.300,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1221	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	19.914.000,00	19.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914.000,00	19.802.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1222	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	698.000.000,00	698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000.000,00	698.000.000,00	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,5 %											
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum setahun	142,2 Ton											
1223	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1224	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit	310.000.000,00	501.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	501.672.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB Nelayan Terbina Produktif Setahun	82 KUB											
1225	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1 Kelompok	15.000.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1226	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 Unit Usaha	15.000.000,00	12.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.120.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,0 %											
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan Produktif Terbina	246 Kelompok											
1227	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	41 Kelompok	181.875.000,00	325.875.000,00	136.416.000,00	272.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.291.000,00	598.707.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1228	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil													
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	39 Kelompok	20.000.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kaji Terap Teknologi Produktif Dihasilkan Setahun	1 Jenis											
1229	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	125.000.000,00	165.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000.000,00	565.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1230	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00	127.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	1,3 %											
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah PoklahsarYang Dapat Difasilitasi Pendaftaran Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Setahun	1 Kelompok											
1231	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko													
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen	30.000.000,00	21.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	21.582.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklahsar Produktif Terbina	73 Kelompok											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1232	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko													
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	69 Unit Usaha	50.000.000,00	69.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	69.530.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Ikan Sebagai Bahan Baku Olahan Produk Bernilai Tambah Dimanfaatkan	9 Jenis											
1233	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21 Ton	1.011.000.000,00	987.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000.000,00	987.069.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS PARIWISATA													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran tugas dan Fungsi PD	100 %											
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen											
1234	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.999.400,00	2.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.400,00	2.999.400,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1235	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD	100 %											
1236	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.838.113.000,00	4.838.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838.113.000,00	4.838.113.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1237	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD	100 %											
1238	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.841.800,00	1.841.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.800,00	1.841.800,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1239	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1240	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1241	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1242	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1243	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1244	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	20.000.000,00	14.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	14.472.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1245	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit											
1246	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	49.270.600,00	49.270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.270.600,00	49.270.600,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Irusan Pemerintahan Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1247	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1248	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999.000,00	24.999.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1249	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	219.302.400,00	219.302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.302.400,00	219.302.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %											
1250	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	79.998.800,00	79.998.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.998.800,00	79.998.800,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1251	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW Yang Berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020	52 %											
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang terkelola	20 DTW											
1252	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	14.707.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	14.707.800,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Wisata yang berkembang	22 DESA WISATA											
1253	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	24 Lokasi	17.668.000,00	15.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668.000,00	15.268.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1254	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	90.000.000,00	78.731.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	78.731.900,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1255	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	20.000.000,00	15.947.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.947.800,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data usaha pariwisata	10 KECAMATAN											
1256	3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota													
			Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	6 Usaha Pariwisata	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1257	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota													
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	100 Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke DTW	60 %											
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event pariwisata	5 kali											
1258	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1259	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1260	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkualitas	60 %											
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah jenis pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3 Jenis											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1261	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	200.000.000,00	195.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	195.200.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1262	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI													
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	50.000.000,00	26.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	26.961.900,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
		DINAS PERTANIAN													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen											
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen											
1263	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Daerah
1264	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	130 Orang											
1265	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 Orang/bulan	22.426.226.000,00	17.626.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426.226.000,00	17.626.226.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1266	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen											
1267	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1268	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1269	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	69.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.559.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1270	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1271	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1272	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	55.217.400,00	55.217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.217.400,00	55.217.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1273	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	24.973.000,00	10.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.973.000,00	10.394.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1274	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen											
1275	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	95.836.000,00	93.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.836.000,00	93.976.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen											
1276	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1277	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1278	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.050.000.000,00	1.154.349.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	1.154.349.880,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen											
1279	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	89.988.000,00	89.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988.000,00	89.988.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1280	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	49.942.200,00	64.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.942.200,00	64.935.600,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1281	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian	10 %											
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian	65 %											
1282	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	2.650.000.000,00	125.806.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000.000,00	2.625.806.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1283	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	150.000.000,00	125.303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	125.303.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-											
1284	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1285	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	75.000.000,00	73.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	73.743.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1286	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman													
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	4 Varietas Unggul Baru (VUB)	50.000.000,00	49.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.655.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan benih/bibit	15 ekor											
1287	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	40 Ekor	502.500.000,00	991.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.500.000,00	991.330.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	10 persen											
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penggunaan Prasarana Pertanian	58 persen											
1288	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	286.000.000,00	457.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000.000,00	457.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1289	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan													
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	5 Unit	110.000.000,00	108.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	108.233.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
1290	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota													
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	137 unit											
1291	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian													
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1292	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	72 Unit	1.775.752.000,00	2.197.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.752.000,00	2.197.378.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1293	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1294	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1295	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1296	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	82 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
1297	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan													
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-											
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1298	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	10 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	140 dokumen											
1299	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan													
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	140 Laporan	40.000.000,00	36.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	36.535.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	60 persen											
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan Yang Berhasil Meningkatkan Kelas	39 %											
1300	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	100.000.000,00	92.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	92.203.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
1301	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	75.000.000,00	72.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	72.645.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
1302	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	20.000.000,00	19.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.793.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1303	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian													
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	39 Orang	0,00	222.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.300.000,00	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Disperindag Tabanan)	100 %											
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan											
1304	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.937.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1305	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100 %											
1306	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.185.000.000,00	5.385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.000.000,00	5.385.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1307	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.458.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 %											
1308	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1309	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.999.300,00	2.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.300,00	2.999.300,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1310	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	59.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.685.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1311	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1312	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1313	3.30.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32.442.500,00	31.190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.442.500,00	31.190.500,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1314	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29.920.000,00	14.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.920.000,00	14.873.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1315	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.800,00	4.999.800,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit											
1316	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	64.729.000,00	64.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.729.000,00	64.729.000,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan											
1317	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	1.999.900,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1318	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	59.999.700,00	82.097.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999.700,00	82.097.300,00	Pajak Reklame Pajak Reklame
1319	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	469.998.600,00	469.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.998.600,00	469.998.600,00	Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Hiburan Pajak Reklame
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1320	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	69.991.400,00	108.551.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.991.400,00	108.551.400,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
1321	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920.000,00	9.920.000,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
1322	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	249.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.960.000,00	349.860.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Yang Legal dan Representatif	100 %											
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terfasilitasi dan Terawasi	100 %											
1323	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	2.313.186.000,00	2.278.328.100,00	764.400.000,00	244.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077.586.000,00	2.522.348.100,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen											
1324	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	25.000.000,00	23.831.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.831.900,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang di Tera/Tera Ulang yang diawasi	20 %											
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15000 Unit											
1325	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15000 Unit	34.919.150,00	33.623.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.919.150,00	33.623.150,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
1326	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Orang	25.000.000,00	23.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.512.000,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang Mampu Difasilitasi Dalam Pemasaran	100 %											
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang mampu difasilitasi dalam pemasaran	4 UMKM											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1327	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	6 UMKM	300.000.000,00	549.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	549.519.000,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri Kreatif yang berkembang	96,3 %											
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
1328	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000,00	93.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	93.499.400,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
1329	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1.120.000.000,00	1.111.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00	1.111.731.000,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
1330	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	700.000.000,00	623.663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	623.663.700,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
1331	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri													
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	30.000.000,00	28.664.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.664.200,00	Pajak Hiburan Pajak Hiburan
		SEKRETARIAT DAERAH													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	2 Dokumen											
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJP dan Dokumen Renja Setda	2 Dokumen											
1332	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	20.000.000,00	13.586.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	13.586.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesejahteraan PNS Setda Kabupaten Tabanan	12 BULAN											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1333	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/bulan	38.595.550.000,00	32.095.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595.550.000,00	32.095.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1334	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	20.000.000,00	13.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	13.321.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang Administrasi perkantoran	100 %											
1335	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.988.900,00	139.964.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.988.900,00	139.964.600,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1336	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.516.745.300,00	2.702.871.300,00	2.724.900,00	2.724.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.470.200,00	2.705.596.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1337	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	360.439.200,00	360.439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.439.200,00	360.439.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1338	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.599.662.800,00	2.824.037.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.662.800,00	2.824.037.800,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1339	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	185.000.000,00	179.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	179.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1340	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	147.260.000,00	147.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.260.000,00	147.260.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1341	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	420.000.000,00	404.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	404.536.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1342	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.908.304.000,00	1.486.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.304.000,00	1.486.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1343	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	60.600,00	0,00	4.939.400,00	4.939.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.939.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	86 %											
1344	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	50 Unit	500.000.000,00	551.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	551.000.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1345	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	0,00	630.000,00	2.192.175.700,00	2.991.453.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.175.700,00	2.992.083.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase lancarnya tugas dan fungsi perangkat Daerah	100 %											
1346	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1347	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.155.901.000,00	1.155.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.901.000,00	1.155.901.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1348	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.388.518.800,00	9.898.518.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.518.800,00	9.898.518.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya, pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	85 %											
1349	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.359.236.000,00	1.359.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.236.000,00	1.359.236.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1350	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	440.400.000,00	537.738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.400.000,00	537.738.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1351	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	2.341.711.400,00	3.553.830.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.711.400,00	3.743.830.341,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kesejahtraan KDH dan WKDH Terfasilitasi	12 Bulan											
1352	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	171.882.000,00	218.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.882.000,00	218.682.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1353	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	95.200.000,00	95.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200.000,00	95.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1354	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	150.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1355	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Orang/Bulan	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Prosentase Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan sesuai aturan dan tepat waktu	100 %											
1356	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	235.000.000,00	169.158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	169.158.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1357	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	50.000.000,00	25.400.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.400.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1358	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	50.000.000,00	33.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	33.829.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan terselenggaranya komunikasi pimpinan	100 %											
1359	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	449.500.000,00	338.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.500.000,00	338.232.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1360	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	3.843.104.500,00	5.007.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.104.500,00	5.007.270.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1361	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	255.364.400,00	177.537.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.364.400,00	177.537.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi.	100 %											
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Pelaksanaan Perumusan/ bimbingan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah Pelaksanaan Perumusan/ bimbingan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	15 dokumen 11 Dokumen											
1362	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	185.000.000,00	107.284.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	107.284.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1363	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 Dokumen	500.000.000,00	24.142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	24.142.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1364	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	3.000.000.000,00	4.054.667.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	4.054.667.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dilaksanakan	100 %											
1365	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	10.900.000.000,00	13.537.898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000.000,00	13.537.898.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya Perda dan Produk Hukum lainnya serta pendampingan bantuan hukum	84 PRODUK HUKUM											
1366	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	76 Dokumen	265.710.000,00	170.471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.710.000,00	170.471.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1367	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	283.000.000,00	206.067.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000.000,00	206.067.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1368	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	76 Dokumen	100.000.000,00	65.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	65.272.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersedianya Dokumen Kerjasama	10 Dokumen											
1369	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	95.750.000,00	17.794.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.750.000,00	17.794.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Program BUMD dan BLUD, serapan KUR, hasil Survey Pasar dan Terkendalinya Pasokan Harga BBM LPG Bersubsidi	5 Dokumen											
1370	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	50.000.000,00	41.899.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	41.899.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1371	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	20.000.000,00	17.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.848.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1372	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	50.000.000,00	42.116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	42.116.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas rekomendasi kebijakan	100 %											
1373	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	20.000.000,00	6.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.829.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1374	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	40.000.000,00	39.899.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.899.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1375	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	10.000.000,00	5.814.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.814.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase Tersedianya Dokumen pengadaan Barang dan Jasa, RUP, dan Meningkatnya SDM	100 %											
1376	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	150.000.000,00	131.993.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	131.993.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1377	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78 Dokumen	50.000.000,00	25.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	25.935.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1378	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	100.000.000,00	34.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	34.084.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100 %											
1379	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1380	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %											
1381	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan	7.355.384.000,00	7.355.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355.384.000,00	7.355.384.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1382	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	90 %											
1383	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1384	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1385	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.030.923.500,00	1.315.638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.923.500,00	1.315.638.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1386	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	87.026.500,00	87.026.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.026.500,00	87.026.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1387	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1388	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	90 Paket	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1389	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	90 %											
1390	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 Unit	46.800,00	46.800,00	216.155.600,00	216.905.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.202.400,00	216.952.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1391	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	0,00	0,00	516.193.600,00	516.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.193.600,00	516.193.600,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %											
1392	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1393	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252.000.000,00	257.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000.000,00	257.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1394	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80 %											
1395	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	380.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	430.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1396	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1397	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	150.757.600,00	150.757.600,00	4.242.400,00	4.242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1398	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	0,00	0,00	5.920.253.000,00	5.920.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.253.000,00	5.920.253.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %											
1399	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	38.571.040.000,00	40.071.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.571.040.000,00	40.071.040.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1400	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	450.000.000,00	473.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	473.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1401	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100 %											
1402	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 Laporan	220.662.000,00	220.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.662.000,00	220.662.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	90 %											
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	80 %											
1403	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1404	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1405	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD													
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %											
1406	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1407	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1408	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1409	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1410	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80 %											
1411	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1412	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1413	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1414	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80 %											
1415	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	2.300.000.000,00	2.408.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	2.408.452.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1416	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11 Orang	600.000.000,00	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	660.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1417	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1418	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publiikasi dan Dokumentasi DPRD	77 Dokumen	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	90 %											
1419	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	6.340.000.000,00	6.340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340.000.000,00	6.340.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80 %											
1420	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	25.740.765.500,00	12.271.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740.765.500,00	12.271.613.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang Tersedia	3 Jenis Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1421	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1422	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Bappeda	100 %											
1423	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	7.478.383.000,00	7.478.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478.383.000,00	7.478.383.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1424	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
1425	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	14.979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.979.900,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1426	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.999.700,00	15.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999.700,00	15.889.300,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1427	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.999.300,00	29.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999.300,00	29.999.300,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1428	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1429	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1430	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	34.999.900,00	35.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999.900,00	35.697.500,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1431	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.968.000,00	101.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.968.000,00	101.930.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1432	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Kantor	2 Jenis Barang											
1433	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0,00	0,00	99.994.800,00	227.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.994.800,00	227.572.400,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor	3 Jenis Jasa											
1434	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1435	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1436	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	285.465.100,00	285.463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.465.100,00	285.463.600,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Kantor dalam Kondisi Baik	6 Jenis Barang											
1437	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	133.994.500,00	133.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.994.500,00	133.994.500,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1438	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	50.272.800,00	50.272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.272.800,00	50.272.800,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1439	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD dalam RKPD	90 %											
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	90 %											
1440	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.089.772.400,00	646.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.772.400,00	646.103.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Capaian Pembangunan Daerah	100 %											
1441	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	200.000.000,00	135.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	135.367.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %											
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 %											
1442	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	350.000.000,00	234.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	234.908.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1443	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	250.000.000,00	201.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	201.713.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90 %											
1444	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1.100.000.000,00	493.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	493.754.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1445	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	50.000.000,00	36.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.393.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %											
1446	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	150.000.000,00	93.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	93.608.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1447	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	150.000.000,00	84.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	84.300.000,00	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		BADAN KEUANGAN DAERAH													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bakeuda Tabanan)	100 %											
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kiinerja Perangkat Daerah	100 %											
1448	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1449	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
1450	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan	37.862.832.000,00	39.690.834.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.862.832.000,00	39.690.834.747,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1451	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	100 %											
1452	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	13.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	13.499.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1453	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1454	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1455	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1456	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1457	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1458	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	79.926.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.926.000,00	39.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1459	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penunjang urusan Pemerintah daerah	100 %											
1460	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	130 Unit	12.651.620.700,00	12.702.832.700,00	753.379.300,00	1.358.379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405.000.000,00	14.061.212.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1461	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	336.155.600,00	370.419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.155.600,00	370.419.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %											
1462	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1463	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1464	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.872.000.000,00	1.472.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000.000,00	1.472.944.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
1465	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	54.992.200,00	54.992.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.992.200,00	54.992.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1466	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1467	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.999.300,00	9.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.300,00	9.999.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100 %											
1468	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	200.000.000,00	194.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	194.408.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1469	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	210.000.000,00	200.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	200.577.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1470	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	25.000.000,00	24.213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.213.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD													
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	30.000.000,00	27.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1472	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	370.000.000,00	351.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00	351.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1473	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	515.000.000,00	511.456.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000.000,00	511.456.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1474	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	220.000.000,00	213.202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	213.202.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pesentase koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah	100 %											
1475	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	37.500.000,00	29.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	29.236.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1476	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	18.000.000,00	17.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.517.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi dan pelaporan keuangan daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100 %											
1477	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1478	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1479	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1480	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1481	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30.000.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1482	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	rPersentase penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100 %											
1483	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1484	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	48.108.300,00	48.108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.033.727.000,00	235.560.511.000,00	234.081.835.300,00	235.608.619.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1485	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	0,00	0,00	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1486	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.273.969.100,00	48.400.487.100,00	38.273.969.100,00	48.400.487.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan kualitas laporan barang milik daerah dalam kategori baik	95 %											
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %											
1487	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	35.000.000,00	34.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.344.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1488	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	33.080.000,00	33.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080.000,00	33.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1489	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	750.000.000,00	1.110.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	1.110.458.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1490	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	300.000.000,00	235.338.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	585.338.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase terpenuhinya dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan Daerah	15 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terpenuhinya dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan Daerah	15 %											
1491	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	15.000.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1492	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	100.000.000,00	90.028.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	90.028.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1493	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	300.000.000,00	273.068.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	273.068.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1494	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	600 Obyek Pajak	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1495	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	700.000.000,00	663.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	663.924.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1496	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	1.458.804.800,00	1.191.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.804.800,00	1.191.287.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1497	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	170.000.000,00	151.139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	151.139.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Sakip tersedia	3 JENIS DOKUMEN											
1498	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.853.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1499	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.874.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100 %											
1500	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	7.438.785.000,00	7.438.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438.785.000,00	7.438.785.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1501	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	1.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.937.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100 %											
1502	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1503	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.499.400,00	5.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499.400,00	5.499.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1504	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.998.700,00	24.830.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998.700,00	24.830.700,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1505	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1506	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1507	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1508	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	56.417.000,00	28.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.417.000,00	28.157.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1509	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100 %											
1510	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1511	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	99.687.200,00	269.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.687.200,00	269.730.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	100 %											
1512	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1513	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	56.997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	56.997.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1514	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	488.500.800,00	488.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.500.800,00	488.500.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1515	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	85.000.000,00	91.959.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	91.959.880,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1516	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	9.870.000,00	22.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.000,00	22.870.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	INDEKS MERIT SISTEM	0,75 INDEKS MERIT SISTEM											
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan formasi dan informasi kepegawaian	100 %											
1517	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	25.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	19.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1518	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	50.000.000,00	28.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	28.894.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1519	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1.175.600.000,00	812.857.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.600.000,00	812.857.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1520	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500 Dokumen	60.000.000,00	123.539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	123.539.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1521	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	434.500.000,00	426.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.500.000,00	426.811.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan mutasi dan promosi ASN	100 %											
1522	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	950 Dokumen	67.000.000,00	63.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	63.490.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1523	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	437.500.000,00	456.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.500.000,00	456.911.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang memperoleh peningkatan kualifikasi	91 %											
1524	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	94 %											
1525	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	184.000.000,00	147.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000.000,00	147.527.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1526	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	324 Orang	102.803.800,00	89.421.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.803.800,00	89.421.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1527	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	22.000.000,00	18.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	18.835.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1528	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	17.000.000,00	14.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	14.765.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional	64,24 %											
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis	5,10 %											
1529	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	300 Orang	1.273.846.100,00	1.136.247.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.846.100,00	1.136.247.900,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	51 %											
1530	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	2.141.782.000,00	1.945.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.782.000,00	1.945.464.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kajian Kebijakan Yang Disusun Terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	95 %											
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersedia	3 Dokumen											
1531	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.864.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.864.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1532	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.886.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	BB											
1533	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.784.151.000,00	3.235.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.151.000,00	3.235.991.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1534	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.500.000,00	2.195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.195.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
1535	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1536	5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1537	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	24.987.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.987.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1538	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1539	5.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	14.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.655.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1540	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	89.860.000,00	46.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.860.000,00	46.414.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1541	5.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor	2 Jenis Barang											
1542	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	214.090.400,00	214.090.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.090.400,00	214.090.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1543	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	159.729.200,00	159.729.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.729.200,00	159.729.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
1544	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1545	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	79.998.300,00	79.998.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.998.300,00	79.998.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1546	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	6 Jenis Barang											
1547	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	49.999.200,00	79.989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.200,00	79.989.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1548	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1549	5.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Kebijakan Yang Disusun Terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	95 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 rekomend asi											
1550	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	2.109.915.000,00	2.372.707.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.915.000,00	2.372.707.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3 Rekomen dasi											
1551	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	200.000.000,00	516.940.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	516.940.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Rekomen dasi											
1552	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	861.500.000,00	851.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.500.000,00	851.658.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Rekomen dasi											
1553	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	237.598.800,00	220.774.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.598.800,00	220.774.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1554	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	100.000.000,00	220.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	220.661.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		INSPEKTORAT													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %											
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100 %											
1555	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.594.700,00	14.214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594.700,00	14.214.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1556	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.069.800,00	3.724.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069.800,00	3.724.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD yang tersusun tepat waktu	100 %											
1557	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	15.062.560.100,00	14.362.560.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062.560.100,00	14.362.560.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	100 %											
1558	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76 Orang	1.451.925.000,00	1.443.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.925.000,00	1.443.824.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhnya penunjang administrasi umum perkantoran	100 %											
1559	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.179.100,00	6.179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179.100,00	6.179.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1560	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.948.300,00	14.833.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948.300,00	14.833.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1561	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.526.900,00	60.526.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.526.900,00	60.526.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1562	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61.410.500,00	52.110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.410.500,00	52.110.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1563	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	106 Dokumen	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1564	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	143.075.700,00	108.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.075.700,00	108.075.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1565	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	766.330.000,00	402.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.330.000,00	402.260.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1566	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %											
1567	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	0,00	0,00	757.486.200,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.486.200,00	303.121.270,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1568	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1569	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.199.100,00	50.799.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.199.100,00	50.799.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1570	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.162.000,00	207.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162.000,00	207.162.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %											
1571	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	405.989.400,00	366.116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.989.400,00	366.116.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1572	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	36.610.000,00	36.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610.000,00	36.610.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100 %											
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %											
1573	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	987.679.000,00	580.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.679.000,00	580.264.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1574	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	956.085.000,00	580.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.085.000,00	580.264.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1575	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	746.764.000,00	473.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.764.000,00	473.632.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1576	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	1.219.564.000,00	710.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.564.000,00	710.032.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1577	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan	1.253.764.000,00	743.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.764.000,00	743.732.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1578	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	338.064.000,00	178.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.064.000,00	178.632.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1579	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	412.764.000,00	223.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.764.000,00	223.632.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %											
1580	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	125.589.000,00	97.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.589.000,00	97.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	171.669.000,00	112.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.669.000,00	112.410.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	100 %											
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %											
1582	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	14.988.000,00	13.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988.000,00	13.455.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %											
1583	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah	1.181.535.700,00	532.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.535.700,00	532.952.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1584	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 perangkat daerah	1.202.215.000,00	556.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.215.000,00	556.832.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1585	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	2.807.120.700,00	2.364.864.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.120.700,00	2.364.864.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KECAMATAN KEDIRI													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen											
1586	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1587	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1588	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.464.612.000,00	3.156.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.612.000,00	3.156.452.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1589	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1590	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1591	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	38.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	38.970.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1592	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1593	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1594	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1595	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	100 %											
1596	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	31.744.300,00	31.744.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.744.300,00	31.744.300,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Twrsediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1597	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1598	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1599	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	185.000.000,00	190.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	190.500.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
1600	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	31.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	37.500.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1601	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1602	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Difasilitasi Untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %											
1603	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1604	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	39.000.000,00	33.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	33.495.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kediri	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1605	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	25.000.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	36.050.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		KECAMATAN TABANAN													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip	3 Dokumen											
1606	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.748.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1607	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.000.000,00	1.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.832.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100 %											
1608	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.240.625.000,00	3.232.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.625.000,00	3.232.465.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1609	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	2.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.769.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %											
1610	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1611	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.991.100,00	1.991.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.100,00	1.991.100,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1612	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.999.700,00	2.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.700,00	2.999.700,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1613	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	85.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1614	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1615	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	9.207.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.207.460,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1616	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	9.852.900,00	2.562.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852.900,00	2.562.900,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1617	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	5.000.000,00	3.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.848.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan	100 %											
1618	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3.205.400,00	3.205.400,00	41.678.300,00	41.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.883.700,00	44.883.700,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1619	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1620	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.000.000,00	44.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	44.600.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1621	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	174.998.200,00	174.998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.998.200,00	174.998.200,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
1622	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	25.999.300,00	25.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999.300,00	25.999.300,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1623	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.861.800,00	4.861.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.800,00	4.861.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1624	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %											
1625	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	5.940.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.940.300,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1626	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	80.000.000,00	72.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	72.611.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Peringatan Hari-hari Nasional yang diselenggarakan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1627	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	25.000.000,00	21.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	21.580.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		KECAMATAN MARGA													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip Daerah	3 Dokumen											
1628	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1629	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1630	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.673.352.000,00	3.565.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.352.000,00	3.565.192.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1631	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1632	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	886.500,00	886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.500,00	886.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1633	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.999.400,00	2.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.400,00	2.999.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1634	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1635	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	672.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1636	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1637	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	9.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854.000,00	0,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1638	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	100 %											
1639	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	24.126.500,00	37.329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126.500,00	37.329.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1640	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1641	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1642	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya barang Milik Daerah	100 %											
1643	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	31.490.000,00	41.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490.000,00	41.720.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1644	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %											
1645	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1646	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	91.000.000,00	79.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000.000,00	79.216.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum di Kecamatan Marga	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1647	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	25.000.000,00	31.566.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	31.566.700,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		KECAMATAN BATURITI													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Baturiti)	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip	3 Dokumen											
1648	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1649	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Baturiti)	100 %											
1650	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.642.931.000,00	3.634.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.931.000,00	3.634.771.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1651	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1652	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.998.600,00	2.998.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.600,00	2.998.600,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1653	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	60.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1654	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.800,00	1.999.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1655	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1656	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1657	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1658	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	49.395.000,00	49.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395.000,00	49.395.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1659	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %											
1660	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1661	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	27.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1662	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	174.998.200,00	174.998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.998.200,00	174.998.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
1663	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	41.993.200,00	41.993.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.993.200,00	41.993.200,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1664	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baturiti	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %											
1665	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1666	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	85.000.000,00	69.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	69.658.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Tepat Guna	100 %											
1667	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2.680.900,00	2.680.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.900,00	2.680.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Baturiti	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1668	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	25.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	37.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
		KECAMATAN PENEBEL													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen											
1669	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.937.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1670	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.874.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1671	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.772.480.000,00	3.414.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.480.000,00	3.414.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1672	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1673	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1674	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.999.200,00	2.999.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.200,00	2.999.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1675	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	39.132.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	39.132.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1676	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.900,00	1.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1677	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1678	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	9.477.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.477.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1679	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan	100 %											
1680	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1681	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	0,00	0,00	96.536.600,00	96.536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.536.600,00	96.536.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1682	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1683	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1684	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1685	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	188.993.500,00	188.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.993.500,00	188.993.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80 %											
1686	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	42.996.000,00	42.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.996.000,00	42.996.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1687	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1688	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan	100 %											
1689	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya tugas pelimpahan yang diberikan kepada Camat	100 %											
1690	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1691	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase TerselenggaranyaKoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %											
1692	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	5.278.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.278.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1693	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	90.000.000,00	82.747.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	82.747.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaksanakan	18 Lembaga											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1694	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarak atan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan atas permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat Desa	100 %											
1695	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Penebel	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1696	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375 Orang	25.000.000,00	37.933.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	37.933.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KECAMATAN KERAMBITAN													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD(Kecamatan Kerambitan)	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen											
1697	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1698	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1699	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.994.680.000,00	2.894.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.680.000,00	2.894.680.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum (DAU) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1700	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1701	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.999.500,00	1.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.500,00	1.999.500,00	Hasil Kerja Sama Daerah Hasil Kerja Sama Daerah
1702	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.999.800,00	2.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.800,00	2.999.800,00	Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1703	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.995.500,00	44.995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.995.500,00	44.995.500,00	Hasil Kerja Sama Daerah Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1704	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1705	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1706	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	9.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854.000,00	0,00	Hasil Kerja Sama Daerah Hasil Kerja Sama Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1707	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah Hasil Kerja Sama Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi-nya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1708	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	47.988.000,00	47.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.988.000,00	47.988.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100 %											
1709	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1710	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55.000.000,00	44.998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	44.998.900,00	Hasil Kerja Sama Daerah Hasil Kerja Sama Daerah
1711	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.999.900,00	100.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.999.900,00	100.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
1712	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	32.990.400,00	42.990.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.990.400,00	42.990.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1713	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kerambitan	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %											
1714	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarak atan	5.292.400,00	5.292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.400,00	5.292.400,00	Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hasil Kerja Sama Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1715	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	73.000.000,00	66.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	66.808.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1716	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	24.999.900,00	34.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999.900,00	34.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KECAMATAN SELEMADEG TIMUR													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Selemadeg Timur)	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip	3 Dokumen											
1717	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1718	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1719	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3.021.038.000,00	2.912.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.038.000,00	2.912.878.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1720	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1721	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.991.600,00	1.991.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.600,00	1.991.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1722	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.997.200,00	2.997.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.200,00	2.997.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1723	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	54.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	54.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1724	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1725	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1726	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1727	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1728	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	49.521.100,00	49.521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.521.100,00	49.521.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1729	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1730	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1731	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	109.997.500,00	109.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.997.500,00	109.997.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1732	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	28.228.000,00	28.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.228.000,00	28.228.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1733	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	11.770.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1734	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Timur	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %											
1735	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1736	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	85.000.000,00	41.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	41.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Timur	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1737	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	25.000.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KECAMATAN SELEMADEG													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Selemadeg)	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip Daerah	4 Dokumen											
1738	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1739	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1740	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.060.913.000,00	2.952.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.913.000,00	2.952.753.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1741	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1742	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1743	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1744	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	55.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1745	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1746	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1747	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1748	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1749	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.175.600,00	2.158.400,00	47.820.800,00	47.820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996.400,00	49.979.200,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1750	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1751	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28.784.700,00	28.784.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.784.700,00	28.784.700,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1752	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	156.323.800,00	156.323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.323.800,00	156.323.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
1753	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	34.988.000,00	34.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.988.000,00	34.988.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1754	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1755	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %											
1756	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1757	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	81.218.000,00	71.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.218.000,00	71.993.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1758	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KECAMATAN SELEMADEG BARAT													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Selemadeg Barat)	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip Daerah	4 dokumen											
1759	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.866.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1760	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.076.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1761	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.700.000.000,00	2.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00	2.650.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1762	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.748.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1763	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1764	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1765	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.000.000,00	54.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	54.349.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1766	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1767	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1768	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1769	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1770	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1771	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1772	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	49.833.600,00	49.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.833.600,00	49.833.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1773	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1774	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1775	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.000.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	18.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1776	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	37.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
1777	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	39.985.200,00	39.985.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.985.200,00	39.985.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1778	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1779	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1780	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selemadeg Barat	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %											
1781	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.398.600,00	2.604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398.600,00	2.604.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1782	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	110.000.000,00	82.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	82.664.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1783	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Selemadeg Barat	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1784	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	25.000.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	16.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KECAMATAN PUPUAN													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kecamatan Pupuan)	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Jenis Dokumen											
1785	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1786	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.899.900,00	1.899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.900,00	1.899.900,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1787	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.166.046.000,00	3.406.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.046.000,00	3.406.625.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penghematan Belanja
1788	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1789	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1790	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.999.900,00	2.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1791	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	55.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1792	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.800,00	1.999.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1793	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.600,00	9.999.600,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1794	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	9.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854.000,00	0,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1795	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.399.900,00	4.399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399.900,00	4.399.900,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1796	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	44.859.300,00	44.859.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.859.300,00	44.859.300,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
1797	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1798	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.999.000,00	26.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999.000,00	26.998.100,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hasil Kerja Sama Daerah Hasil Kerja Sama Daerah
1799	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	197.672.000,00	167.670.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.672.000,00	167.670.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %											
1800	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	44.989.400,00	54.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.989.400,00	54.981.800,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hasil Kerja Sama Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hasil Kerja Sama Daerah
1801	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.380.000,00	9.281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00	9.281.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1802	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hasil Kerja Sama Daerah
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pupuan	100 % 100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %											
1803	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.999.900,00	6.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.900,00	6.999.300,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1804	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	89.999.000,00	81.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999.000,00	81.935.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Pupuan	100 % 100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1805	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	530 Orang	25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	40.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Kesbangpol Tabanan)	100 %											
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang baik	5 Buah											
1806	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1807	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan OPD	100 persen											
1808	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.816.067.000,00	4.816.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816.067.000,00	4.816.067.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1809	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.765.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam kondisi baik dalam menunjang kelancaran tugas PD.	100 Persen											
1810	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,00	979.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	979.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1811	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5.000.000,00	4.974.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.974.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1812	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.000.000,00	14.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.997.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1813	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	5.000.000,00	4.942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.942.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1814	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1815	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	17.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	17.248.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1816	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik daerah dalam menunjang kelancaran tugas PD	5 Unit											
1817	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	420.000,00	319.300,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.903.600,00	99.903.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor dalam melancarkan tugas PD	100 Persen											
1818	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1819	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	28.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	28.111.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1820	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	275.000.000,00	283.050.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	283.050.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah dalam menunjang kelancaran tugas PD	100 Persen											
1821	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40.000.000,00	49.992.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	49.992.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1822	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.888.200,00	9.888.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.200,00	9.888.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1823	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang Mengerti dan Memahami Nilai-Nilai Kebangsaan	95 %											
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pemuda yang mendapatkan pemhaman Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.	100 Orang											
1824	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	1.000.000.000,00	998.930.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	998.930.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1825	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	400.000.000,00	277.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	277.819.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1826	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	160 Orang	52.280.000,00	36.787.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.280.000,00	36.787.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	80 %											
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pemuda yang mendapatkan pendidkan politik pengembangan etika serta budaya politik	100 %											
1827	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350 Orang	88.810.100,00	73.830.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.810.100,00	73.830.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1828	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	374420 Orang	3.056.310.000,00	3.049.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.310.000,00	3.049.710.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	95 %											
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Ormas	1 Tahun											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1829	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580.000,00	19.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1830	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	76.750.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750.000,00	59.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase partisipasi masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi	100 Persen											
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terselenggaranya Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya di kabupaten Tabanan	100 Persen											
1831	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	675.000.000,00	548.570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00	548.570.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Terkendalinya Potensi Konflik di Kabupaten Tabanan	95 %											
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Data Keterlibatan Pemuda dalam pembangunan	100 %											
1832	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	15.968.000,00	14.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968.000,00	14.829.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1833	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	91.360.000,00	87.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.360.000,00	87.772.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1834	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	250.000.000,00	174.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	174.758.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA.

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



KABUPATEN TABANAN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	441.972.256.300,00	401.177.528.067,00	49.026.400,00	58.312.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.021.282.700,00	401.235.840.967,00
1	01	1	02	Kesehatan	444.442.597.113,00	445.535.170.196,00	18.274.346.743,00	10.453.561.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.716.943.856,00	455.988.732.013,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.132.593.400,00	15.688.395.400,00	168.089.600,00	198.089.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.683.000,00	15.886.485.000,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	27.579.501.500,00	24.619.116.100,00	723.036.900,00	722.888.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.302.538.400,00	25.342.004.800,00
1	01	1	06	Sosial	6.706.185.900,00	6.392.198.200,00	49.981.400,00	49.981.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756.167.300,00	6.442.179.600,00
1	01	2	09	Pangan	3.724.444.600,00	3.728.032.900,00	28.111.500,00	28.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.556.100,00	3.756.144.400,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	17.225.075.400,00	15.602.718.700,00	102.609.500,00	103.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327.684.900,00	15.706.406.700,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.198.161.900,00	8.461.877.700,00	721.187.600,00	721.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.349.500,00	9.183.065.300,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.814.091.200,00	13.129.566.069,00	48.571.000,00	48.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862.662.200,00	13.178.137.069,00
1	01	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.360.079.000,00	4.229.738.800,00	99.469.800,00	199.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459.548.800,00	4.429.594.600,00
1	01	2	15	Perhubungan	16.715.406.100,00	15.911.546.900,00	124.997.400,00	124.997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840.403.500,00	16.036.544.300,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	7.120.997.100,00	7.149.696.900,00	7.549.079.900,00	7.549.068.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670.077.000,00	14.698.765.600,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.779.502.100,00	6.468.869.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.502.100,00	6.468.869.100,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	9.287.374.200,00	8.380.049.600,00	421.618.000,00	374.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708.992.200,00	8.754.353.700,00
1	01	2	20	Statistik	100.000.000,00	53.182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	53.182.600,00
1	01	2	22	Kebudayaan	8.983.203.000,00	8.587.307.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033.123.000,00	8.637.227.000,00
1	01	2	23	Perpustakaan	6.572.731.800,00	6.065.603.300,00	76.618.400,00	76.618.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.350.200,00	6.142.221.700,00
1	01	2	24	Kearsipan	219.000.000,00	201.396.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000.000,00	201.396.300,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	5.888.589.900,00	5.872.889.700,00	698.000.000,00	698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586.589.900,00	6.570.889.700,00
1	01	3	26	Pariwisata	5.252.544.400,00	5.247.016.400,00	49.270.600,00	49.270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301.815.000,00	5.296.287.000,00
1	01	3	27	Pertanian	23.998.346.600,00	19.502.669.880,00	95.836.000,00	93.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094.182.600,00	19.596.645.880,00
1	01	3	30	Perdagangan	7.044.731.200,00	6.288.669.800,00	64.729.000,00	314.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.460.200,00	6.603.298.800,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	82.176.577.500,00	80.136.621.400,00	4.541.551.400,00	6.552.948.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.718.128.900,00	86.689.569.841,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	90.152.605.900,00	78.714.620.400,00	6.656.844.600,00	6.657.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.809.450.500,00	85.372.215.000,00
1	01	5	01	Perencanaan	11.713.854.700,00	10.251.755.900,00	99.994.800,00	227.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813.849.500,00	10.479.328.300,00
1	01	5	02	Keuangan	65.152.763.300,00	66.514.776.947,00	1.439.534.900,00	2.078.798.800,00	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	272.307.696.100,00	283.960.998.100,00	345.413.549.470,00	366.545.669.693,00
1	01	5	03	Kepegawaian	10.859.474.700,00	10.522.316.180,00	99.687.200,00	269.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959.161.900,00	10.792.046.480,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	3.415.628.100,00	3.081.711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.628.100,00	3.081.711.900,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	7.006.522.300,00	8.117.542.500,00	373.819.600,00	373.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.341.900,00	8.491.362.100,00
1	01	6	01	Inspektorat	29.776.832.000,00	24.346.378.400,00	757.486.200,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534.318.200,00	24.649.499.670,00
1	01	7	01	Kecamatan	36.672.640.800,00	35.805.797.020,00	553.503.500,00	566.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226.144.300,00	36.372.503.820,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	10.973.933.300,00	10.600.754.600,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073.416.900,00	10.700.338.900,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.569.008.300,00	1.515.348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.008.300,00	1.515.348.900,00
2	03	1	06	Sosial	225.000.000,00	224.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	224.265.000,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.794.052.300,00	115.046.247.528,00	119.461.992.000,00	146.492.591.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.256.044.300,00	261.538.839.197,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	189.558.500,00	622.005.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.558.500,00	622.005.900,00
3	04	2	09	Pangan	405.299.900,00	389.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.299.900,00	389.990.000,00
3	04	2	15	Perhubungan	28.374.811.900,00	28.716.295.900,00	508.483.600,00	547.094.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883.295.500,00	29.263.390.300,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	9.959.170.800,00	10.854.457.200,00	195.829.200,00	195.829.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155.000.000,00	11.050.286.400,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	952.887.000,00	1.245.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.887.000,00	1.245.044.000,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	506.978.300,00	371.334.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.978.300,00	371.334.900,00
3	04	2	21	Persandian	50.000.000,00	36.751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.751.400,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	1.884.875.000,00	2.241.728.000,00	536.416.000,00	672.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.291.000,00	2.914.560.000,00
3	04	3	27	Pertanian	6.084.252.000,00	5.021.924.800,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084.252.000,00	7.521.924.800,00
3	04	3	30	Perdagangan	2.698.105.150,00	2.908.814.150,00	764.400.000,00	244.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.505.150,00	3.152.834.150,00
3	04	3	31	Perindustrian	1.950.000.000,00	1.857.558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00	1.857.558.300,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	938.000.000,00	1.045.186.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000.000,00	1.045.186.800,00
4	05	2	10	Pertanahan	100.000.000,00	5.096.329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	5.096.329.100,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	16.752.886.700,00	18.235.591.200,00	13.197.256.300,00	15.508.193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950.143.000,00	33.743.785.000,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.150.000.000,00	4.194.638.600,00	0,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000.000,00	4.233.138.600,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.341.500.000,00	2.273.908.700,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.500.000,00	2.473.908.700,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	81.524.754.700,00	84.427.155.713,00	49.966.716.180,00	50.623.963.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.491.470.887,00	135.051.119.193,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.939.374.500,00	5.904.739.450,00	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.374.500,00	7.509.739.450,00
7				PARIWISATA										
7	08	3	26	Pariwisata	563.668.000,00	517.817.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.668.000,00	517.817.400,00
8				PENDIDIKAN										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
8	10	1	01	Pendidikan	67.987.085.77 5,00	69.471.525.40 6,00	18.819.595.4 35,00	17.073.513.4 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.806.681.21 0,00	86.545.038.81 6,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	6.653.523.700 ,00	6.763.887.700 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.523.700 ,00	6.763.887.700 ,00
8	10	2	22	Kebudayaan	21.896.901.20 0,00	43.527.657.00 0,00	563.098.800, 00	1.400.317.10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460.000.00 0,00	44.927.974.10 0,00
8	10	2	23	Perpustakaan	873.082.600,0 0	855.077.200,0 0	40.412.400,0 0	40.363.400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	913.495.000,0 0	895.440.600,0 0
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	2.615.000.000 ,00	5.850.982.200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.000.000 ,00	5.850.982.200 ,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	783.527.600,0 0	718.938.000,0 0	2.968.067.60 0,00	2.968.067.60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.595.200 ,00	3.687.005.600 ,00
				TOTAL	1.781.781.549 .245,00	1.776.320.715 .306,00	252.843.673. 058,00	279.155.195. 087,00	6.513.555. 170,00	13.991.095. 846,00	272.307.696. 100,00	283.960.998. 100,00	2.313.446.473 .573,00	2.353.428.004 .339,00



Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
8	10	1	01	Pendidikan	67.987.085.77 5,00	69.471.525.40 6,00	18.819.595.4 35,00	17.073.513.4 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.806.681.21 0,00	86.545.038.81 6,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	6.653.523.700 ,00	6.763.887.700 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.523.700 ,00	6.763.887.700 ,00
8	10	2	22	Kebudayaan	21.896.901.20 0,00	43.527.657.00 0,00	563.098.800, 00	1.400.317.10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460.000.00 0,00	44.927.974.10 0,00
8	10	2	23	Perpustakaan	873.082.600,0 0	855.077.200,0 0	40.412.400,0 0	40.363.400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	913.495.000,0 0	895.440.600,0 0
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	2.615.000.000 ,00	5.850.982.200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.000.000 ,00	5.850.982.200 ,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	783.527.600,0 0	718.938.000,0 0	2.968.067.60 0,00	2.968.067.60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.595.200 ,00	3.687.005.600 ,00
				TOTAL	1.781.781.549 .245,00	1.776.320.715 .306,00	252.843.673. 058,00	279.155.195. 087,00	6.513.555. 170,00	13.991.095. 846,00	272.307.696. 100,00	283.960.998. 100,00	2.313.446.473 .573,00	2.353.428.004 .339,00

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA.

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM



KABUPATEN TABANAN
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	20.000.000,00	20.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	100.000.000,00	100.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.000.000,00	5.423.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000,00	5.000.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000,00	5.423.000,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000,00	5.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.000.000,00	9.204.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	311.853.000,00	311.853.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.000.000,00	5.000.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	10.000.000,00	5.423.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	10.000.000,00	5.423.000,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	30.000.000,00	30.000.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	18.350.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.000.000,00	10.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100.000.000,00	77.390.000,00
		Total	696.853.000,00	648.489.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	67.677.200,00	52.981.200,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000,00	193.280.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	40.000.000,00	38.374.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000,00	27.555.000,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00	48.470.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.000.000,00	28.950.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	857.794.000,00	857.794.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50.000.000,00	49.055.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.000.000,00	28.470.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.187.144.800,00	4.185.704.800,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	20.000.000,00	20.000.000,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	325.000.000,00	325.000.000,00
		Total		5.887.616.000,00
3.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	25.000.000,00	24.340.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00	45.800.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	40.000.000,00	38.200.000,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50.000.000,00	47.240.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250.000.000,00	246.276.400,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.000.000,00	28.650.000,00
Total		445.000.000,00	430.506.400,00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
4.	Kekhususan PAUD	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20.000.000,00	10.360.000,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.000.000,00	10.360.000,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	40.000.000,00	24.235.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	180.000.000,00	180.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.599.862.000,00	1.599.862.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	40.000.000,00	21.805.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20.000.000,00	10.360.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20.000.000,00	10.360.000,00
Total			1.939.862.000,00	1.867.342.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			8.969.331.000,00	8.801.971.400,00
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.008.099.000,00	1.007.235.000,00
Total			1.008.099.000,00	1.007.235.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.168.000,00	210.168.000,00
Total			210.168.000,00	210.168.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000,00	9.411.000,00
Total			10.000.000,00	9.411.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.000.000,00	9.403.000,00
Total			10.000.000,00	9.403.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	687.790.000,00	686.410.000,00
Total			687.790.000,00	686.410.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	40.000.000,00	28.845.000,00
Total			40.000.000,00	28.845.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	706.040.000,00	705.419.000,00
Total			706.040.000,00	705.419.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.500.000,00	7.308.000,00
Total			7.500.000,00	7.308.000,00
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000,00	8.576.000,00
Total			10.000.000,00	8.576.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	480.620.000,00	470.747.000,00
Total			480.620.000,00	470.747.000,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	469.644.000,00	469.644.000,00
Total			469.644.000,00	469.644.000,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	273.174.700,00	273.174.700,00
Total			273.174.700,00	273.174.700,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			3.913.035.700,00	3.886.340.700,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.950.000.000,00	1.712.837.600,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000,00	38.378.200,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000,00	2.337.670.800,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	100.000.000,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00
Total			6.100.000.000,00	4.188.886.600,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00	0,00
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000,00	194.589.000,00
Total			200.000.000,00	194.589.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			6.300.000.000,00	4.383.475.600,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	410.000.000,00	408.986.900,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	300.000.000,00	296.110.000,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	25.000.000,00	22.373.000,00
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	50.000.000,00	37.061.400,00
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	25.000.000,00	23.016.000,00
Total			810.000.000,00	787.547.300,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.373.000,00
Total			25.000.000,00	22.373.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			835.000.000,00	809.920.300,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1.	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	125.000.000,00	153.612.400,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	114.288.000,00	92.025.200,00
Total			239.288.000,00	245.637.600,00
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	20.000.000,00	20.000.000,00
Total			20.000.000,00	20.000.000,00
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	20.000.000,00	19.478.000,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000,00	23.994.500,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00
Total			145.000.000,00	143.472.500,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	349.212.400,00	349.212.400,00
Total			349.212.400,00	349.212.400,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	170.966.600,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	71.379.500,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.000.000,00	23.309.100,00
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	199.999.900,00	199.781.000,00
Total			474.999.900,00	465.436.200,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.228.500.300,00	1.223.758.700,00
F SPM Bidang Sosial				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	72.870.000,00
		Penyediaan Permakanan	300.000.000,00	300.000.000,00
Total			400.000.000,00	372.870.000,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	225.000.000,00	224.265.000,00
Total			225.000.000,00	224.265.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			625.000.000,00	597.135.000,00



No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00	72.870.000,00
		Penyediaan Permakanan	300.000.000,00	300.000.000,00
		Total	400.000.000,00	372.870.000,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	225.000.000,00	224.265.000,00
		Total	225.000.000,00	224.265.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			625.000.000,00	597.135.000,00

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA.

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD



KABUPATEN TABANAN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	349.786.318,00	6.211.942.000,00	3.700.278.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	6.756.167.300,00	6.442.179.600,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.747.299.951,00	176.643.100,00	161.702.100,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	3.752.556.100,00	3.756.144.400,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	188.912.344,00	891.938.800,00	746.224.300,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	136.000.000,00	225.000.000,00	224.265.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	130.618.008,00	300.000.000,00	549.519.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	243.483.069,00	5.205.859.400,00	3.468.103.700,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	92.563.649,00	320.887.000,00	313.972.000,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	5.459.548.800,00	4.429.594.600,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	442.021.282.700,00	401.235.840.967,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	87.078.672,00	399.711.700,00	708.896.700,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	206.811.846,00	2.702.148.000,00	2.674.444.450,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.212.558.977,00	45.555.500,00	31.663.500,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	14.670.077.000,00	14.698.765.600,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.382.373.918,00	6.115.673.700,00	6.176.037.700,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	17.327.684.900,00	15.706.406.700,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	163.272.510,00	2.685.403.800,00	2.312.052.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.592.777.875,00	559.212.400,00	562.221.200,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	79.567.500,00	3.509.013.800,00	4.182.741.200,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.600.070.598,00	200.000.000,00	194.589.000,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	674.859.708,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	59.624.685.000,00	61.488.150.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.935.293.152,00	16.891.753.000,00	11.750.449.800,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.523.876.760,00	1.370.200.000,00	1.344.309.200,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	163.272.510,00	144.003.000,00	143.462.400,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	462.716.943.856,00	455.988.732.013,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	48.805.926.446,00	57.372.000.000,00	74.611.842.128,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	716.406.597,00	990.291.000,00	1.309.747.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	81.636.255,00	59.919.150,00	57.135.150,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.549.387.307,00	27.180.000.000,00	29.309.490.200,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	675.000.000,00	548.570.200,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.726.238.737,00	2.171.752.000,00	2.962.611.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	16.327.251,00	100.000.000,00	53.182.600,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	9.708.992.200,00	8.754.353.700,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	799.812.510,00	1.468.080.000,00	1.763.220.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	830.335.303,00	50.000.000,00	44.252.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	139.466.348,00	55.000.000,00	44.777.900,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	234.023.931,00	103.000.000,00	79.597.200,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	381.924.000,00	1.452.280.000,00	1.313.537.800,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.847.822.575,00	3.145.120.100,00	3.123.540.100,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	163.272.510,00	3.415.628.100,00	3.081.711.900,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	341.763.324,00	340.000.000,00	526.632.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	5.347.358.800,00	5.357.961.300,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	8.273.758.100,00	8.479.994.480,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100.000.000,00	304.839.200,00	269.849.200,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	6.649.350.200,00	6.142.221.700,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	35.375.711,00	1.091.000.000,00	1.078.181.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	24.094.182.600,00	19.596.645.880,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.776.526.315,00	15.329.460.000,00	18.183.599.300,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.350.414.383,00	45.397.500.000,00	56.417.314.269,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	5.301.815.000,00	5.296.287.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	97.963.506,00	20.000.000,00	19.219.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	587.390.627,00	249.999.900,00	304.359.900,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	70.898.668.900,00	68.159.549.841,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000,00	2.050.000.000,00	1.144.676.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	285.000.000,00	285.000.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.171.906.836,00	405.299.900,00	389.990.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	265.225.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	81.636.255,00	1.371.500.000,00	1.033.157.100,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	761.938.380,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	391.854.024,00	490.000.000,00	346.420.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	9.033.123.000,00	8.637.227.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.224.543.825,00	835.000.000,00	809.920.300,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	1.060.900.000,00	30.000.000,00	27.804.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	3.871.328.100,00	4.308.620.900,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.314.608.931,00	357.328.000,00	277.359.500,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.600.353.754,00	37.184.765.500,00	23.884.065.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.459.972.484,00	1.289.772.400,00	781.470.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	816.362.550,00	7.325.000.000,00	12.099.110.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	7.109.460.200,00	6.603.298.800,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	36.084.205.600,00	35.321.919.620,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	283.005.684,00	474.999.900,00	465.436.200,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	332.047.862,00	2.135.000.000,00	5.414.792.200,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.928.374.688,00	4.557.226.500,00	4.550.295.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	236.938.019,00	267.677.200,00	246.261.200,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.523.876.760,00	3.102.586.000,00	2.546.180.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.411.087.142,00	13.570.000.000,00	31.285.905.100,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	28.302.538.400,00	25.342.004.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.898.175.300,00	28.883.295.500,00	29.263.390.300,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.088.547.700,00	2.133.633.000,00	3.859.985.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	391.854.024,00	450.000.000,00	408.960.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.958.012.406,00	1.245.645.000,00	1.243.884.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	401.775.000,00	636.510.000,00	574.309.400,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	100.000.000,00	5.096.329.100,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	1.880.000.000,00	2.911.921.400,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	8.474.077.100,00	8.553.182.300,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	299.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	108.848.340,00	913.495.000,00	895.440.600,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	424.839.425,00	632.000.000,00	931.072.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	451.720.611,00	738.000.000,00	850.597.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.390.617,00	50.000.000,00	36.751.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.176.966.800,00	3.843.546.800,00	1.530.912.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	108.848.340,00	116.000.000,00	121.799.100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	6.586.589.900,00	6.570.889.700,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	96.330.000,00	79.370.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	335.000.000,00	250.000.000,00	222.161.900,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	182.342.739,00	311.494.739,00	309.844.739,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	195.927.012,00	30.000.000,00	27.230.000,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	111.892.362.199,00	86.389.004.010,00	86.148.777.616,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	189.396.112,00	534.796.000,00	487.691.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.654.494.768,00	1.220.000.000,00	2.217.490.800,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	54.143.905.100,00	56.231.360.947,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	16.840.403.500,00	16.036.544.300,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	153.040.766,00	567.682.000,00	566.167.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	6.779.502.100,00	6.468.869.100,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	21.300.683.000,00	15.886.485.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	19.116.516.800,00	17.481.117.970,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	820.825.332,00	1.950.000.000,00	1.857.558.300,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.406.887.381,00	3.427.500.000,00	3.865.837.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	374.234.743,00	288.150.000,00	188.830.600,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	8.275.000.000,00	8.138.365.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	136.060.425,00	3.371.756.000,00	3.353.159.500,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	250.543.125,00	290.000.000,00	286.535.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.616.228.978,00	2.993.804.800,00	2.683.127.600,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	153.507.964.068,00	129.366.649.148,00	132.931.223.454,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.257.478.308,00	6.100.000.000,00	4.188.886.600,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	151.516.889,00	537.850.000,00	587.850.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	375.000.000,00	352.959.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.809.000.000,00	172.668.000,00	154.655.500,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	174.378.094,00	195.000.000,00	406.941.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.553.479.341,00	72.658.250.000,00	117.141.036.100,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	7.122.994.700,00	6.094.975.700,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	32.654.502,00	92.994.500,00	87.284.200,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	300.908.287.302,00	286.807.759.570,00	305.867.961.146,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	272.120.850,00	336.300.000,00	319.679.200,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	244.865.803,00	218.828.300,00	182.504.300,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	9.097.649.300,00	9.552.375.569,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	168.714.927,00	2.363.512.900,00	2.564.800.400,00



KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	7.122.994.700,00	6.094.975.700,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	32.654.502,00	92.994.500,00	87.284.200,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	300.908.287.302,00	286.807.759.570,00	305.867.961.146,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	272.120.850,00	336.300.000,00	319.679.200,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	244.865.803,00	218.828.300,00	182.504.300,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.166.847.186,00	9.097.649.300,00	9.552.375.569,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	168.714.927,00	2.363.512.900,00	2.564.800.400,00

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA.

LAMPIRAN VIII

**SINKRONISASI PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PADA RKPD DAN PPAS DENGAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG APBD**



KABUPATEN TABANAN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000						DINAS PENDIDIKAN	540.780.431.716,00	499.544.767.483,00	494.544.767.483,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	528.566.546.016,00	487.780.881.783,00	487.780.879.783,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	528.566.546.016,00	487.780.881.783,00	487.780.879.783,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86.148.777.616,00	86.148.777.616,00	86.148.777.616,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	47.699.483.010,00	47.699.483.010,00	47.699.483.010,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.462.926.210,00	2.462.926.210,00	2.462.926.210,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.185.704.800,00	4.185.704.800,00	4.185.704.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	49.055.000,00	49.055.000,00	49.055.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.741.850.000,00	38.741.850.000,00	38.741.850.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	28.950.000,00	28.950.000,00	28.950.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	28.470.000,00	28.470.000,00	28.470.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	48.470.000,00	48.470.000,00	48.470.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	18.350.000,00	18.350.000,00	18.350.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	9.454.000,00	9.454.000,00	9.454.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	27.555.000,00	27.555.000,00	27.555.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	24.340.000,00	24.340.000,00	24.340.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	38.374.000,00	38.374.000,00	38.374.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	77.390.000,00	77.390.000,00	77.390.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	857.794.000,00	857.794.000,00	857.794.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.480.735.606,00	27.480.735.606,00	27.480.735.606,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.110.206.000,00	1.110.206.000,00	1.110.206.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	90.405.600,00	90.405.600,00	90.405.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.794.914.700,00	3.794.914.700,00	3.794.914.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	47.975.000,00	47.975.000,00	47.975.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	246.276.400,00	246.276.400,00	246.276.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	21.593.287.906,00	21.593.287.906,00	21.593.287.906,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	27.750.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	28.650.000,00	28.650.000,00	28.650.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	47.750.000,00	47.750.000,00	47.750.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	28.845.000,00	28.845.000,00	28.845.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.410.000,00	28.410.000,00	28.410.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	47.240.000,00	47.240.000,00	47.240.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	27.825.000,00	27.825.000,00	27.825.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.104.510.000,00	10.104.510.000,00	10.104.510.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	992.722.000,00	992.722.000,00	992.722.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	202.376.000,00	202.376.000,00	202.376.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	21.805.000,00	21.805.000,00	21.805.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.482.070.000,00	6.482.070.000,00	6.482.070.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	24.235.000,00	24.235.000,00	24.235.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.599.862.000,00	1.599.862.000,00	1.599.862.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	864.049.000,00	864.049.000,00	864.049.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	5.423.000,00	5.423.000,00	5.423.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	461.300.000,00	461.300.000,00	461.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.423.000,00	5.423.000,00	5.423.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.423.000,00	5.423.000,00	5.423.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.423.000,00	5.423.000,00	5.423.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	311.853.000,00	311.853.000,00	311.853.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	246.261.200,00	246.261.200,00	246.261.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	246.261.200,00	246.261.200,00	246.261.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	193.280.000,00	193.280.000,00	193.280.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	52.981.200,00	52.981.200,00	52.981.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	442.021.507.200,00	401.235.842.967,00	401.235.840.967,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	438.684.473.000,00	397.898.808.767,00	397.898.806.767,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	438.681.973.000,00	397.896.308.767,00	397.896.306.767,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.111.000,00	186.111.000,00	186.111.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.499.000,00	7.499.000,00	7.499.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.942.000,00	11.942.000,00	11.942.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.884.000,00	104.884.000,00	104.884.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.786.000,00	11.786.000,00	11.786.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.312.900,00	58.312.900,00	58.312.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.312.900,00	58.312.900,00	58.312.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.953.882.300,00	2.953.882.300,00	2.953.882.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.768.882.300,00	2.768.882.300,00	2.768.882.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.728.000,00	133.728.000,00	133.728.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.728.000,00	133.728.000,00	133.728.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.213.885.700,00	11.763.885.700,00	6.763.887.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.213.885.700,00	11.763.885.700,00	6.763.887.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.037.850.000,00	587.850.000,00	587.850.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.017.850.000,00	567.850.000,00	567.850.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	1.000.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.176.035.700,00	11.176.035.700,00	6.176.037.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.290.673.700,00	1.290.673.700,00	1.290.673.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.290.673.700,00	1.290.673.700,00	1.290.673.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	720.364.000,00	720.364.000,00	720.364.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	720.364.000,00	720.364.000,00	720.364.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	9.164.998.000,00	9.164.998.000,00	4.165.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	9.014.998.000,00	9.014.998.000,00	4.015.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						DINAS KESEHATAN	312.656.950.963,00	304.121.192.147,00	304.674.640.393,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	312.656.950.963,00	304.121.192.147,00	304.674.640.393,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	312.656.950.963,00	304.121.192.147,00	304.674.640.393,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.166.770.208,00	71.166.770.208,00	71.600.218.454,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.622.373.546,00	10.622.373.546,00	10.502.373.546,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	556.400.000,00	556.400.000,00	436.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	2.406.692.000,00	2.406.692.000,00	2.406.692.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	713.479.000,00	713.479.000,00	713.479.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	499.655.000,00	499.655.000,00	499.655.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	217.658.240,00	217.658.240,00	217.658.240,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.174.075.106,00	6.174.075.106,00	6.174.075.106,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	54.414.200,00	54.414.200,00	54.414.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.432.632.162,00	60.432.632.162,00	60.986.080.408,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.136.000,00	19.136.000,00	19.136.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.168.000,00	210.168.000,00	210.168.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.411.000,00	9.411.000,00	9.411.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.403.000,00	9.403.000,00	9.403.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.620.000,00	23.620.000,00	23.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28.845.000,00	28.845.000,00	28.845.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	684.299.000,00	684.299.000,00	684.299.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.308.000,00	7.308.000,00	7.308.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.576.000,00	8.576.000,00	8.576.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.127.000,00	15.127.000,00	15.127.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	168.550.000,00	168.550.000,00	168.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	273.174.700,00	273.174.700,00	273.174.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.251.800,00	14.251.800,00	14.251.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	55.316.000,00	55.316.000,00	55.316.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	121.772.760,00	121.772.760,00	121.772.760,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	167.838.100,00	167.838.100,00	167.838.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	9.505.000,00	9.505.000,00	9.505.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91.304.000,00	91.304.000,00	91.304.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.460.189.600,00	2.460.189.600,00	2.460.189.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	54.082.339.152,00	54.082.339.152,00	54.635.787.398,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	239.184.000,00	239.184.000,00	239.184.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	182.132.000,00	182.132.000,00	182.132.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38.620.000,00	38.620.000,00	38.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.664.000,00	14.664.000,00	14.664.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	814.356.150,00	814.356.150,00	814.356.150,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	16.063.000,00	16.063.000,00	16.063.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.856.000,00	4.856.000,00	4.856.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	57.584.000,00	57.584.000,00	57.584.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23.791.000,00	23.791.000,00	23.791.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	29.241.000,00	29.241.000,00	29.241.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	539.248.900,00	539.248.900,00	539.248.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	48.148.500,00	48.148.500,00	48.148.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	48.148.500,00	48.148.500,00	48.148.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.616.000,00	63.616.000,00	63.616.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.175.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	23.689.000,00	23.689.000,00	23.689.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	14.232.000,00	14.232.000,00	14.232.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.243.884.000,00	1.243.884.000,00	1.243.884.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	9.568.000,00	9.568.000,00	9.568.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	9.568.000,00	9.568.000,00	9.568.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	147.002.000,00	147.002.000,00	147.002.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.682.000,00	9.682.000,00	9.682.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137.320.000,00	137.320.000,00	137.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.087.314.000,00	1.087.314.000,00	1.087.314.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.087.314.000,00	1.087.314.000,00	1.087.314.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	309.844.739,00	309.844.739,00	309.844.739,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84.617.739,00	84.617.739,00	84.617.739,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84.617.739,00	84.617.739,00	84.617.739,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	14.310.000,00	14.310.000,00	14.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	14.310.000,00	14.310.000,00	14.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	16.540.000,00	16.540.000,00	16.540.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	16.540.000,00	16.540.000,00	16.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	194.377.000,00	194.377.000,00	194.377.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	194.377.000,00	194.377.000,00	194.377.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	391.285.000,00	391.285.000,00	391.285.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	363.285.000,00	363.285.000,00	363.285.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	363.285.000,00	363.285.000,00	363.285.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	239.545.167.016,00	231.009.408.200,00	231.129.408.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.862.000,00	4.862.000,00	4.862.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.931.000,00	2.931.000,00	2.931.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.931.000,00	1.931.000,00	1.931.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	234.313.071.000,00	225.954.832.184,00	225.954.832.184,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	234.305.896.000,00	225.947.657.184,00	225.947.657.184,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.738.000,00	4.738.000,00	4.738.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.437.000,00	2.437.000,00	2.437.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.792.000,00	57.792.000,00	57.792.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.792.000,00	57.792.000,00	57.792.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.674.800,00	266.674.800,00	266.674.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.471.800,00	9.471.800,00	9.471.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.013.000,00	43.013.000,00	43.013.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.940.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	125.476.000,00	125.476.000,00	125.476.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.044.000,00	40.044.000,00	40.044.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.971.600,00	49.971.600,00	169.971.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.971.600,00	49.971.600,00	49.971.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	120.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.425.302.016,00	4.425.302.016,00	4.425.302.016,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.995.600,00	349.995.600,00	349.995.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.065.306.416,00	4.065.306.416,00	4.065.306.416,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.493.600,00	249.973.600,00	249.973.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322.093.600,00	199.973.600,00	199.973.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.400.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						PUSKESMAS BATURITI 1	3.514.349.735,00	3.514.349.735,00	3.514.349.735,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	834.817.000,00	834.817.000,00	834.817.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	834.817.000,00	834.817.000,00	834.817.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55.584.000,00	55.584.000,00	55.584.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.960.000,00	30.960.000,00	30.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	43.394.000,00	43.394.000,00	43.394.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	219.797.000,00	219.797.000,00	219.797.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64.680.000,00	64.680.000,00	64.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	86.820.000,00	86.820.000,00	86.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	169.839.000,00	169.839.000,00	169.839.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	37.560.000,00	37.560.000,00	37.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.323.000,00	4.323.000,00	4.323.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	27.240.000,00	27.240.000,00	27.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.650.732.735,00	2.650.732.735,00	2.650.732.735,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.650.732.735,00	2.650.732.735,00	2.650.732.735,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.650.732.735,00	2.650.732.735,00	2.650.732.735,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						PUSKESMAS BATURITI 2	1.705.871.498,00	1.705.871.498,00	1.705.871.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	512.029.000,00	512.029.000,00	512.029.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	512.029.000,00	512.029.000,00	512.029.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.200.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.787.000,00	23.787.000,00	23.787.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	143.162.000,00	143.162.000,00	143.162.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47.100.000,00	47.100.000,00	47.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.400.000,00	140.400.000,00	140.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.793.000,00	7.793.000,00	7.793.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.793.000,00	7.793.000,00	7.793.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.793.000,00	7.793.000,00	7.793.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.186.049.498,00	1.186.049.498,00	1.186.049.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.186.049.498,00	1.186.049.498,00	1.186.049.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.186.049.498,00	1.186.049.498,00	1.186.049.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						PUSKESMAS KEDIRI 1	4.460.777.379,00	4.455.777.379,00	4.455.777.379,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	914.969.000,00	914.969.000,00	914.969.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	914.969.000,00	914.969.000,00	914.969.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.976.000,00	20.976.000,00	20.976.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	60.240.000,00	60.240.000,00	60.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.560.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	326.318.000,00	326.318.000,00	326.318.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.111.000,00	2.111.000,00	2.111.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.560.000,00	81.560.000,00	81.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	196.550.000,00	196.550.000,00	196.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	25.794.000,00	25.794.000,00	25.794.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	17.460.000,00	17.460.000,00	17.460.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.075.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.075.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.075.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.537.733.379,00	3.532.733.379,00	3.532.733.379,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.537.733.379,00	3.532.733.379,00	3.532.733.379,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.537.733.379,00	3.532.733.379,00	3.532.733.379,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						PUSKESMAS KEDIRI 2	1.449.251.000,00	1.449.251.000,00	1.449.251.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	468.951.000,00	468.951.000,00	468.951.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.951.000,00	468.951.000,00	468.951.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.640.000,00	28.640.000,00	28.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.027.000,00	27.027.000,00	27.027.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131.489.000,00	131.489.000,00	131.489.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.740.000,00	19.740.000,00	19.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39.720.000,00	39.720.000,00	39.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.555.000,00	110.555.000,00	110.555.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						PUSKESMAS KEDIRI 3	1.740.909.549,00	1.740.909.549,00	1.740.909.549,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	461.571.000,00	461.571.000,00	461.571.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	461.571.000,00	461.571.000,00	461.571.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.960.000,00	32.960.000,00	32.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.840.000,00	18.840.000,00	18.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	136.491.000,00	136.491.000,00	136.491.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	420.000,00	420.000,00	420.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	67.160.000,00	67.160.000,00	67.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.380.000,00	144.380.000,00	144.380.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.617.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.272.721.549,00	1.272.721.549,00	1.272.721.549,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.272.721.549,00	1.272.721.549,00	1.272.721.549,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.272.721.549,00	1.272.721.549,00	1.272.721.549,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						PUSKESMAS KERAMBITAN 1	2.175.229.606,00	2.175.229.606,00	2.175.229.606,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	533.930.000,00	533.930.000,00	533.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	533.930.000,00	533.930.000,00	533.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.577.000,00	20.577.000,00	20.577.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.900.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.880.000,00	27.880.000,00	27.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.018.000,00	175.018.000,00	175.018.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.165.000,00	13.165.000,00	13.165.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59.145.000,00	59.145.000,00	59.145.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.605.000,00	140.605.000,00	140.605.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.629.079.606,00	1.629.079.606,00	1.629.079.606,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.629.079.606,00	1.629.079.606,00	1.629.079.606,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.629.079.606,00	1.629.079.606,00	1.629.079.606,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						PUSKESMAS KERAMBITAN 2	1.904.522.201,00	1.904.522.201,00	1.904.522.201,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	437.996.000,00	437.996.000,00	437.996.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	437.996.000,00	437.996.000,00	437.996.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.720.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.677.000,00	14.677.000,00	14.677.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.120.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.480.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.980.000,00	80.980.000,00	80.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.010.000,00	34.010.000,00	34.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	149.629.000,00	149.629.000,00	149.629.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	27.520.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.461.486.201,00	1.461.486.201,00	1.461.486.201,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.461.486.201,00	1.461.486.201,00	1.461.486.201,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.461.486.201,00	1.461.486.201,00	1.461.486.201,00
1.02.0.00.0.00.01.0008						PUSKESMAS MARGA 1	2.736.219.893,00	2.736.219.893,00	2.736.219.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	730.607.000,00	730.607.000,00	730.607.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	730.607.000,00	730.607.000,00	730.607.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135.840.000,00	135.840.000,00	135.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.360.000,00	36.360.000,00	36.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.980.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	177.554.000,00	177.554.000,00	177.554.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.120.000,00	33.120.000,00	33.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	152.886.000,00	152.886.000,00	152.886.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	50.430.000,00	50.430.000,00	50.430.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	897.000,00	897.000,00	897.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.173.000,00	8.173.000,00	8.173.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.173.000,00	8.173.000,00	8.173.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.173.000,00	8.173.000,00	8.173.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.997.439.893,00	1.997.439.893,00	1.997.439.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.997.439.893,00	1.997.439.893,00	1.997.439.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.997.439.893,00	1.997.439.893,00	1.997.439.893,00
1.02.0.00.0.00.01.0009						PUSKESMAS MARGA 2	1.841.931.924,00	1.841.931.924,00	1.841.931.924,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	455.990.000,00	455.990.000,00	455.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	455.990.000,00	455.990.000,00	455.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.488.000,00	19.488.000,00	19.488.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	151.107.000,00	151.107.000,00	151.107.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.620.000,00	28.620.000,00	28.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.898.000,00	38.898.000,00	38.898.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	91.960.000,00	91.960.000,00	91.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.457.000,00	9.457.000,00	9.457.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.605.000,00	9.605.000,00	9.605.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.605.000,00	9.605.000,00	9.605.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.605.000,00	9.605.000,00	9.605.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.376.336.924,00	1.376.336.924,00	1.376.336.924,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.376.336.924,00	1.376.336.924,00	1.376.336.924,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.376.336.924,00	1.376.336.924,00	1.376.336.924,00
1.02.0.00.0.00.01.0010						PUSKESMAS PENEDEL 1	3.536.345.745,00	3.536.345.745,00	3.536.345.745,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	787.518.000,00	787.518.000,00	787.518.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	787.518.000,00	787.518.000,00	787.518.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.987.000,00	96.987.000,00	96.987.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	48.960.000,00	48.960.000,00	48.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.720.000,00	24.720.000,00	24.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	224.336.000,00	224.336.000,00	224.336.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.420.000,00	88.420.000,00	88.420.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	166.035.000,00	166.035.000,00	166.035.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	33.120.000,00	33.120.000,00	33.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	16.560.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	31.680.000,00	31.680.000,00	31.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.748.827.745,00	2.748.827.745,00	2.748.827.745,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.748.827.745,00	2.748.827.745,00	2.748.827.745,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.748.827.745,00	2.748.827.745,00	2.748.827.745,00
1.02.0.00.0.00.01.0011						PUSKESMAS PENEDEL 2	2.184.188.419,00	2.184.188.419,00	2.184.188.419,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	631.696.000,00	631.696.000,00	631.696.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	631.696.000,00	631.696.000,00	631.696.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.767.000,00	90.767.000,00	90.767.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.120.000,00	39.120.000,00	39.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.880.000,00	122.880.000,00	122.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.310.000,00	11.310.000,00	11.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45.420.000,00	45.420.000,00	45.420.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.700.000,00	92.700.000,00	92.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.039.000,00	155.039.000,00	155.039.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.916.000,00	17.916.000,00	17.916.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	264.000,00	264.000,00	264.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.995.000,00	6.995.000,00	6.995.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.545.497.419,00	1.545.497.419,00	1.545.497.419,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.545.497.419,00	1.545.497.419,00	1.545.497.419,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.545.497.419,00	1.545.497.419,00	1.545.497.419,00
1.02.0.00.0.00.01.0012						PUSKESMAS PUPUAN 1	2.701.162.221,00	2.701.162.221,00	2.701.162.221,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	605.176.000,00	605.176.000,00	605.176.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	605.176.000,00	605.176.000,00	605.176.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	105.216.000,00	105.216.000,00	105.216.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	65.580.000,00	65.580.000,00	65.580.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.200.000,00	91.200.000,00	91.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.393.000,00	158.393.000,00	158.393.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	31.067.000,00	31.067.000,00	31.067.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.620.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.620.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.620.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.088.366.221,00	2.088.366.221,00	2.088.366.221,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.088.366.221,00	2.088.366.221,00	2.088.366.221,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.088.366.221,00	2.088.366.221,00	2.088.366.221,00
1.02.0.00.0.00.01.0013						PUSKESMAS PUPUAN 2	2.036.238.762,00	2.036.238.762,00	2.036.238.762,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	671.947.000,00	671.947.000,00	671.947.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	671.947.000,00	671.947.000,00	671.947.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80.040.000,00	80.040.000,00	80.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.680.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.640.000,00	17.640.000,00	17.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	181.758.000,00	181.758.000,00	181.758.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.840.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.980.000,00	25.980.000,00	25.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	68.280.000,00	68.280.000,00	68.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.092.000,00	142.092.000,00	142.092.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	39.480.000,00	39.480.000,00	39.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	757.000,00	757.000,00	757.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.253.000,00	14.253.000,00	14.253.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.253.000,00	14.253.000,00	14.253.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.253.000,00	14.253.000,00	14.253.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.350.038.762,00	1.350.038.762,00	1.350.038.762,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.350.038.762,00	1.350.038.762,00	1.350.038.762,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.350.038.762,00	1.350.038.762,00	1.350.038.762,00
1.02.0.00.0.00.01.0014						PUSKESMAS SELEMADEG	3.216.719.999,00	3.216.719.999,00	3.216.719.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.105.349.000,00	1.105.349.000,00	1.105.349.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.105.349.000,00	1.105.349.000,00	1.105.349.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	140.400.000,00	140.400.000,00	140.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.120.000,00	39.120.000,00	39.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	65.520.000,00	65.520.000,00	65.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	300.855.000,00	300.855.000,00	300.855.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.640.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	67.320.000,00	67.320.000,00	67.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	37.920.000,00	37.920.000,00	37.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	119.950.000,00	119.950.000,00	119.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	192.953.000,00	192.953.000,00	192.953.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	32.760.000,00	32.760.000,00	32.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	551.000,00	551.000,00	551.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	35.760.000,00	35.760.000,00	35.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.635.000,00	17.635.000,00	17.635.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.635.000,00	17.635.000,00	17.635.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.635.000,00	17.635.000,00	17.635.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.093.735.999,00	2.093.735.999,00	2.093.735.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.093.735.999,00	2.093.735.999,00	2.093.735.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.093.735.999,00	2.093.735.999,00	2.093.735.999,00
1.02.0.00.0.00.01.0015						PUSKESMAS SELEMADEG BARAT	2.976.206.495,00	2.976.206.495,00	2.976.206.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	998.227.000,00	998.227.000,00	998.227.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	998.227.000,00	998.227.000,00	998.227.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.540.000,00	72.540.000,00	72.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	358.698.000,00	358.698.000,00	358.698.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.560.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	69.199.000,00	69.199.000,00	69.199.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	26.280.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95.904.000,00	95.904.000,00	95.904.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	182.440.000,00	182.440.000,00	182.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	23.015.600,00	23.015.600,00	23.015.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	5.990.400,00	5.990.400,00	5.990.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	47.520.000,00	47.520.000,00	47.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.339.000,00	9.339.000,00	9.339.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.339.000,00	9.339.000,00	9.339.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.339.000,00	9.339.000,00	9.339.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.968.640.495,00	1.968.640.495,00	1.968.640.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.968.640.495,00	1.968.640.495,00	1.968.640.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.968.640.495,00	1.968.640.495,00	1.968.640.495,00
1.02.0.00.0.00.01.0016						PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1	1.637.400.651,00	1.637.400.651,00	1.637.400.651,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	435.466.000,00	435.466.000,00	435.466.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	435.466.000,00	435.466.000,00	435.466.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.360.000,00	24.360.000,00	24.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.620.000,00	13.620.000,00	13.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131.783.000,00	131.783.000,00	131.783.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.320.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.480.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.403.000,00	36.403.000,00	36.403.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33.462.000,00	33.462.000,00	33.462.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.330.000,00	126.330.000,00	126.330.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.108.000,00	9.108.000,00	9.108.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.505.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.505.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.505.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.195.429.651,00	1.195.429.651,00	1.195.429.651,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.195.429.651,00	1.195.429.651,00	1.195.429.651,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.195.429.651,00	1.195.429.651,00	1.195.429.651,00
1.02.0.00.0.00.01.0017						PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2	946.995.332,00	946.995.332,00	946.995.332,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	332.787.000,00	332.787.000,00	332.787.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332.787.000,00	332.787.000,00	332.787.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.152.000,00	49.152.000,00	49.152.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45.290.000,00	45.290.000,00	45.290.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.400.000,00	58.400.000,00	58.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	111.768.000,00	111.768.000,00	111.768.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.312.000,00	6.312.000,00	6.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	608.478.332,00	608.478.332,00	608.478.332,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	608.478.332,00	608.478.332,00	608.478.332,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	608.478.332,00	608.478.332,00	608.478.332,00
1.02.0.00.0.00.01.0018						PUSKESMAS TABANAN 1	2.364.055.080,00	2.364.055.080,00	2.364.055.080,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	635.735.000,00	635.735.000,00	635.735.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	635.735.000,00	635.735.000,00	635.735.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.360.000,00	24.360.000,00	24.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58.560.000,00	58.560.000,00	58.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	121.770.000,00	121.770.000,00	121.770.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.960.000,00	91.960.000,00	91.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	153.178.000,00	153.178.000,00	153.178.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	22.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.720.265.080,00	1.720.265.080,00	1.720.265.080,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.720.265.080,00	1.720.265.080,00	1.720.265.080,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.720.265.080,00	1.720.265.080,00	1.720.265.080,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0019						PUSKESMAS TABANAN 2	2.129.518.620,00	2.129.518.620,00	2.129.518.620,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	488.017.000,00	488.017.000,00	488.017.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	488.017.000,00	488.017.000,00	488.017.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	146.379.000,00	146.379.000,00	146.379.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	53.280.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	61.660.000,00	61.660.000,00	61.660.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	105.471.000,00	105.471.000,00	105.471.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	11.010.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.111.000,00	7.111.000,00	7.111.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.111.000,00	7.111.000,00	7.111.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.111.000,00	7.111.000,00	7.111.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.634.390.620,00	1.634.390.620,00	1.634.390.620,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.634.390.620,00	1.634.390.620,00	1.634.390.620,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.634.390.620,00	1.634.390.620,00	1.634.390.620,00
1.02.0.00.0.00.01.0020						PUSKESMAS TABANAN 3	3.264.796.704,00	3.264.796.704,00	3.264.796.704,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	440.707.000,00	440.707.000,00	440.707.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	440.707.000,00	440.707.000,00	440.707.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.968.000,00	7.968.000,00	7.968.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.959.000,00	33.959.000,00	33.959.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.040.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.355.000,00	80.355.000,00	80.355.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.360.000,00	33.360.000,00	33.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.760.000,00	32.760.000,00	32.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	135.040.000,00	135.040.000,00	135.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	29.760.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	35.545.000,00	35.545.000,00	35.545.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.016.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.819.073.704,00	2.819.073.704,00	2.819.073.704,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.819.073.704,00	2.819.073.704,00	2.819.073.704,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.819.073.704,00	2.819.073.704,00	2.819.073.704,00
1.02.0.00.0.00.01.0021						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN	172.892.728.762,00	172.892.728.762,00	172.892.728.762,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28.892.728.762,00	28.892.728.762,00	28.892.728.762,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.892.728.762,00	28.892.728.762,00	28.892.728.762,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.530.000.000,00	15.530.000.000,00	15.530.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.362.728.762,00	13.362.728.762,00	13.362.728.762,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00	144.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA	64.954.791.238,00	64.954.791.238,00	64.954.791.238,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.954.791.238,00	19.954.791.238,00	19.954.791.238,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.954.791.238,00	14.954.791.238,00	14.954.791.238,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.954.791.238,00	14.954.791.238,00	14.954.791.238,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000						DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	225.024.197.397,00	283.773.887.397,00	290.273.887.397,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	222.453.959.597,00	281.203.649.597,00	282.703.649.597,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.750.759.800,00	11.750.449.800,00	11.750.449.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	267.869.000,00	267.869.000,00	267.869.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	267.869.000,00	267.869.000,00	267.869.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.482.890.800,00	11.482.580.800,00	11.482.580.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.582.443.600,00	9.582.133.600,00	9.582.133.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.900.447.200,00	1.900.447.200,00	1.900.447.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.188.886.600,00	4.188.886.600,00	4.188.886.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.188.886.600,00	4.188.886.600,00	4.188.886.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	38.378.200,00	38.378.200,00	38.378.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.337.670.800,00	2.337.670.800,00	2.337.670.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.712.837.600,00	1.712.837.600,00	1.712.837.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	194.589.000,00	194.589.000,00	194.589.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	194.589.000,00	194.589.000,00	194.589.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	194.589.000,00	194.589.000,00	194.589.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.530.912.700,00	1.530.912.700,00	1.530.912.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.530.912.700,00	1.530.912.700,00	1.530.912.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	49.319.400,00	49.319.400,00	49.319.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	407.500.000,00	407.500.000,00	407.500.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.074.093.300,00	1.074.093.300,00	1.074.093.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	44.252.000,00	44.252.000,00	44.252.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	44.252.000,00	44.252.000,00	44.252.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	2.01	0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	44.252.000,00	44.252.000,00	44.252.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	56.267.314.269,00	61.819.319.269,00	56.417.314.269,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	56.267.314.269,00	61.819.319.269,00	56.417.314.269,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	56.043.508.569,00	61.595.513.569,00	56.193.508.569,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	223.805.700,00	223.805.700,00	223.805.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	74.611.842.128,00	75.727.442.128,00	74.611.842.128,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	74.611.842.128,00	75.727.442.128,00	74.611.842.128,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	74.611.842.128,00	75.727.442.128,00	74.611.842.128,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.541.036.100,00	109.123.431.100,00	117.141.036.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	55.541.036.100,00	109.123.431.100,00	117.141.036.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	32.154.430.500,00	85.736.825.500,00	92.254.430.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	16.860.685.200,00	16.860.685.200,00	18.360.685.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	2.396.242.000,00	2.396.242.000,00	2.396.242.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.729.678.400,00	3.729.678.400,00	3.729.678.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	87.284.200,00	87.284.200,00	87.284.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60.007.500,00	60.007.500,00	60.007.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	37.754.500,00	37.754.500,00	37.754.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	22.253.000,00	22.253.000,00	22.253.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	27.276.700,00	27.276.700,00	27.276.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	27.276.700,00	27.276.700,00	27.276.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	850.597.800,00	850.597.800,00	850.597.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	360.225.200,00	360.225.200,00	360.225.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	360.225.200,00	360.225.200,00	360.225.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	307.516.900,00	307.516.900,00	307.516.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	121.206.400,00	121.206.400,00	121.206.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	186.310.500,00	186.310.500,00	186.310.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	133.405.000,00	133.405.000,00	133.405.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	133.405.000,00	133.405.000,00	133.405.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	49.450.700,00	49.450.700,00	49.450.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	49.450.700,00	49.450.700,00	49.450.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.386.485.000,00	15.886.485.000,00	15.886.485.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.360.200,00	6.360.200,00	6.360.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.900.200,00	3.900.200,00	3.900.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.976.025.600,00	13.476.025.600,00	13.476.025.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.922.310.400,00	13.422.310.400,00	13.422.310.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.356.800,00	49.356.800,00	49.356.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.358.400,00	4.358.400,00	4.358.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.084.200,00	135.084.200,00	135.084.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.744.200,00	6.744.200,00	6.744.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.443.500,00	4.443.500,00	4.443.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.062.600,00	11.062.600,00	11.062.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	13.305.600,00	13.305.600,00	13.305.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.428.300,00	4.428.300,00	4.428.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.089.600,00	168.089.600,00	168.089.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.089.600,00	168.089.600,00	168.089.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.611.446.000,00	1.611.446.000,00	1.611.446.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.306.446.000,00	1.306.446.000,00	1.306.446.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.479.400,00	489.479.400,00	489.479.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.498.600,00	86.498.600,00	86.498.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	270.530.800,00	270.530.800,00	270.530.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.450.000,00	132.450.000,00	132.450.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.473.908.700,00	2.473.908.700,00	2.473.908.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	809.920.300,00	809.920.300,00	809.920.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	44.746.000,00	44.746.000,00	44.746.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	22.373.000,00	22.373.000,00	22.373.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.373.000,00	22.373.000,00	22.373.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60.077.400,00	60.077.400,00	60.077.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	23.016.000,00	23.016.000,00	23.016.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	37.061.400,00	37.061.400,00	37.061.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	705.096.900,00	705.096.900,00	705.096.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	296.110.000,00	296.110.000,00	296.110.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	408.986.900,00	408.986.900,00	408.986.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.344.309.200,00	1.344.309.200,00	1.344.309.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	56.159.200,00	56.159.200,00	56.159.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	20.429.700,00	20.429.700,00	20.429.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	35.729.500,00	35.729.500,00	35.729.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	194.617.000,00	194.617.000,00	194.617.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	194.617.000,00	194.617.000,00	194.617.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.093.533.000,00	1.093.533.000,00	1.093.533.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.093.533.000,00	1.093.533.000,00	1.093.533.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	319.679.200,00	319.679.200,00	319.679.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	319.679.200,00	319.679.200,00	319.679.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	49.842.600,00	49.842.600,00	49.842.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	208.999.600,00	208.999.600,00	208.999.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	60.837.000,00	60.837.000,00	60.837.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	96.329.100,00	96.329.100,00	5.096.329.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	96.329.100,00	96.329.100,00	5.096.329.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	96.329.100,00	96.329.100,00	5.096.329.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	96.329.100,00	96.329.100,00	5.096.329.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	96.329.100,00	96.329.100,00	5.096.329.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.490.004.800,00	20.489.856.600,00	20.489.856.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.490.004.800,00	20.489.856.600,00	20.489.856.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.490.004.800,00	20.489.856.600,00	20.489.856.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	487.691.500,00	487.691.500,00	487.691.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	360.660.900,00	360.660.900,00	360.660.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	41.028.700,00	41.028.700,00	41.028.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.948.600,00	37.948.600,00	37.948.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	92.025.200,00	92.025.200,00	92.025.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.023.000,00	18.023.000,00	18.023.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	153.612.400,00	153.612.400,00	153.612.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	18.023.000,00	18.023.000,00	18.023.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	113.244.600,00	113.244.600,00	113.244.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	19.235.600,00	19.235.600,00	19.235.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	94.009.000,00	94.009.000,00	94.009.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	13.786.000,00	13.786.000,00	13.786.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	5.736.500,00	5.736.500,00	5.736.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	8.049.500,00	8.049.500,00	8.049.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	465.436.200,00	465.436.200,00	465.436.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	465.436.200,00	465.436.200,00	465.436.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.379.500,00	71.379.500,00	71.379.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	170.966.600,00	170.966.600,00	170.966.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	23.309.100,00	23.309.100,00	23.309.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	199.781.000,00	199.781.000,00	199.781.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.536.877.100,00	19.536.728.900,00	19.536.728.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.728.700,00	4.728.700,00	4.728.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.821.000,00	2.821.000,00	2.821.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.907.700,00	1.907.700,00	1.907.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.815.233.300,00	13.815.233.300,00	13.815.233.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.812.828.000,00	13.812.828.000,00	13.812.828.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.405.300,00	2.405.300,00	2.405.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.296.300,00	6.296.300,00	6.296.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.496.300,00	4.496.300,00	4.496.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.452.500,00	115.452.500,00	115.452.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.910.000,00	71.910.000,00	71.910.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.845.000,00	17.845.000,00	17.845.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8.997.500,00	8.997.500,00	8.997.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	464.713.100,00	464.564.900,00	464.564.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	364.933.000,00	364.933.000,00	364.933.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.780.100,00	99.631.900,00	99.631.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.995.473.500,00	4.995.473.500,00	4.995.473.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.873.500,00	50.873.500,00	50.873.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.940.600.000,00	4.940.600.000,00	4.940.600.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.979.700,00	134.979.700,00	134.979.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.999.700,00	119.999.700,00	119.999.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.485.923.100,00	6.352.923.100,00	6.367.497.100,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	562.221.200,00	562.221.200,00	562.221.200,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	167.203.800,00	167.203.800,00	167.203.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	19.478.000,00	19.478.000,00	19.478.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	23.731.300,00	23.731.300,00	23.731.300,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	23.994.500,00	23.994.500,00	23.994.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	349.212.400,00	349.212.400,00	349.212.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	349.212.400,00	349.212.400,00	349.212.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	25.805.000,00	25.805.000,00	25.805.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	25.805.000,00	25.805.000,00	25.805.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.923.701.900,00	5.790.701.900,00	5.805.275.900,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.760.900,00	4.760.900,00	4.760.900,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.644.500,00	2.644.500,00	2.644.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.116.400,00	2.116.400,00	2.116.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.304.389.400,00	4.171.389.400,00	4.171.437.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.302.158.000,00	4.169.158.000,00	4.169.206.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.231.400,00	2.231.400,00	2.231.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.800.500,00	55.800.500,00	46.552.100,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.500,00	1.997.500,00	1.997.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	20.251.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.880.700,00	3.880.700,00	3.880.700,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8.870.000,00	8.870.000,00	8.870.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.868.000,00	6.868.000,00	6.868.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.684.900,00	4.684.900,00	4.684.900,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.323.800,00	258.323.800,00	258.323.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.323.800,00	258.323.800,00	258.323.800,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.394.600,00	1.166.394.600,00	1.175.594.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.997.000,00	41.997.000,00	51.197.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.122.397.600,00	1.122.397.600,00	1.122.397.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.032.700,00	134.032.700,00	148.606.700,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.755.400,00	92.755.400,00	92.755.400,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.277.300,00	41.277.300,00	55.851.300,00
1.06.2.08.0.00.01.0000						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.504.474.600,00	16.204.432.400,00	16.204.432.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.817.469.000,00	12.517.426.800,00	12.517.426.800,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.414.792.200,00	5.414.792.200,00	5.414.792.200,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	5.414.792.200,00	5.414.792.200,00	5.414.792.200,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18.568.000,00	18.568.000,00	18.568.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	174.229.000,00	174.229.000,00	174.229.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.481.200,00	23.481.200,00	23.481.200,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.198.514.000,00	5.198.514.000,00	5.198.514.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	408.960.000,00	408.960.000,00	408.960.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	372.870.000,00	372.870.000,00	372.870.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	72.870.000,00	72.870.000,00	72.870.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	36.090.000,00	36.090.000,00	36.090.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	36.090.000,00	36.090.000,00	36.090.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	27.230.000,00	27.230.000,00	27.230.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27.230.000,00	27.230.000,00	27.230.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27.230.000,00	27.230.000,00	27.230.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	224.265.000,00	224.265.000,00	224.265.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	224.265.000,00	224.265.000,00	224.265.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	224.265.000,00	224.265.000,00	224.265.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.742.221.800,00	6.442.179.600,00	6.442.179.600,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.623.000,00	4.623.000,00	4.623.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.038.331.000,00	5.738.331.000,00	5.738.331.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.038.331.000,00	5.738.331.000,00	5.738.331.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.807.200,00	87.807.200,00	87.807.200,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.700,00	2.999.700,00	2.999.700,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.227.500,00	58.227.500,00	58.227.500,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.868.000,00	6.868.000,00	6.868.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.862.000,00	4.862.000,00	4.862.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.981.400,00	49.981.400,00	49.981.400,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.981.400,00	49.981.400,00	49.981.400,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.497.600,00	501.455.400,00	501.455.400,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.997.600,00	419.955.400,00	419.955.400,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.981.600,00	59.981.600,00	59.981.600,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.991.600,00	49.991.600,00	49.991.600,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.687.005.600,00	3.687.005.600,00	3.687.005.600,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.687.005.600,00	3.687.005.600,00	3.687.005.600,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	19.219.000,00	19.219.000,00	19.219.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	19.219.000,00	19.219.000,00	19.219.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	19.219.000,00	19.219.000,00	19.219.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3.353.159.500,00	3.353.159.500,00	3.353.159.500,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.185.636.000,00	3.185.636.000,00	3.185.636.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.185.636.000,00	3.185.636.000,00	3.185.636.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.023.500,00	66.023.500,00	66.023.500,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	66.023.500,00	66.023.500,00	66.023.500,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	44.777.900,00	44.777.900,00	44.777.900,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22.599.000,00	22.599.000,00	22.599.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22.599.000,00	22.599.000,00	22.599.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.178.900,00	22.178.900,00	22.178.900,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.178.900,00	22.178.900,00	22.178.900,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	269.849.200,00	269.849.200,00	269.849.200,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.269.200,00	70.269.200,00	70.269.200,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	70.269.200,00	70.269.200,00	70.269.200,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165.070.000,00	165.070.000,00	165.070.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	165.070.000,00	165.070.000,00	165.070.000,00
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000,00	34.510.000,00	34.510.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34.510.000,00	34.510.000,00	34.510.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000						DINAS KETAHANAN PANGAN	4.283.174.400,00	4.133.174.400,00	4.146.134.400,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.283.174.400,00	4.133.174.400,00	4.146.134.400,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	377.030.000,00	377.030.000,00	389.990.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	73.712.000,00	73.712.000,00	73.712.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	27.063.000,00	27.063.000,00	27.063.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	13.910.000,00	13.910.000,00	13.910.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	18.631.000,00	18.631.000,00	18.631.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	14.108.000,00	14.108.000,00	14.108.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	143.992.000,00	143.992.000,00	156.952.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	29.280.000,00	29.280.000,00	29.280.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99.952.000,00	99.952.000,00	99.952.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	14.760.000,00	14.760.000,00	27.720.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	159.326.000,00	159.326.000,00	159.326.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	159.326.000,00	159.326.000,00	159.326.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.906.144.400,00	3.756.144.400,00	3.756.144.400,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.874.000,00	4.874.000,00	4.874.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.565.466.000,00	3.415.466.000,00	3.415.466.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.563.113.000,00	3.413.113.000,00	3.413.113.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.631.500,00	62.631.500,00	62.631.500,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.998.500,00	1.998.500,00	1.998.500,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.809.500,00	19.809.500,00	19.809.500,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.824.000,00	14.824.000,00	14.824.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.111.500,00	28.111.500,00	28.111.500,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.111.500,00	28.111.500,00	28.111.500,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.432.400,00	182.432.400,00	182.432.400,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.998.600,00	19.998.600,00	19.998.600,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.433.800,00	161.433.800,00	161.433.800,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.629.000,00	62.629.000,00	62.629.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.989.000,00	47.989.000,00	47.989.000,00
2.09.0.00.0.00.01.0000	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000						DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52.050.181.200,00	49.450.191.700,00	49.450.191.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	52.050.181.200,00	49.450.191.700,00	49.450.191.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	674.298.900,00	574.309.400,00	574.309.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	547.897.100,00	447.907.600,00	447.907.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	384.241.900,00	334.241.900,00	334.241.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	64.655.200,00	64.655.200,00	64.655.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	99.000.000,00	49.010.500,00	49.010.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	93.047.600,00	93.047.600,00	93.047.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	14.121.600,00	14.121.600,00	14.121.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	78.926.000,00	78.926.000,00	78.926.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	33.354.200,00	33.354.200,00	33.354.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	19.355.400,00	19.355.400,00	19.355.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	13.998.800,00	13.998.800,00	13.998.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.052.985.400,00	4.052.985.400,00	3.859.985.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.052.985.400,00	4.052.985.400,00	3.859.985.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.027.867.500,00	4.027.867.500,00	3.834.867.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.117.900,00	25.117.900,00	25.117.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	29.309.490.200,00	29.309.490.200,00	29.309.490.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	29.309.490.200,00	29.309.490.200,00	29.309.490.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	71.333.300,00	71.333.300,00	71.333.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	18.456.717.400,00	18.456.717.400,00	18.456.717.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	10.781.439.500,00	10.781.439.500,00	10.781.439.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.013.406.700,00	15.513.406.700,00	15.706.406.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.984.000,00	3.984.000,00	3.984.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.524.000,00	2.524.000,00	2.524.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.879.036.000,00	13.379.036.000,00	13.379.036.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.876.226.000,00	13.376.226.000,00	13.376.226.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.744.600,00	162.744.600,00	162.744.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.251.900,00	62.251.900,00	62.251.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	16.472.700,00	16.472.700,00	16.472.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.520.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.836.600,00	99.836.600,00	99.836.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.836.600,00	99.836.600,00	99.836.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.525.961.500,00	1.525.961.500,00	1.628.007.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.961.500,00	181.961.500,00	181.961.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	1.442.046.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.844.000,00	341.844.000,00	432.798.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.844.000,00	170.844.000,00	261.798.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.283.065.300,00	9.183.065.300,00	9.183.065.300,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.283.065.300,00	9.183.065.300,00	9.183.065.300,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	808.896.700,00	708.896.700,00	708.896.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	808.896.700,00	708.896.700,00	708.896.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	808.896.700,00	708.896.700,00	708.896.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.217.490.800,00	2.217.490.800,00	2.217.490.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	2.217.490.800,00	2.217.490.800,00	2.217.490.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.199.158.800,00	2.199.158.800,00	2.199.158.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	18.332.000,00	18.332.000,00	18.332.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	161.702.100,00	161.702.100,00	161.702.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	48.258.800,00	48.258.800,00	48.258.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48.258.800,00	48.258.800,00	48.258.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.443.300,00	113.443.300,00	113.443.300,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.443.300,00	113.443.300,00	113.443.300,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.094.975.700,00	6.094.975.700,00	6.094.975.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.636.900,00	4.636.900,00	4.636.900,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.707.500,00	2.707.500,00	2.707.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.929.400,00	1.929.400,00	1.929.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.498.340.000,00	4.498.340.000,00	4.498.340.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.495.840.000,00	4.495.840.000,00	4.495.840.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.564.500,00	125.564.500,00	125.564.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.192.400,00	2.192.400,00	2.192.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.496.500,00	3.496.500,00	3.496.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.997.000,00	19.997.000,00	19.997.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.650.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	49.954.100,00	49.954.100,00	49.954.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.290.000,00	14.290.000,00	14.290.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.984.500,00	4.984.500,00	4.984.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	724.244.800,00	724.244.800,00	724.244.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	724.244.800,00	724.244.800,00	724.244.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.664.500,00	615.664.500,00	615.664.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.996.500,00	94.996.500,00	94.996.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.068.000,00	517.068.000,00	517.068.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.525.000,00	126.525.000,00	126.525.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.525.000,00	76.525.000,00	76.525.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.704.921.169,00	13.178.137.169,00	13.178.137.069,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.704.921.169,00	13.178.137.169,00	13.178.137.069,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	27.804.000,00	27.804.000,00	27.804.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	27.804.000,00	27.804.000,00	27.804.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	9.484.000,00	9.484.000,00	9.484.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.559.941.200,00	1.033.157.200,00	1.033.157.100,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.559.941.200,00	1.033.157.200,00	1.033.157.100,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	699.729.800,00	699.729.800,00	699.729.700,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	14.528.000,00	14.528.000,00	14.528.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.880.400,00	8.880.400,00	8.880.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	82.515.000,00	82.515.000,00	82.515.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1.541.312.000,00	14.528.000,00	14.528.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	21.021.000,00	21.021.000,00	21.021.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	4.528.000,00	4.528.000,00	4.528.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	153.127.000,00	153.127.000,00	153.127.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.564.800.400,00	2.564.800.400,00	2.564.800.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.564.800.400,00	2.564.800.400,00	2.564.800.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	239.944.600,00	239.944.600,00	239.944.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	19.580.000,00	19.580.000,00	19.580.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	39.051.900,00	39.051.900,00	39.051.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	19.531.900,00	19.531.900,00	19.531.900,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.036.692.000,00	2.036.692.000,00	2.036.692.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.552.375.569,00	9.552.375.569,00	9.552.375.569,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.709.500,00	4.709.500,00	4.709.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.878.500,00	1.878.500,00	1.878.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.047.403.769,00	6.047.403.769,00	6.047.403.769,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.045.045.769,00	6.045.045.769,00	6.045.045.769,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.235.300,00	58.235.300,00	58.235.300,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.982.200,00	1.982.200,00	1.982.200,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.499.500,00	1.499.500,00	1.499.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.495.600,00	27.495.600,00	27.495.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.758.000,00	9.758.000,00	9.758.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.571.000,00	48.571.000,00	48.571.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.571.000,00	48.571.000,00	48.571.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.340.587.600,00	3.340.587.600,00	3.340.587.600,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.998.100,00	14.998.100,00	14.998.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.324.089.500,00	3.324.089.500,00	3.324.089.500,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.868.400,00	52.868.400,00	52.868.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.988.400,00	49.988.400,00	49.988.400,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.939.334.250,00	11.939.334.250,00	11.939.334.050,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.939.334.250,00	11.939.334.250,00	11.939.334.050,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.550.295.000,00	4.550.295.000,00	4.550.295.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.115.499.000,00	1.115.499.000,00	1.115.499.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	486.842.000,00	486.842.000,00	486.842.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	199.989.000,00	199.989.000,00	199.989.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	103.668.000,00	103.668.000,00	103.668.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.159.914.000,00	1.159.914.000,00	1.159.914.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.159.914.000,00	1.159.914.000,00	1.159.914.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.110.825.000,00	2.110.825.000,00	2.110.825.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	63.892.000,00	63.892.000,00	63.892.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	339.171.000,00	339.171.000,00	339.171.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.634.310.000,00	1.634.310.000,00	1.634.310.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.195.000,00	45.195.000,00	45.195.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	28.257.000,00	28.257.000,00	28.257.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	164.057.000,00	164.057.000,00	164.057.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	14.496.000,00	14.496.000,00	14.496.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	149.561.000,00	149.561.000,00	149.561.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.674.444.450,00	2.674.444.450,00	2.674.444.450,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	251.179.950,00	251.179.950,00	251.179.950,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	41.151.950,00	41.151.950,00	41.151.950,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	80.028.000,00	80.028.000,00	80.028.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.423.264.500,00	2.423.264.500,00	2.423.264.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	73.664.500,00	73.664.500,00	73.664.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.429.594.800,00	4.429.594.800,00	4.429.594.600,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.693.800,00	7.693.800,00	7.693.800,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.306.100,00	4.306.100,00	4.306.100,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.387.700,00	3.387.700,00	3.387.700,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.559.851.200,00	3.559.851.200,00	3.559.851.200,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.556.019.000,00	3.556.019.000,00	3.556.019.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.832.200,00	3.832.200,00	3.832.200,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.367.400,00	140.367.400,00	140.367.400,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.498.600,00	7.498.600,00	7.498.600,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.998.800,00	28.998.800,00	28.998.800,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.859.500,00	29.859.500,00	29.859.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.995.500,00	2.995.500,00	2.995.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.474.000,00	20.474.000,00	20.474.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.541.000,00	45.541.000,00	45.541.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.856.000,00	175.856.000,00	175.855.800,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.856.000,00	175.856.000,00	175.855.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.031.500,00	342.031.500,00	342.031.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.361.000,00	25.361.000,00	25.361.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.170.500,00	313.170.500,00	313.170.500,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.794.900,00	203.794.900,00	203.794.900,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.904.900,00	183.904.900,00	183.904.900,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.890.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						DINAS PERHUBUNGAN	46.229.935.700,00	45.299.934.600,00	45.299.934.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	46.229.935.700,00	45.299.934.600,00	45.299.934.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	29.323.390.500,00	29.263.390.300,00	29.263.390.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17.164.328.500,00	17.154.328.300,00	17.154.328.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.326.236.900,00	2.316.236.700,00	2.316.236.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	14.838.091.600,00	14.838.091.600,00	14.838.091.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	605.837.900,00	555.837.900,00	555.837.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	605.837.900,00	555.837.900,00	555.837.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	307.796.000,00	307.796.000,00	307.796.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	222.930.000,00	222.930.000,00	222.930.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	84.866.000,00	84.866.000,00	84.866.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	996.110.800,00	996.110.800,00	996.110.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	922.094.300,00	922.094.300,00	922.094.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	19.119.200,00	19.119.200,00	19.119.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9.027.850,00	9.027.850,00	9.027.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	45.869.450,00	45.869.450,00	45.869.450,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	18.049.900,00	18.049.900,00	18.049.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	18.049.900,00	18.049.900,00	18.049.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	46.665.400,00	46.665.400,00	46.665.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	46.665.400,00	46.665.400,00	46.665.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.959.602.000,00	9.959.602.000,00	9.959.602.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.959.602.000,00	9.959.602.000,00	9.959.602.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.906.545.200,00	16.036.544.300,00	16.036.544.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.749.500,00	4.749.500,00	4.749.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.846.500,00	2.846.500,00	2.846.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.903.000,00	1.903.000,00	1.903.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.982.498.000,00	9.132.498.000,00	9.132.498.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.980.142.000,00	9.130.142.000,00	9.130.142.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.356.000,00	2.356.000,00	2.356.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.850.300,00	1.850.300,00	1.850.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.850.300,00	1.850.300,00	1.850.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.799.500,00	2.799.500,00	2.799.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.799.500,00	2.799.500,00	2.799.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.294.200,00	162.294.200,00	162.294.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.527.600,00	6.527.600,00	6.527.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.496.000,00	69.496.000,00	69.496.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	28.857.200,00	28.857.200,00	28.857.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.166.000,00	25.166.000,00	25.166.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.493.400,00	4.493.400,00	4.493.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.997.400,00	49.997.400,00	49.997.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.997.400,00	49.997.400,00	49.997.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.189.292.200,00	6.189.292.200,00	6.189.292.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.295.800,00	137.295.800,00	137.295.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.049.996.400,00	6.049.996.400,00	6.049.996.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.064.100,00	493.063.200,00	493.063.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.604.100,00	408.603.200,00	408.603.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.460.000,00	9.460.000,00	9.460.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.838.986.000,00	25.838.986.000,00	25.838.986.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.749.052.000,00	25.749.052.000,00	25.749.052.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.911.921.400,00	2.911.921.400,00	2.911.921.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.911.921.400,00	2.911.921.400,00	2.911.921.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	220.916.400,00	220.916.400,00	220.916.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	397.569.000,00	397.569.000,00	397.569.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.293.436.000,00	2.293.436.000,00	2.293.436.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.138.365.000,00	8.138.365.000,00	8.138.365.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.502.599.101,00	1.502.599.101,00	1.502.599.101,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1.502.599.101,00	1.502.599.101,00	1.502.599.101,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.635.765.899,00	6.635.765.899,00	6.635.765.899,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	20.987.000,00	20.987.000,00	20.987.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	28.804.800,00	28.804.800,00	28.804.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	19.528.000,00	19.528.000,00	19.528.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.536.547.899,00	6.536.547.899,00	6.536.547.899,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	29.898.200,00	29.898.200,00	29.898.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.698.765.600,00	14.698.765.600,00	14.698.765.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.326.651.000,00	6.326.651.000,00	6.326.651.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.324.151.000,00	6.324.151.000,00	6.324.151.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.921.500,00	59.921.500,00	59.921.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.762.000,00	14.762.000,00	14.762.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.501.100,00	4.501.100,00	4.501.100,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	11.998.400,00	11.998.400,00	11.998.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.260.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.549.989.300,00	7.549.989.300,00	7.549.989.300,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.549.989.300,00	7.549.989.300,00	7.549.989.300,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.998.200,00	576.998.200,00	576.998.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.998.200,00	199.998.200,00	199.998.200,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.205.600,00	180.205.600,00	180.205.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.345.600,00	75.345.600,00	75.345.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.860.000,00	104.860.000,00	104.860.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	53.182.600,00	53.182.600,00	53.182.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	53.182.600,00	53.182.600,00	53.182.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.182.600,00	53.182.600,00	53.182.600,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	26.576.800,00	26.576.800,00	26.576.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	26.605.800,00	26.605.800,00	26.605.800,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	36.751.400,00	36.751.400,00	36.751.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	36.751.400,00	36.751.400,00	36.751.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.751.400,00	36.751.400,00	36.751.400,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.751.400,00	36.751.400,00	36.751.400,00
2.17.2.07.0.00.01.0000						DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	8.635.919.000,00	8.335.919.000,00	8.335.919.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	622.005.900,00	622.005.900,00	622.005.900,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	143.462.400,00	143.462.400,00	143.462.400,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	137.963.000,00	137.963.000,00	137.963.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	137.963.000,00	137.963.000,00	137.963.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.499.400,00	5.499.400,00	5.499.400,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.499.400,00	5.499.400,00	5.499.400,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	31.663.500,00	31.663.500,00	31.663.500,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	16.831.500,00	16.831.500,00	16.831.500,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	16.831.500,00	16.831.500,00	16.831.500,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	14.832.000,00	14.832.000,00	14.832.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	14.832.000,00	14.832.000,00	14.832.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	446.880.000,00	446.880.000,00	446.880.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	446.880.000,00	446.880.000,00	446.880.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	446.880.000,00	446.880.000,00	446.880.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.013.913.100,00	7.713.913.100,00	7.713.913.100,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	931.072.000,00	931.072.000,00	931.072.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	931.072.000,00	931.072.000,00	931.072.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	781.072.000,00	781.072.000,00	781.072.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	313.972.000,00	313.972.000,00	313.972.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	313.972.000,00	313.972.000,00	313.972.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	282.057.000,00	282.057.000,00	282.057.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	31.915.000,00	31.915.000,00	31.915.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.768.869.100,00	6.468.869.100,00	6.468.869.100,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.937.000,00	4.937.000,00	4.937.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.291.651.000,00	5.991.651.000,00	5.991.651.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.289.151.000,00	5.989.151.000,00	5.989.151.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.814.000,00	54.814.000,00	54.814.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.314.000,00	12.314.000,00	12.314.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.999.900,00	336.999.900,00	336.999.900,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.999.900,00	304.999.900,00	304.999.900,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.467.200,00	80.467.200,00	80.467.200,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.467.200,00	55.467.200,00	55.467.200,00
2.17.2.07.0.00.01.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.447.911.600,00	9.126.083.924,00	9.125.688.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.447.911.600,00	9.126.083.924,00	9.125.688.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	182.504.300,00	182.504.300,00	182.504.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	182.504.300,00	182.504.300,00	182.504.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	158.896.300,00	158.896.300,00	158.896.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	23.608.000,00	23.608.000,00	23.608.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	188.830.600,00	188.830.600,00	188.830.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.830.600,00	188.830.600,00	188.830.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25.674.800,00	25.674.800,00	25.674.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	85.449.800,00	85.449.800,00	85.449.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	77.706.000,00	77.706.000,00	77.706.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.076.576.700,00	8.754.749.024,00	8.754.353.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.790.000,00	254.790.000,00	254.790.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.786.504.000,00	6.286.504.000,00	6.286.504.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.784.151.000,00	6.284.151.000,00	6.284.151.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.353.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.840.600,00	121.840.100,00	121.840.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.662.200,00	4.662.200,00	4.662.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.199.400,00	21.199.400,00	21.199.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.435.000,00	69.434.500,00	69.434.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.054.000,00	3.054.000,00	3.054.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8.942.000,00	8.942.000,00	8.942.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.863.000,00	9.863.000,00	9.863.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.685.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.360.500,00	418.533.324,00	374.304.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.360.500,00	418.533.324,00	374.304.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.398.800,00	1.556.398.800,00	1.556.398.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.300.000,00	260.300.000,00	260.300.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.293.098.800,00	1.293.098.800,00	1.293.098.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.682.800,00	116.682.800,00	160.516.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.992.800,00	54.992.800,00	54.992.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.690.000,00	61.690.000,00	105.523.900,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000						DINAS KEBUDAYAAN	51.283.102.800,00	50.264.002.800,00	50.264.002.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	51.283.102.800,00	50.264.002.800,00	50.264.002.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	28.044.706.800,00	28.044.706.800,00	28.044.706.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.754.790.600,00	13.754.790.600,00	13.754.790.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	825.000.000,00	825.000.000,00	825.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	12.929.790.600,00	12.929.790.600,00	12.929.790.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	81.763.000,00	81.763.000,00	81.763.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	48.074.000,00	48.074.000,00	48.074.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	33.689.000,00	33.689.000,00	33.689.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.208.153.200,00	14.208.153.200,00	14.208.153.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	14.112.519.200,00	14.112.519.200,00	14.112.519.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	68.212.500,00	68.212.500,00	68.212.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	27.421.500,00	27.421.500,00	27.421.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	12.099.110.000,00	12.099.110.000,00	12.099.110.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.099.110.000,00	12.099.110.000,00	12.099.110.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	8.126.073.000,00	8.126.073.000,00	8.126.073.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	210.211.000,00	210.211.000,00	210.211.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.762.826.000,00	3.762.826.000,00	3.762.826.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	352.959.000,00	352.959.000,00	352.959.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	352.959.000,00	352.959.000,00	352.959.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	352.959.000,00	352.959.000,00	352.959.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	365.832.000,00	365.832.000,00	365.832.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	801.295.000,00	801.295.000,00	801.295.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	22.873.000,00	22.873.000,00	22.873.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.596.327.000,00	8.577.227.000,00	8.577.227.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.506.843.000,00	6.487.743.000,00	6.487.743.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.444.643.000,00	6.425.543.000,00	6.425.543.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.700.000,00	59.700.000,00	59.700.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.960.000,00	217.960.000,00	217.960.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.260.000,00	18.260.000,00	18.260.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.920.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.920.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.604.000,00	91.604.000,00	91.604.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.604.000,00	74.604.000,00	74.604.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.22.0.00.0.00.01.0001						TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA	3.301.198.300,00	3.301.198.300,00	3.301.198.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.241.198.300,00	3.241.198.300,00	3.241.198.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.241.198.300,00	3.241.198.300,00	3.241.198.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.241.198.300,00	3.241.198.300,00	3.241.198.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	7.739.059.600,00	7.239.059.600,00	7.239.058.600,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.537.663.300,00	7.037.663.300,00	7.037.662.300,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	895.440.600,00	895.440.600,00	895.440.600,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.308.400,00	180.308.400,00	180.308.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	58.965.100,00	58.965.100,00	58.965.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.992.200,00	8.992.200,00	8.992.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	9.908.900,00	9.908.900,00	9.908.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	71.496.200,00	71.496.200,00	71.496.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	30.946.000,00	30.946.000,00	30.946.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	715.132.200,00	715.132.200,00	715.132.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.784.900,00	68.784.900,00	68.784.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	485.350.900,00	485.350.900,00	485.350.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	4.784.000,00	4.784.000,00	4.784.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	156.212.400,00	156.212.400,00	156.212.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.642.222.700,00	6.142.222.700,00	6.142.221.700,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.839.500,00	4.839.500,00	4.839.500,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.926.500,00	2.926.500,00	2.926.500,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.913.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.868.516.100,00	5.368.516.100,00	5.368.516.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.866.113.000,00	5.366.113.000,00	5.366.113.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.403.100,00	2.403.100,00	2.403.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.522.900,00	106.522.900,00	106.521.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.600,00	1.997.600,00	1.997.600,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.766.200,00	24.766.200,00	24.765.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.982.500,00	1.982.500,00	1.982.500,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.928.600,00	15.928.600,00	15.928.600,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.945.000,00	19.945.000,00	19.945.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.923.000,00	4.923.000,00	4.923.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.888.000,00	49.888.000,00	49.888.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.888.000,00	49.888.000,00	49.888.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.978.400,00	401.978.400,00	401.978.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.978.400,00	339.978.400,00	339.978.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.477.800,00	210.477.800,00	210.477.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.377.800,00	158.377.800,00	158.377.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.100.000,00	52.100.000,00	52.100.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	201.396.300,00	201.396.300,00	201.396.300,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	121.799.100,00	121.799.100,00	121.799.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	98.996.100,00	98.996.100,00	98.996.100,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	45.313.400,00	45.313.400,00	45.313.400,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	22.492.800,00	22.492.800,00	22.492.800,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31.189.900,00	31.189.900,00	31.189.900,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	22.803.000,00	22.803.000,00	22.803.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	308.000,00	308.000,00	308.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	22.495.000,00	22.495.000,00	22.495.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	79.597.200,00	79.597.200,00	79.597.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.319.200,00	40.319.200,00	40.319.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	22.489.200,00	22.489.200,00	22.489.200,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	17.830.000,00	17.830.000,00	17.830.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	35.842.000,00	35.842.000,00	35.842.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	17.830.000,00	17.830.000,00	17.830.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	18.012.000,00	18.012.000,00	18.012.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	3.436.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3.436.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000						DINAS PERIKANAN	9.585.449.700,00	9.485.449.700,00	9.485.449.700,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9.585.449.700,00	9.485.449.700,00	9.485.449.700,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.585.449.700,00	9.485.449.700,00	9.485.449.700,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	526.632.000,00	526.632.000,00	526.632.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	501.672.000,00	501.672.000,00	501.672.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	501.672.000,00	501.672.000,00	501.672.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	12.840.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.409.747.000,00	1.309.747.000,00	1.309.747.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	717.747.000,00	617.747.000,00	617.747.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	698.707.000,00	598.707.000,00	598.707.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	19.040.000,00	19.040.000,00	19.040.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	692.000.000,00	692.000.000,00	692.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.078.181.000,00	1.078.181.000,00	1.078.181.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	21.582.000,00	21.582.000,00	21.582.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	21.582.000,00	21.582.000,00	21.582.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	69.530.000,00	69.530.000,00	69.530.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	69.530.000,00	69.530.000,00	69.530.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	987.069.000,00	987.069.000,00	987.069.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	987.069.000,00	987.069.000,00	987.069.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.570.889.700,00	6.570.889.700,00	6.570.889.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.531.800,00	4.531.800,00	4.531.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.137.151.000,00	5.137.151.000,00	5.137.151.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.134.151.000,00	5.134.151.000,00	5.134.151.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.419.000,00	65.419.000,00	65.419.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.600,00	2.999.600,00	2.999.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.780.000,00	19.780.000,00	19.780.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.140.000,00	17.140.000,00	17.140.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.498.600,00	578.498.600,00	578.498.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.998.600,00	539.998.600,00	539.998.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.289.300,00	785.289.300,00	785.289.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.487.300,00	67.487.300,00	67.487.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.802.000,00	19.802.000,00	19.802.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	698.000.000,00	698.000.000,00	698.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						DINAS PARIWISATA	5.844.104.400,00	5.814.104.400,00	5.814.104.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.844.104.400,00	5.814.104.400,00	5.814.104.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	154.655.500,00	154.655.500,00	154.655.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.707.800,00	14.707.800,00	14.707.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	14.707.800,00	14.707.800,00	14.707.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	109.947.700,00	109.947.700,00	109.947.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.268.000,00	15.268.000,00	15.268.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	78.731.900,00	78.731.900,00	78.731.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.947.800,00	15.947.800,00	15.947.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	222.161.900,00	222.161.900,00	222.161.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	222.161.900,00	222.161.900,00	222.161.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	195.200.000,00	195.200.000,00	195.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	26.961.900,00	26.961.900,00	26.961.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.326.287.000,00	5.296.287.000,00	5.296.287.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.400,00	4.999.400,00	4.999.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.400,00	2.999.400,00	2.999.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.870.613.000,00	4.840.613.000,00	4.840.613.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.868.113.000,00	4.838.113.000,00	4.838.113.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.313.800,00	67.313.800,00	67.313.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.841.800,00	1.841.800,00	1.841.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.472.000,00	14.472.000,00	14.472.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.270.600,00	49.270.600,00	49.270.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.270.600,00	49.270.600,00	49.270.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.101.400,00	249.101.400,00	249.101.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.999.000,00	24.999.000,00	24.999.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.302.400,00	219.302.400,00	219.302.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.988.800,00	84.988.800,00	84.988.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.998.800,00	79.998.800,00	79.998.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000						DINAS PERTANIAN	32.064.430.680,00	27.118.570.680,00	27.118.570.680,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.064.430.680,00	27.118.570.680,00	27.118.570.680,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.865.837.800,00	3.865.837.800,00	3.865.837.800,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.751.109.800,00	2.751.109.800,00	2.751.109.800,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.625.806.000,00	2.625.806.000,00	2.625.806.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	125.303.800,00	125.303.800,00	125.303.800,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	123.398.000,00	123.398.000,00	123.398.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	73.743.000,00	73.743.000,00	73.743.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	49.655.000,00	49.655.000,00	49.655.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	991.330.000,00	991.330.000,00	991.330.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	991.330.000,00	991.330.000,00	991.330.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.106.611.000,00	2.962.611.000,00	2.962.611.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	909.233.000,00	765.233.000,00	765.233.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	601.000.000,00	457.000.000,00	457.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	108.233.000,00	108.233.000,00	108.233.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	2.197.378.000,00	2.197.378.000,00	2.197.378.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.197.378.000,00	2.197.378.000,00	2.197.378.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	286.535.000,00	286.535.000,00	286.535.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	36.535.000,00	36.535.000,00	36.535.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	36.535.000,00	36.535.000,00	36.535.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	406.941.000,00	406.941.000,00	406.941.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	406.941.000,00	406.941.000,00	406.941.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	92.203.000,00	92.203.000,00	92.203.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	72.645.000,00	72.645.000,00	72.645.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	19.793.000,00	19.793.000,00	19.793.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	222.300.000,00	222.300.000,00	222.300.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.398.505.880,00	19.596.645.880,00	19.596.645.880,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.429.226.000,00	17.629.226.000,00	17.629.226.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.426.226.000,00	17.626.226.000,00	17.626.226.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.170.400,00	149.170.400,00	149.170.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.559.000,00	69.559.000,00	69.559.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	55.217.400,00	55.217.400,00	55.217.400,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.394.000,00	10.394.000,00	10.394.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.836.000,00	93.976.000,00	93.976.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.836.000,00	93.976.000,00	93.976.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.364.349.880,00	1.364.349.880,00	1.364.349.880,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.154.349.880,00	1.154.349.880,00	1.154.349.880,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.923.600,00	354.923.600,00	354.923.600,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.988.000,00	89.988.000,00	89.988.000,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.935.600,00	64.935.600,00	64.935.600,00
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.413.778.250,00	11.613.778.250,00	11.613.691.250,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.556.219.950,00	9.756.219.950,00	9.756.132.950,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.546.180.000,00	2.546.180.000,00	2.546.180.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.522.348.100,00	2.522.348.100,00	2.522.348.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.522.348.100,00	2.522.348.100,00	2.522.348.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	23.831.900,00	23.831.900,00	23.831.900,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	23.831.900,00	23.831.900,00	23.831.900,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	57.135.150,00	57.135.150,00	57.135.150,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	57.135.150,00	57.135.150,00	57.135.150,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	33.623.150,00	33.623.150,00	33.623.150,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	23.512.000,00	23.512.000,00	23.512.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	549.519.000,00	549.519.000,00	549.519.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	549.519.000,00	549.519.000,00	549.519.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	549.519.000,00	549.519.000,00	549.519.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.403.385.800,00	6.603.385.800,00	6.603.298.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.937.000,00	4.937.000,00	4.937.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.187.458.000,00	5.387.458.000,00	5.387.458.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.185.000.000,00	5.385.000.000,00	5.385.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.458.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.834.600,00	123.834.600,00	123.747.600,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.300,00	2.999.300,00	2.999.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.685.000,00	59.685.000,00	59.685.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	31.190.500,00	31.190.500,00	31.190.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.960.000,00	14.960.000,00	14.873.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.729.000,00	64.729.000,00	64.729.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.729.000,00	64.729.000,00	64.729.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.095.800,00	554.095.800,00	554.095.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.097.300,00	82.097.300,00	82.097.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.998.600,00	469.998.600,00	469.998.600,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.331.400,00	468.331.400,00	468.331.400,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.551.400,00	108.551.400,00	108.551.400,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.860.000,00	349.860.000,00	349.860.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.857.558.300,00	1.857.558.300,00	1.857.558.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.857.558.300,00	1.857.558.300,00	1.857.558.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.857.558.300,00	1.857.558.300,00	1.857.558.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	93.499.400,00	93.499.400,00	93.499.400,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.111.731.000,00	1.111.731.000,00	1.111.731.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	623.663.700,00	623.663.700,00	623.663.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	28.664.200,00	28.664.200,00	28.664.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DAERAH	93.689.723.341,00	86.689.723.341,00	86.689.569.841,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	93.689.723.341,00	86.689.723.341,00	86.689.569.841,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	93.689.723.341,00	86.689.723.341,00	86.689.569.841,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.183.599.300,00	18.183.599.300,00	18.183.599.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	4.186.095.000,00	4.186.095.000,00	4.186.095.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	107.284.900,00	107.284.900,00	107.284.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	109.142.900,00	109.142.900,00	24.142.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.969.667.200,00	3.969.667.200,00	4.054.667.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.537.898.500,00	13.537.898.500,00	13.537.898.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.537.898.500,00	13.537.898.500,00	13.537.898.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	441.811.000,00	441.811.000,00	441.811.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	170.471.500,00	170.471.500,00	170.471.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	206.067.500,00	206.067.500,00	206.067.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	65.272.000,00	65.272.000,00	65.272.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	17.794.800,00	17.794.800,00	17.794.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	17.794.800,00	17.794.800,00	17.794.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	346.420.700,00	346.420.700,00	346.420.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	101.864.600,00	101.864.600,00	101.864.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	41.899.600,00	41.899.600,00	41.899.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	17.848.400,00	17.848.400,00	17.848.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	42.116.600,00	42.116.600,00	42.116.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	52.543.400,00	52.543.400,00	52.543.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	6.829.500,00	6.829.500,00	6.829.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	39.899.200,00	39.899.200,00	39.899.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5.814.700,00	5.814.700,00	5.814.700,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	192.012.700,00	192.012.700,00	192.012.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	131.993.700,00	131.993.700,00	131.993.700,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	25.935.000,00	25.935.000,00	25.935.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	34.084.000,00	34.084.000,00	34.084.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.159.703.341,00	68.159.703.341,00	68.159.549.841,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.586.200,00	13.586.200,00	13.586.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.586.200,00	13.586.200,00	13.586.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.608.871.000,00	32.108.871.000,00	32.108.871.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.595.550.000,00	32.095.550.000,00	32.095.550.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.321.000,00	13.321.000,00	13.321.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.953.473.200,00	8.253.473.200,00	8.253.473.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	139.964.600,00	139.964.600,00	139.964.600,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.705.596.200,00	2.705.596.200,00	2.705.596.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	360.439.200,00	360.439.200,00	360.439.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.824.037.800,00	2.824.037.800,00	2.824.037.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.900.000,00	179.900.000,00	179.900.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	147.260.000,00	147.260.000,00	147.260.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	404.536.000,00	404.536.000,00	404.536.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.186.800.000,00	1.486.800.000,00	1.486.800.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.939.400,00	4.939.400,00	4.939.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.543.175.700,00	3.543.175.700,00	3.543.083.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	551.000.000,00	551.000.000,00	551.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.992.175.700,00	2.992.175.700,00	2.992.083.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.074.419.800,00	11.074.419.800,00	11.074.419.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.155.901.000,00	1.155.901.000,00	1.155.901.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.898.518.800,00	9.898.518.800,00	9.898.518.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.640.866.341,00	5.640.866.341,00	5.640.804.741,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.359.236.000,00	1.359.236.000,00	1.359.236.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	537.800.000,00	537.800.000,00	537.738.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.743.830.341,00	3.743.830.341,00	3.743.830.341,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.573.882.000,00	1.773.882.000,00	1.773.882.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	218.682.000,00	218.682.000,00	218.682.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95.200.000,00	95.200.000,00	95.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	228.388.200,00	228.388.200,00	228.388.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	169.158.900,00	169.158.900,00	169.158.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25.400.300,00	25.400.300,00	25.400.300,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	33.829.000,00	33.829.000,00	33.829.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.523.040.900,00	5.523.040.900,00	5.523.040.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	338.232.500,00	338.232.500,00	338.232.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5.007.270.500,00	5.007.270.500,00	5.007.270.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	177.537.900,00	177.537.900,00	177.537.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	84.203.166.641,00	85.372.215.000,00	85.372.215.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	84.203.166.641,00	85.372.215.000,00	85.372.215.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.884.065.000,00	23.884.065.000,00	23.884.065.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	347.000.000,00	347.000.000,00	347.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	242.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.583.452.000,00	4.583.452.000,00	4.583.452.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.408.452.000,00	2.408.452.000,00	2.408.452.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	660.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.340.000.000,00	6.340.000.000,00	6.340.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	6.340.000.000,00	6.340.000.000,00	6.340.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	12.271.613.000,00	12.271.613.000,00	12.271.613.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.271.613.000,00	12.271.613.000,00	12.271.613.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.319.101.641,00	61.488.150.000,00	61.488.150.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.689.335.641,00	7.358.384.000,00	7.358.384.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.686.335.641,00	7.355.384.000,00	7.355.384.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.720.665.000,00	1.720.665.000,00	1.720.665.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.315.638.500,00	1.315.638.500,00	1.315.638.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.026.500,00	87.026.500,00	87.026.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	733.146.000,00	733.146.000,00	733.146.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	216.952.400,00	216.952.400,00	216.952.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	516.193.600,00	516.193.600,00	516.193.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.219.000.000,00	4.219.000.000,00	4.219.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.000.000,00	257.000.000,00	257.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.537.253.000,00	6.537.253.000,00	6.537.253.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.920.253.000,00	5.920.253.000,00	5.920.253.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	39.194.040.000,00	40.694.040.000,00	40.694.040.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	38.571.040.000,00	40.071.040.000,00	40.071.040.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	473.000.000,00	473.000.000,00	473.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	220.662.000,00	220.662.000,00	220.662.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	220.662.000,00	220.662.000,00	220.662.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.712.328.300,00	10.479.328.300,00	10.479.328.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10.712.328.300,00	10.479.328.300,00	10.479.328.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	10.712.328.300,00	10.479.328.300,00	10.479.328.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	781.470.000,00	781.470.000,00	781.470.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	646.103.000,00	646.103.000,00	646.103.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	646.103.000,00	646.103.000,00	646.103.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.367.000,00	135.367.000,00	135.367.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	135.367.000,00	135.367.000,00	135.367.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.194.676.000,00	1.144.676.000,00	1.144.676.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	486.621.000,00	436.621.000,00	436.621.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	284.908.000,00	234.908.000,00	234.908.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	201.713.000,00	201.713.000,00	201.713.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	530.147.000,00	530.147.000,00	530.147.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	493.754.000,00	493.754.000,00	493.754.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36.393.000,00	36.393.000,00	36.393.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	177.908.000,00	177.908.000,00	177.908.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.608.000,00	93.608.000,00	93.608.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.300.000,00	84.300.000,00	84.300.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.736.182.300,00	8.553.182.300,00	8.553.182.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.664.383.000,00	7.481.383.000,00	7.481.383.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.661.383.000,00	7.478.383.000,00	7.478.383.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.496.000,00	218.496.000,00	218.496.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.979.900,00	14.979.900,00	14.979.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.889.300,00	15.889.300,00	15.889.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.300,00	29.999.300,00	29.999.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	35.697.500,00	35.697.500,00	35.697.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.572.400,00	227.572.400,00	227.572.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	227.572.400,00	227.572.400,00	227.572.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.463.600,00	436.463.600,00	436.463.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.463.600,00	285.463.600,00	285.463.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.267.300,00	184.267.300,00	184.267.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.994.500,00	133.994.500,00	133.994.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.272.800,00	50.272.800,00	50.272.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000						BADAN KEUANGAN DAERAH	364.960.665.869,00	366.545.669.569,00	366.545.669.693,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	364.960.665.869,00	366.545.669.569,00	366.545.669.693,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	304.341.177.022,00	305.867.961.022,00	305.867.961.146,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.522.885.900,00	1.522.885.900,00	1.522.885.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.408.000,00	194.408.000,00	194.408.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200.577.000,00	200.577.000,00	200.577.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24.213.400,00	24.213.400,00	24.213.400,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	27.030.000,00	27.030.000,00	27.030.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	351.998.000,00	351.998.000,00	351.998.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	511.456.900,00	511.456.900,00	511.456.900,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	213.202.600,00	213.202.600,00	213.202.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	46.753.000,00	46.753.000,00	46.753.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	29.236.000,00	29.236.000,00	29.236.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17.517.000,00	17.517.000,00	17.517.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	48.120.000,00	48.120.000,00	48.120.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	15.220.000,00	15.220.000,00	15.220.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	302.723.418.122,00	304.250.202.122,00	304.250.202.246,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	234.081.835.300,00	235.608.619.300,00	235.608.619.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.991.095.722,00	13.991.095.722,00	13.991.095.846,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	48.400.487.100,00	48.400.487.100,00	48.400.487.100,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.763.220.000,00	1.763.220.000,00	1.763.220.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.763.220.000,00	1.763.220.000,00	1.763.220.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	34.344.000,00	34.344.000,00	34.344.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	33.080.000,00	33.080.000,00	33.080.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.110.458.000,00	1.110.458.000,00	1.110.458.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	585.338.000,00	585.338.000,00	585.338.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.683.127.600,00	2.683.127.600,00	2.683.127.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.683.127.600,00	2.683.127.600,00	2.683.127.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90.028.300,00	90.028.300,00	90.028.300,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	273.068.500,00	273.068.500,00	273.068.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	663.924.000,00	663.924.000,00	663.924.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.191.287.600,00	1.191.287.600,00	1.191.287.600,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	151.139.200,00	151.139.200,00	151.139.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.173.141.247,00	56.231.360.947,00	56.231.360.947,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.841.059.047,00	39.693.334.747,00	39.693.334.747,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.838.559.047,00	39.690.834.747,00	39.690.834.747,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.459.200,00	301.459.200,00	301.459.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.499.200,00	13.499.200,00	13.499.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.960.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.826.631.500,00	14.431.631.500,00	14.431.631.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.456.212.000,00	14.061.212.000,00	14.061.212.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.419.500,00	370.419.500,00	370.419.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.084.000.000,00	1.684.944.000,00	1.684.944.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.872.000.000,00	1.472.944.000,00	1.472.944.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.991.500,00	114.991.500,00	114.991.500,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.992.200,00	54.992.200,00	54.992.200,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.300,00	9.999.300,00	9.999.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.092.236.780,00	13.874.163.580,00	13.873.758.380,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	11.010.524.880,00	10.792.451.680,00	10.792.046.480,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.495.573.500,00	2.312.052.000,00	2.312.052.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.594.623.700,00	1.411.102.200,00	1.411.102.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	28.894.000,00	28.894.000,00	28.894.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.080.233.700,00	812.857.800,00	812.857.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.685.000,00	123.539.400,00	123.539.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	426.811.000,00	426.811.000,00	426.811.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	520.401.000,00	520.401.000,00	520.401.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	63.490.000,00	63.490.000,00	63.490.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	456.911.000,00	456.911.000,00	456.911.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	270.548.800,00	270.548.800,00	270.548.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	147.527.000,00	147.527.000,00	147.527.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	89.421.800,00	89.421.800,00	89.421.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	18.835.000,00	18.835.000,00	18.835.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14.765.000,00	14.765.000,00	14.765.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.514.951.380,00	8.480.399.680,00	8.479.994.480,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.727.000,00	4.727.000,00	4.727.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.853.000,00	2.853.000,00	2.853.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.874.000,00	1.874.000,00	1.874.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.645.722.000,00	7.440.722.000,00	7.440.722.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.643.785.000,00	7.438.785.000,00	7.438.785.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.937.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.487.100,00	99.487.100,00	99.487.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.499.400,00	5.499.400,00	5.499.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.830.700,00	24.830.700,00	24.830.700,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.157.000,00	28.157.000,00	28.157.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.687.200,00	270.135.500,00	269.730.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.687.200,00	270.135.500,00	269.730.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.498.200,00	550.498.200,00	550.498.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.997.400,00	56.997.400,00	56.997.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.500.800,00	488.500.800,00	488.500.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.829.880,00	114.829.880,00	114.829.880,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.959.880,00	91.959.880,00	91.959.880,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.870.000,00	22.870.000,00	22.870.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.081.711.900,00	3.081.711.900,00	3.081.711.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.081.711.900,00	3.081.711.900,00	3.081.711.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	1.136.247.900,00	1.136.247.900,00	1.136.247.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.136.247.900,00	1.136.247.900,00	1.136.247.900,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.945.464.000,00	1.945.464.000,00	1.945.464.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.945.464.000,00	1.945.464.000,00	1.945.464.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	8.491.374.900,00	8.491.374.900,00	8.491.362.100,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.491.374.900,00	8.491.374.900,00	8.491.362.100,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.182.741.200,00	4.182.741.200,00	4.182.741.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.372.707.600,00	2.372.707.600,00	2.372.707.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2.372.707.600,00	2.372.707.600,00	2.372.707.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	516.940.400,00	516.940.400,00	516.940.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	516.940.400,00	516.940.400,00	516.940.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	851.658.000,00	851.658.000,00	851.658.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	851.658.000,00	851.658.000,00	851.658.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	441.435.200,00	441.435.200,00	441.435.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	220.774.200,00	220.774.200,00	220.774.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	220.661.000,00	220.661.000,00	220.661.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.308.633.700,00	4.308.633.700,00	4.308.620.900,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.750.900,00	4.750.900,00	4.750.900,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.864.500,00	2.864.500,00	2.864.500,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.886.400,00	1.886.400,00	1.886.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.238.186.300,00	3.238.186.300,00	3.238.186.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.235.991.000,00	3.235.991.000,00	3.235.991.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.195.300,00	2.195.300,00	2.195.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.569.000,00	99.569.000,00	99.556.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	24.987.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	14.655.000,00	14.655.000,00	14.655.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.414.000,00	46.414.000,00	46.414.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373.819.600,00	373.819.600,00	373.819.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	214.090.400,00	214.090.400,00	214.090.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159.729.200,00	159.729.200,00	159.729.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.498.300,00	502.498.300,00	502.498.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.998.300,00	79.998.300,00	79.998.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.809.600,00	89.809.600,00	89.809.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.989.600,00	79.989.600,00	79.989.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.820.000,00	9.820.000,00	9.820.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						INSPEKTORAT	25.483.579.670,00	24.649.499.670,00	24.649.499.670,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.483.579.670,00	24.649.499.670,00	24.649.499.670,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	25.483.579.670,00	24.649.499.670,00	24.649.499.670,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.700.278.000,00	3.700.278.000,00	3.700.278.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.490.188.000,00	3.490.188.000,00	3.490.188.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	580.264.000,00	580.264.000,00	580.264.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	580.264.000,00	580.264.000,00	580.264.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	473.632.000,00	473.632.000,00	473.632.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	710.032.000,00	710.032.000,00	710.032.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	743.732.000,00	743.732.000,00	743.732.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	178.632.000,00	178.632.000,00	178.632.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	223.632.000,00	223.632.000,00	223.632.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	210.090.000,00	210.090.000,00	210.090.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	97.680.000,00	97.680.000,00	97.680.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	112.410.000,00	112.410.000,00	112.410.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.468.103.700,00	3.468.103.700,00	3.468.103.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	13.455.000,00	13.455.000,00	13.455.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	13.455.000,00	13.455.000,00	13.455.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	3.454.648.700,00	3.454.648.700,00	3.454.648.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	532.952.000,00	532.952.000,00	532.952.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	556.832.000,00	556.832.000,00	556.832.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.364.864.700,00	2.364.864.700,00	2.364.864.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.315.197.970,00	17.481.117.970,00	17.481.117.970,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.939.500,00	17.939.500,00	17.939.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.214.700,00	14.214.700,00	14.214.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.724.800,00	3.724.800,00	3.724.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.196.640.100,00	14.362.560.100,00	14.362.560.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.196.640.100,00	14.362.560.100,00	14.362.560.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.443.824.000,00	1.443.824.000,00	1.443.824.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.443.824.000,00	1.443.824.000,00	1.443.824.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	679.485.400,00	679.485.400,00	679.485.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.179.100,00	6.179.100,00	6.179.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.833.200,00	14.833.200,00	14.833.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.526.900,00	60.526.900,00	60.526.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.110.500,00	52.110.500,00	52.110.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	108.075.700,00	108.075.700,00	108.075.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402.260.000,00	402.260.000,00	402.260.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	303.121.270,00	303.121.270,00	303.121.270,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	303.121.270,00	303.121.270,00	303.121.270,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.461.100,00	271.461.100,00	271.461.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.799.100,00	50.799.100,00	50.799.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.162.000,00	207.162.000,00	207.162.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.726.600,00	402.726.600,00	402.726.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	366.116.600,00	366.116.600,00	366.116.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.610.000,00	36.610.000,00	36.610.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						KECAMATAN KEDIRI	3.961.951.300,00	3.661.951.300,00	3.661.951.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.961.951.300,00	3.661.951.300,00	3.661.951.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	3.961.951.300,00	3.661.951.300,00	3.661.951.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.945.000,00	42.945.000,00	42.945.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.945.000,00	42.945.000,00	42.945.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.495.000,00	33.495.000,00	33.495.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.050.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.050.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.050.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.882.956.300,00	3.582.956.300,00	3.582.956.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.458.552.000,00	3.158.552.000,00	3.158.552.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.452.000,00	3.156.452.000,00	3.156.452.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.970.000,00	58.970.000,00	58.970.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.970.000,00	38.970.000,00	38.970.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.744.300,00	31.744.300,00	31.744.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.744.300,00	31.744.300,00	31.744.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.200.000,00	216.200.000,00	216.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.500.000,00	190.500.000,00	190.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.490.000,00	112.490.000,00	112.490.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						KECAMATAN TABANAN	3.928.497.460,00	3.745.397.460,00	3.745.397.460,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.551.300,00	78.551.300,00	78.551.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.551.300,00	78.551.300,00	78.551.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.940.300,00	5.940.300,00	5.940.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.611.000,00	72.611.000,00	72.611.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.580.000,00	21.580.000,00	21.580.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.580.000,00	21.580.000,00	21.580.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.580.000,00	21.580.000,00	21.580.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.828.366.160,00	3.645.266.160,00	3.645.266.160,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.418.334.000,00	3.235.234.000,00	3.235.234.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.415.565.000,00	3.232.465.000,00	3.232.465.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.769.000,00	2.769.000,00	2.769.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.609.160,00	107.609.160,00	107.609.160,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.100,00	1.991.100,00	1.991.100,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.700,00	2.999.700,00	2.999.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	9.207.460,00	9.207.460,00	9.207.460,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.562.900,00	2.562.900,00	2.562.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.883.700,00	44.883.700,00	44.883.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.883.700,00	44.883.700,00	44.883.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.098.200,00	222.098.200,00	222.098.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.600.000,00	44.600.000,00	44.600.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.998.200,00	174.998.200,00	174.998.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.861.100,00	30.861.100,00	30.861.100,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.999.300,00	25.999.300,00	25.999.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.861.800,00	4.861.800,00	4.861.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						KECAMATAN MARGA	3.983.022.400,00	3.883.022.400,00	3.883.022.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.666.000,00	88.666.000,00	88.666.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.666.000,00	88.666.000,00	88.666.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.216.000,00	79.216.000,00	79.216.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.566.700,00	31.566.700,00	31.566.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.566.700,00	31.566.700,00	31.566.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	31.566.700,00	31.566.700,00	31.566.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.862.789.700,00	3.762.789.700,00	3.762.789.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.667.292.000,00	3.567.292.000,00	3.567.292.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.665.192.000,00	3.565.192.000,00	3.565.192.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.557.900,00	44.557.900,00	44.557.900,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	886.500,00	886.500,00	886.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.400,00	2.999.400,00	2.999.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	672.000,00	672.000,00	672.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.329.800,00	37.329.800,00	37.329.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.329.800,00	37.329.800,00	37.329.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.900.000,00	61.900.000,00	61.900.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.710.000,00	46.710.000,00	46.710.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.720.000,00	41.720.000,00	41.720.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						KECAMATAN BATURITI	4.135.854.700,00	4.135.854.700,00	4.135.854.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.338.900,00	75.338.900,00	75.338.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.658.000,00	72.658.000,00	72.658.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.658.000,00	69.658.000,00	69.658.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.680.900,00	2.680.900,00	2.680.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.680.900,00	2.680.900,00	2.680.900,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.023.515.800,00	4.023.515.800,00	4.023.515.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.637.771.000,00	3.637.771.000,00	3.637.771.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.634.771.000,00	3.634.771.000,00	3.634.771.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.998.400,00	79.998.400,00	79.998.400,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.998.600,00	2.998.600,00	2.998.600,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.395.000,00	49.395.000,00	49.395.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.395.000,00	49.395.000,00	49.395.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.498.200,00	204.498.200,00	204.498.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.998.200,00	174.998.200,00	174.998.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.853.200,00	46.853.200,00	46.853.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.993.200,00	41.993.200,00	41.993.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000						KECAMATAN PNEBEL	4.343.997.000,00	3.993.997.000,00	3.993.997.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.026.600,00	88.026.600,00	88.026.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.026.600,00	88.026.600,00	88.026.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.278.800,00	5.278.800,00	5.278.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.747.800,00	82.747.800,00	82.747.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.933.300,00	37.933.300,00	37.933.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.933.300,00	37.933.300,00	37.933.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.933.300,00	37.933.300,00	37.933.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.218.037.100,00	3.868.037.100,00	3.868.037.100,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.811.000,00	4.811.000,00	4.811.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.874.000,00	1.874.000,00	1.874.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.767.320.000,00	3.417.320.000,00	3.417.320.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.764.320.000,00	3.414.320.000,00	3.414.320.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.130.000,00	61.130.000,00	61.130.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.200,00	2.999.200,00	2.999.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.132.900,00	39.132.900,00	39.132.900,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.999.900,00	1.999.900,00	1.999.900,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.536.600,00	96.536.600,00	96.536.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.536.600,00	96.536.600,00	96.536.600,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.493.500,00	240.493.500,00	240.493.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.993.500,00	188.993.500,00	188.993.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.746.000,00	47.746.000,00	47.746.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.996.000,00	42.996.000,00	42.996.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						KECAMATAN KERAMBITAN	3.425.702.260,00	3.325.702.260,00	3.325.702.260,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.100.400,00	72.100.400,00	72.100.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.100.400,00	72.100.400,00	72.100.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.292.400,00	5.292.400,00	5.292.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.808.000,00	66.808.000,00	66.808.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.999.900,00	34.999.900,00	34.999.900,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.999.900,00	34.999.900,00	34.999.900,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.999.900,00	34.999.900,00	34.999.900,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.318.601.960,00	3.218.601.960,00	3.218.601.960,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.997.680.000,00	2.897.680.000,00	2.897.680.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.994.680.000,00	2.894.680.000,00	2.894.680.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.994.800,00	71.994.800,00	71.994.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.500,00	1.999.500,00	1.999.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.800,00	2.999.800,00	2.999.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.995.500,00	44.995.500,00	44.995.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.988.000,00	47.988.000,00	47.988.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.988.000,00	47.988.000,00	47.988.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.998.800,00	147.998.800,00	147.998.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.998.900,00	44.998.900,00	44.998.900,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.999.900,00	100.999.900,00	100.999.900,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.940.360,00	47.940.360,00	47.940.360,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.990.360,00	42.990.360,00	42.990.360,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000						KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	3.393.973.400,00	3.293.973.400,00	3.293.973.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.950.000,00	44.950.000,00	44.950.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.950.000,00	44.950.000,00	44.950.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.950.000,00	41.950.000,00	41.950.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.350.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.350.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.350.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.325.673.400,00	3.225.673.400,00	3.225.673.400,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.015.878.000,00	2.915.878.000,00	2.915.878.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.012.878.000,00	2.912.878.000,00	2.912.878.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.778.800,00	76.778.800,00	76.778.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.600,00	1.991.600,00	1.991.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.997.200,00	2.997.200,00	2.997.200,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.790.000,00	54.790.000,00	54.790.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.521.100,00	49.521.100,00	49.521.100,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.521.100,00	49.521.100,00	49.521.100,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.497.500,00	138.497.500,00	138.497.500,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.997.500,00	109.997.500,00	109.997.500,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.998.000,00	39.998.000,00	39.998.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.228.000,00	28.228.000,00	28.228.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.770.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000						KECAMATAN SELEMADEG	3.523.959.700,00	3.421.761.700,00	3.421.761.700,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.443.000,00	81.443.000,00	81.443.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	81.443.000,00	81.443.000,00	81.443.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.993.000,00	71.993.000,00	71.993.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.417.516.700,00	3.315.318.700,00	3.315.318.700,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.055.753.000,00	2.955.753.000,00	2.955.753.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.052.753.000,00	2.952.753.000,00	2.952.753.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.198.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.198.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.979.200,00	49.979.200,00	49.979.200,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.979.200,00	49.979.200,00	49.979.200,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.608.500,00	187.608.500,00	187.608.500,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.784.700,00	28.784.700,00	28.784.700,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.323.800,00	156.323.800,00	156.323.800,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.978.000,00	39.978.000,00	39.978.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.988.000,00	34.988.000,00	34.988.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000						KECAMATAN SELEMADEG BARAT	3.036.496.600,00	2.986.496.600,00	2.986.496.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.268.800,00	85.268.800,00	85.268.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.268.800,00	85.268.800,00	85.268.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.604.800,00	2.604.800,00	2.604.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.664.000,00	82.664.000,00	82.664.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.880.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.880.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.880.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.934.347.800,00	2.884.347.800,00	2.884.347.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.942.000,00	2.942.000,00	2.942.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.702.748.000,00	2.652.748.000,00	2.652.748.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.700.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.748.000,00	2.748.000,00	2.748.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.349.000,00	76.349.000,00	76.349.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.349.000,00	54.349.000,00	54.349.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.833.600,00	49.833.600,00	49.833.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.833.600,00	49.833.600,00	49.833.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.975.200,00	44.975.200,00	44.975.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.985.200,00	39.985.200,00	39.985.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000						KECAMATAN PUPUAN	3.924.347.000,00	3.924.347.000,00	3.924.347.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.934.300,00	88.934.300,00	88.934.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.934.300,00	88.934.300,00	88.934.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.999.300,00	6.999.300,00	6.999.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.935.000,00	81.935.000,00	81.935.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.795.412.700,00	3.795.412.700,00	3.795.412.700,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.799.900,00	4.799.900,00	4.799.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.899.900,00	1.899.900,00	1.899.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.408.625.000,00	3.408.625.000,00	3.408.625.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.406.625.000,00	3.406.625.000,00	3.406.625.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.896.200,00	75.896.200,00	75.896.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.900,00	2.999.900,00	2.999.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	9.999.600,00	9.999.600,00	9.999.600,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.399.900,00	4.399.900,00	4.399.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.859.300,00	44.859.300,00	44.859.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.859.300,00	44.859.300,00	44.859.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.969.000,00	196.969.000,00	196.969.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.998.100,00	26.998.100,00	26.998.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.670.900,00	167.670.900,00	167.670.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.263.300,00	64.263.300,00	64.263.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.981.800,00	54.981.800,00	54.981.800,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.281.500,00	9.281.500,00	9.281.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.050.338.900,00	10.700.338.900,00	10.700.338.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.050.338.900,00	10.700.338.900,00	10.700.338.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.050.338.900,00	10.700.338.900,00	10.700.338.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.313.537.800,00	1.313.537.800,00	1.313.537.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.313.537.800,00	1.313.537.800,00	1.313.537.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	998.930.800,00	998.930.800,00	998.930.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	277.819.600,00	277.819.600,00	277.819.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	36.787.400,00	36.787.400,00	36.787.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.123.540.100,00	3.123.540.100,00	3.123.540.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.123.540.100,00	3.123.540.100,00	3.123.540.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	73.830.100,00	73.830.100,00	73.830.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.049.710.000,00	3.049.710.000,00	3.049.710.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	79.370.000,00	79.370.000,00	79.370.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	79.370.000,00	79.370.000,00	79.370.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19.580.000,00	19.580.000,00	19.580.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	59.790.000,00	59.790.000,00	59.790.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	898.570.200,00	548.570.200,00	548.570.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	898.570.200,00	548.570.200,00	548.570.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	898.570.200,00	548.570.200,00	548.570.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	277.359.500,00	277.359.500,00	277.359.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	277.359.500,00	277.359.500,00	277.359.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.829.500,00	14.829.500,00	14.829.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	87.772.000,00	87.772.000,00	87.772.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	174.758.000,00	174.758.000,00	174.758.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.357.961.300,00	5.357.961.300,00	5.357.961.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.817.832.000,00	4.817.832.000,00	4.817.832.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.816.067.000,00	4.816.067.000,00	4.816.067.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.142.800,00	63.142.800,00	63.142.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	979.900,00	979.900,00	979.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.974.600,00	4.974.600,00	4.974.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.997.500,00	14.997.500,00	14.997.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.942.800,00	4.942.800,00	4.942.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.248.000,00	17.248.000,00	17.248.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.903.600,00	99.903.600,00	99.903.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.903.600,00	99.903.600,00	99.903.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.162.300,00	314.162.300,00	314.162.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.111.500,00	28.111.500,00	28.111.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.050.800,00	283.050.800,00	283.050.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.880.600,00	59.880.600,00	59.880.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.992.400,00	49.992.400,00	49.992.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.888.200,00	9.888.200,00	9.888.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
TOTAL							2.369.297.961.959,00	2.351.348.077.093,00	2.353.428.004.339,00



Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.888.200,00	9.888.200,00	9.888.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
TOTAL							2.369.297.961.959,00	2.351.348.077.093,00	2.353.428.004.339,00

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA.

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA



KABUPATEN TABANAN
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KEDIRI 3	447.651.000,00	447.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.651.000,00	447.651.000,00
2	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PENEHEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SELEMADEG BARAT	25.000.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	16.880.000,00
4	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	548.570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.570.200,00
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.371.500.000,00	1.033.157.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.500.000,00	1.033.157.100,00
6	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1.245.645.000,00	1.243.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.645.000,00	1.243.884.000,00
7	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERIKANAN	747.439.300,00	0,00	698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.439.300,00	0,00
8	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00	0,00
9	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS PENEHEL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	23.884.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.884.065.000,00
11	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KERAMBITAN	5.292.400,00	5.292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.400,00	5.292.400,00
12	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN	140.366.675.700,00	140.506.675.700,00	13.133.324.300,00	3.493.324.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500.000.000,00	144.000.000.000,00
13	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PENDIDIKAN	2.190.673.700,00	720.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.673.700,00	720.364.000,00
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	855.077.200,00	0,00	40.363.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.440.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
15	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	25.000.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.350.000,00
16	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA	41.850.000.000,00	42.307.861.000,00	3.150.000.000,00	2.692.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	632.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000.000,00	150.000.000,00
18	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN MARGA	100.450.000,00	88.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.450.000,00	88.666.000,00
19	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	320.887.000,00	313.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.887.000,00	313.972.000,00
20	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.049.078.300,00	9.503.804.569,00	48.571.000,00	48.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097.649.300,00	9.552.375.569,00
21	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PENEHEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	474.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.999.900,00	0,00
23	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	8.380.049.600,00	0,00	374.304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754.353.700,00
24	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	95.836.000,00	93.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.836.000,00	93.976.000,00
25	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	45.555.500,00	31.663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.555.500,00	31.663.500,00
26	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	487.691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.691.500,00
27	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	6.572.731.800,00	0,00	76.618.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.350.200,00	0,00
28	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PUPUAN	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
29	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PENEHEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
30	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEUANGAN DAERAH	53.054.370.200,00	0,00	1.089.534.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.143.905.100,00	0,00
31	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	15.551.723.100,00	0,00	13.757.767.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.309.490.200,00
32	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1	6.505.000,00	6.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.000,00	6.505.000,00
33	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PENEHEL 2	592.936.000,00	580.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.936.000,00	580.336.000,00
34	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00
35	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.654.170.800,00	6.340.718.699,00	195.829.200,00	195.829.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000.000,00	6.536.547.899,00
36	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	1.144.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.676.000,00
37	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3.497.508.500,00	3.934.801.300,00	373.819.600,00	373.819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.328.100,00	4.308.620.900,00
38	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.100.000.000,00	4.188.886.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000.000,00	4.188.886.600,00
39	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	12.302.322.600,00	50.569.770.700,00	2.197.115.100,00	2.996.393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499.437.700,00	53.566.163.900,00
40	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PENEHEL	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
41	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	15.911.546.900,00	0,00	124.997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036.544.300,00
42	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	21.132.593.400,00	15.688.395.400,00	168.089.600,00	198.089.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.683.000,00	15.886.485.000,00
43	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	3.081.711.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.711.900,00
44	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	3.123.540.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.540.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
45	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEBUDAYAAN	8.923.203.000,00	8.527.307.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973.123.000,00	8.577.227.000,00
46	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN	238.960.949.656,00	230.953.486.800,00	55.994.200,00	175.921.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.016.943.856,00	231.129.408.200,00
47	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1	867.598.484,00	957.271.976,00	108.400.000,00	238.157.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.998.484,00	1.195.429.651,00
48	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.287.374.200,00	0,00	421.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708.992.200,00	0,00
49	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	708.896.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.896.700,00
50	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	574.309.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.309.400,00
51	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS SELEMADEG	17.635.000,00	17.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635.000,00	17.635.000,00
52	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00	0,00
53	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KEDIRI	48.450.000,00	42.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450.000,00	42.945.000,00
54	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	15.602.718.700,00	0,00	103.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.706.406.700,00
55	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA	250.000.000,00	222.161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	222.161.900,00
56	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	59.919.150,00	57.135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.919.150,00	57.135.150,00
57	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	6.065.603.300,00	0,00	76.618.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142.221.700,00
58	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS TABANAN 1	635.735.000,00	635.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.735.000,00	635.735.000,00
59	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KEDIRI 1	838.458.000,00	820.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.458.000,00	820.998.000,00
60	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PENEBEL 2	882.873.518,00	1.391.497.419,00	58.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.873.518,00	1.545.497.419,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
61	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KERAMBITAN 1	480.370.000,00	480.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.370.000,00	480.370.000,00
62	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	79.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.370.000,00
63	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	357.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.328.000,00	0,00
64	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.109.558.700,00	0,00	1.750.426.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859.985.400,00
65	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.939.771.200,00	6.183.772.800,00	64.729.000,00	64.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.500.200,00	6.248.501.800,00
66	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.135.000.000,00	5.414.792.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000.000,00	5.414.792.200,00
67	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEDIRI	3.773.902.000,00	3.481.212.000,00	101.744.300,00	101.744.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.646.300,00	3.582.956.300,00
68	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS KEBUDAYAAN	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00
69	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS TABANAN 3	1.488.588.664,00	2.479.220.946,00	165.398.741,00	339.852.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.987.405,00	2.819.073.704,00
70	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN TABANAN	3.569.033.400,00	3.603.587.860,00	41.678.300,00	41.678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.711.700,00	3.645.266.160,00
71	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.685.403.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.403.800,00	0,00
72	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SELEMADEG	90.668.000,00	81.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.668.000,00	81.443.000,00
73	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.226.225.500,00	1.223.065.000,00	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.225.500,00	2.828.065.000,00
74	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.950.000.000,00	1.857.558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00	1.857.558.300,00
75	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000,00	781.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	781.470.000,00
76	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.425.000.000,00	1.601.817.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000.000,00	1.601.817.101,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
77	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	6.779.502.100,00	6.468.869.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.502.100,00	6.468.869.100,00
78	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	277.359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.359.500,00
79	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	11.621.201.000,00	31.504.737.100,00	61.037.049.000,00	85.636.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.658.250.000,00	117.141.036.100,00
80	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000,00	53.182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	53.182.600,00
81	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PUPUAN	0,00	88.934.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.934.300,00
82	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	465.436.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.436.200,00
83	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00
84	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.415.628.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.628.100,00	0,00
85	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PUPUAN	96.998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.998.900,00	0,00
86	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT	0,00	17.141.386.700,00	0,00	303.121.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444.507.970,00
87	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SELEMADEG BARAT	2.868.311.200,00	2.834.514.200,00	49.833.600,00	49.833.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.144.800,00	2.884.347.800,00
88	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS TABANAN 3	415.147.000,00	379.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.147.000,00	379.602.000,00
89	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KEDIRI 3	902.763.678,00	1.152.721.549,00	80.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.763.678,00	1.272.721.549,00
90	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS KERAMBITAN 1	12.220.000,00	12.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.000,00	12.220.000,00
91	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN	0,00	636.915.000,00	0,00	672.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.747.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
92	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS KEDIRI 2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
93	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	6.211.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211.942.000,00	0,00
94	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
95	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
96	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	1.091.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.000.000,00	0,00
97	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	396.000.000,00	565.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	565.233.000,00
98	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.000.000,00	27.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.804.000,00
99	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.000.000,00	19.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.219.000,00
100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KEDIRI 2	673.092.482,00	882.000.000,00	52.442.824,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.535.306,00	980.000.000,00
101	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.247.875.200,00	5.258.377.000,00	99.483.600,00	99.584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347.358.800,00	5.357.961.300,00
102	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS TABANAN 2	462.637.000,00	444.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.637.000,00	444.877.000,00
103	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN MARGA	3.834.571.900,00	3.725.459.900,00	24.126.500,00	37.329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.698.400,00	3.762.789.700,00
104	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000.000,00	0,00
105	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
106	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PENEBEL 1	1.907.684.726,00	2.455.827.745,00	262.500.000,00	293.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.184.726,00	2.748.827.745,00
107	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	0,00	69.098.974.606,00	0,00	17.049.803.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.148.777.616,00
108	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	136.300.000,00	119.679.200,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.300.000,00	319.679.200,00
109	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PENDIDIKAN	0,00	587.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.850.000,00
110	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN	309.373.739,00	307.723.739,00	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.494.739,00	309.844.739,00
111	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00	7.915.867.200,00	0,00	0,00	0,00	13.991.095.846,00	0,00	283.960.998.100,00	0,00	305.867.961.146,00
112	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PUPUAN	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
113	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.225.075.400,00	0,00	102.609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327.684.900,00	0,00
114	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.089.772.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.772.400,00	0,00
115	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	55.000.000,00	44.777.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	44.777.900,00
116	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	5.884.739.100,00	0,00	721.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605.926.700,00	0,00
117	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	13.586.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586.200,00
118	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PENEBEL	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00
119	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KEDIRI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
120	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN	405.299.900,00	389.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.299.900,00	389.990.000,00
121	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	DINAS KEBUDAYAAN	7.325.000.000,00	12.099.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.000.000,00	12.099.110.000,00
122	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	161.702.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.702.100,00
123	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.880.000.000,00	2.911.921.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000.000,00	2.911.921.400,00
124	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS BATURITI 1	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00
125	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	28.374.811.900,00	0,00	508.483.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883.295.500,00	0,00
126	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PUPUAN 2	581.947.000,00	581.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.947.000,00	581.947.000,00
127	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS MARGA 1	8.173.000,00	8.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173.000,00	8.173.000,00
128	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN BATURITI	90.680.900,00	75.338.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.680.900,00	75.338.900,00
129	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	37.184.765.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184.765.500,00	0,00
130	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	96.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.330.000,00	0,00
131	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KERAMBITAN 2	389.216.000,00	389.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.216.000,00	389.216.000,00
132	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SELEMADEG	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
133	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000.000,00	285.000.000,00
134	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.590.893.700,00	0,00	12.589.106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180.000.000,00	0,00
135	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	218.828.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.828.300,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
136	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	144.003.000,00	143.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.003.000,00	143.462.400,00
137	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	304.839.200,00	269.849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.839.200,00	269.849.200,00
138	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	125.000.000,00	123.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	123.398.000,00
139	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	290.000.000,00	346.420.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	346.420.700,00
140	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	176.643.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.643.100,00	0,00
141	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT	18.359.030.600,00	0,00	757.486.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116.516.800,00	0,00
142	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PUPUAN	3.504.936.500,00	75.896.200,00	44.859.300,00	44.859.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.795.800,00	120.755.500,00
143	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	249.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.960.000,00	349.860.000,00
144	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PENEBEL	4.125.193.800,00	0,00	96.536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.730.400,00	0,00
145	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
146	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00	1.413.220.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.220.000,00
147	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN	375.000.000,00	352.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	352.959.000,00
148	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	3.264.329.300,00	3.176.152.300,00	49.521.100,00	49.521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.850.400,00	3.225.673.400,00
149	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	559.212.400,00	562.221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.212.400,00	562.221.200,00
150	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	57.372.000.000,00	74.611.842.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.372.000.000,00	74.611.842.128,00
151	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.120.997.100,00	7.149.696.900,00	7.549.079.900,00	7.549.068.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670.077.000,00	14.698.765.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
152	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.217.490.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.490.800,00
153	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	403.688.400,00	385.091.900,00	2.968.067.600,00	2.968.067.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.756.000,00	3.353.159.500,00
154	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	25.000.000,00	124.655.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	124.655.500,00
155	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.499.310.000,00	6.550.449.800,00	11.392.443.000,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891.753.000,00	11.750.449.800,00
156	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000.000,00	0,00
157	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS TABANAN 2	897.616.043,00	1.484.390.620,00	30.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.616.043,00	1.634.390.620,00
158	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00	54.502.562.147,00	0,00	1.728.798.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.231.360.947,00
159	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.370.200.000,00	1.344.309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.200.000,00	1.344.309.200,00
160	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	88.000.000,00	44.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	44.950.000,00
161	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	534.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.796.000,00	0,00
162	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	0,00	246.261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.261.200,00
163	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.490.875.000,00	5.546.952.100,00	258.323.800,00	258.323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749.198.800,00	5.805.275.900,00
164	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SELEMADEG BARAT	887.467.000,00	887.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.467.000,00	887.467.000,00
165	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	392.800.000,00	391.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.800.000,00	391.285.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
166	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.118.546.800,00	1.085.912.700,00	2.725.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.546.800,00	1.530.912.700,00
167	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	288.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.150.000,00	0,00
168	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SELEMADEG BARAT	116.398.600,00	85.268.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.398.600,00	85.268.800,00
169	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN	0,00	126.289.600,00	0,00	23.710.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
170	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KERAMBITAN 2	843.665.069,00	1.286.107.856,00	80.000.000,00	175.378.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.665.069,00	1.461.486.201,00
171	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.090.000.000,00	1.206.021.600,00	44.307.500.000,00	55.211.292.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.397.500.000,00	56.417.314.269,00
172	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS PENEHEL 2	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00
173	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PUPUAN	0,00	3.674.657.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.657.200,00
174	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	200.000.000,00	194.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	194.589.000,00
175	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SELEMADEG BARAT	1.326.458.932,00	1.818.640.495,00	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.458.932,00	1.968.640.495,00
176	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PUPUAN 1	1.635.948.871,00	1.913.366.221,00	95.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.948.871,00	2.088.366.221,00
177	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PENEHEL	0,00	3.771.500.500,00	0,00	96.536.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.037.100,00
178	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2	315.327.000,00	315.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.327.000,00	315.327.000,00
179	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	79.597.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.597.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
180	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN TABANAN	86.000.000,00	78.551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	78.551.300,00
181	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN BATURITI	25.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	37.000.000,00
182	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.000.000,00	4.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.937.000,00
183	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	8.210.264.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.264.180,00
184	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.420.548.000,00	1.392.844.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.548.000,00	1.392.844.450,00
185	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KERAMBITAN 1	1.104.120.000,00	1.321.813.102,00	6.983.640,00	307.266.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.103.640,00	1.629.079.606,00
186	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS TABANAN 1	1.051.449.183,00	1.640.265.080,00	42.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.449.183,00	1.720.265.080,00
187	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PENEHEL	0,00	37.933.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.933.300,00
188	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KEDIRI 2	465.111.000,00	449.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.111.000,00	449.751.000,00
189	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN	310.000.000,00	526.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	526.632.000,00
190	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.174.070.900,00	0,00	99.687.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273.758.100,00	0,00
191	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BATURITI 2	869.794.219,00	1.041.720.498,00	94.329.000,00	144.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.123.219,00	1.186.049.498,00
192	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	835.000.000,00	809.920.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000.000,00	809.920.300,00
193	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PENEHEL	0,00	88.026.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.026.600,00
194	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3.509.013.800,00	4.182.741.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.013.800,00	4.182.741.200,00
195	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	1.313.537.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.537.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
196	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN TABANAN	25.000.000,00	21.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	21.580.000,00
197	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	95.000.000,00	92.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	92.438.000,00
198	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PENEBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS BATURITI 2	7.793.000,00	7.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793.000,00	7.793.000,00
200	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERIKANAN	0,00	731.739.100,00	0,00	698.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.739.100,00
201	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN	0,00	401.177.528.067,00	0,00	58.312.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.235.840.967,00
202	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.452.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.280.000,00	0,00
203	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.525.483.000,00	0,00	608.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.633.000,00	0,00
204	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SELEMADEG	918.149.000,00	918.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.149.000,00	918.149.000,00
205	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	63.513.470.168,00	67.284.401.674,00	4.522.173.980,00	3.879.416.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.035.644.148,00	71.163.818.454,00
206	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.706.185.900,00	6.392.198.200,00	49.981.400,00	49.981.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756.167.300,00	6.442.179.600,00
207	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA	3.405.098.800,00	2.541.494.300,00	16.549.692.438,00	17.413.296.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.954.791.238,00	19.954.791.238,00
208	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KEDIRI	25.000.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	36.050.000,00
209	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
210	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS SELEMADEG BARAT	9.339.000,00	9.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339.000,00	9.339.000,00
211	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 1	403.386.000,00	403.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.386.000,00	403.386.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
212	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SELEMADEG	3.355.675.100,00	3.267.497.900,00	47.820.800,00	47.820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.495.900,00	3.315.318.700,00
213	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	52.967.840.400,00	0,00	6.656.844.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.624.685.000,00	0,00
214	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	121.799.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.799.100,00
215	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PENDIDIKAN	537.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.850.000,00	0,00
216	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PUPUAN 2	925.499.680,00	1.174.533.723,00	102.833.298,00	175.505.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.332.978,00	1.350.038.762,00
217	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS KEDIRI 1	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00
218	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KEDIRI 1	1.757.887.604,00	2.796.857.143,00	240.000.000,00	735.876.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.887.604,00	3.532.733.379,00
219	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SELEMADEG TIMUR 2	451.969.221,00	558.000.000,00	0,00	50.478.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.969.221,00	608.478.332,00
220	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.338.186.000,00	2.302.160.000,00	764.400.000,00	244.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.586.000,00	2.546.180.000,00
221	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22.088.626.500,00	19.072.164.000,00	464.713.100,00	464.564.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.553.339.600,00	19.536.728.900,00
222	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	7.986.508.300,00	0,00	0,00	0,00	6.513.555.170,00	0,00	272.307.696.100,00	0,00	286.807.759.570,00	0,00
223	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	267.677.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.677.200,00	0,00
224	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SELEMADEG	1.670.989.303,00	1.971.735.999,00	100.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.989.303,00	2.093.735.999,00
225	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	225.000.000,00	224.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	224.265.000,00
226	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	636.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.510.000,00	0,00
227	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS MARGA 1	1.175.981.859,00	1.797.439.893,00	118.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.981.859,00	1.997.439.893,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
228	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BATURITI	3.974.279.800,00	3.974.120.800,00	49.395.000,00	49.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.674.800,00	4.023.515.800,00
229	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS PUPUAN 2	14.253.000,00	14.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253.000,00	14.253.000,00
230	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN	11.570.000.000,00	28.044.706.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.000.000,00	28.044.706.800,00
231	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30.000.000,00	27.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.230.000,00
232	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	50.000.000,00	5.752.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	44.252.000,00
233	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	54.830.555.400,00	0,00	6.657.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488.150.000,00
234	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	0,00	3.700.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.278.000,00
235	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS MARGA 2	405.530.000,00	405.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.530.000,00	405.530.000,00
236	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	3.302.500.000,00	1.242.439.800,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.500.000,00	3.742.439.800,00
237	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PNEBEL 1	683.598.000,00	683.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.598.000,00	683.598.000,00
238	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PENDIDIKAN	0,00	5.455.673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.673.700,00
239	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BATURITI 2	469.009.000,00	469.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.009.000,00	469.009.000,00
240	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	182.504.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.504.300,00
241	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.000.000,00	36.751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	36.751.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
242	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	549.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.519.000,00
243	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	0,00	446.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.880.000,00
244	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS TABANAN 1	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055.000,00	8.055.000,00
245	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	233.380.600,00	241.153.000,00	99.469.800,00	175.855.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.850.400,00	417.008.800,00
246	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS KERAMBITAN 2	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00
247	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	0,00	1.078.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.181.000,00
248	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.145.120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145.120.100,00	0,00
249	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS KEDIRI 3	6.617.000,00	6.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.000,00	6.617.000,00
250	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS MARGA 2	973.180.342,00	1.212.144.436,00	30.000.000,00	164.192.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.180.342,00	1.376.336.924,00
251	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS MARGA 2	9.605.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605.000,00	9.605.000,00
252	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	2.312.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.052.000,00
253	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.856.720.100,00	0,00	721.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577.907.700,00
254	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA	1.436.901.200,00	1.840.881.200,00	563.098.800,00	1.400.317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	3.241.198.300,00
255	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS TABANAN 3	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00	5.016.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
256	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BATURITI 1	1.857.809.879,00	2.431.591.995,00	219.140.740,00	219.140.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.950.619,00	2.650.732.735,00
257	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN	16.715.406.100,00	0,00	124.997.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840.403.500,00	0,00
258	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KERAMBITAN	24.999.900,00	34.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999.900,00	34.999.900,00
259	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	8.191.615.400,00	0,00	227.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419.187.800,00
260	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	28.716.295.900,00	0,00	547.094.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.263.390.300,00
261	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00
262	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN	441.972.256.300,00	0,00	49.026.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.021.282.700,00	0,00
263	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	1.775.752.000,00	2.197.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.752.000,00	2.197.378.000,00
264	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	100.000.000,00	5.096.329.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	5.096.329.100,00
265	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.240.087.800,00	0,00	99.994.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.082.600,00	0,00
266	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	15.329.460.000,00	18.183.599.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329.460.000,00	18.183.599.300,00
267	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	24.740.000,00	87.284.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740.000,00	87.284.200,00
268	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS MARGA 1	679.067.000,00	679.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.067.000,00	679.067.000,00
269	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	0,00	2.683.127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.127.600,00
270	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	2.993.804.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.804.800,00	0,00
271	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PUSKESMAS PUPUAN 1	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
272	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	399.711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.711.700,00	0,00
273	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN MARGA	25.000.000,00	31.566.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	31.566.700,00
274	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERIKANAN	453.875.000,00	0,00	536.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.291.000,00	0,00
275	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.363.512.900,00	2.564.800.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.512.900,00	2.564.800.400,00
276	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT	5.205.859.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205.859.400,00	0,00
277	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00
278	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PARIWISATA	5.167.555.600,00	5.247.016.400,00	49.270.600,00	49.270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216.826.200,00	5.296.287.000,00
279	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	66.958.445.775,00	0,00	16.682.911.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.641.357.010,00	0,00
280	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.118.080.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.080.000,00	0,00
281	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANIAN	22.521.214.000,00	19.229.058.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.521.214.000,00	19.229.058.480,00
282	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BATURITI 1	749.377.000,00	722.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.377.000,00	722.137.000,00
284	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT	0,00	3.468.103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.103.700,00
285	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PUPUAN 1	578.896.000,00	578.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.896.000,00	578.896.000,00
286	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KERAMBITAN	3.253.469.600,00	3.163.614.460,00	47.988.000,00	47.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.457.600,00	3.211.602.460,00
287	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	873.082.600,00	0,00	40.412.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.495.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
288	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketragekerjaan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	450.000.000,00	408.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	408.960.000,00
289	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.724.444.600,00	3.728.032.800,00	28.111.500,00	28.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.556.100,00	3.756.144.300,00
290	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	188.830.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.830.800,00
291	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	738.000.000,00	850.587.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000.000,00	850.587.600,00
TOTAL					1.705.994.652.645,00	1.748.579.156.008,00	218.669.823.796,00	245.975.796.734,00	6.513.555.179,00	13.891.895.848,00	272.367.888.108,00	283.940.998.108,00	2.284.293.728.711,00	2.293.967.838.736,00



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
288	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	450.000.000,00	408.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	408.960.000,00
289	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.724.444.600,00	3.728.032.900,00	28.111.500,00	28.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.556.100,00	3.756.144.400,00
290	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	188.830.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.830.600,00
291	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	738.000.000,00	850.597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000.000,00	850.597.800,00
TOTAL					1.705.994.653.645,00	1.749.579.156.006,00	219.469.823.796,00	245.975.780.784,00	6.513.555.170,00	13.991.095.846,00	272.307.696.100,00	283.960.998.100,00	2.204.285.728.711,00	2.293.507.030.736,00

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA.

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
PER - GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	8	-	9
Golongan IV/c	-	24	-	-	-	248	1	273
Golongan IV/b	-	5	32	2	-	355	2	396
Golongan IV/a	-	-	86	48	-	277	10	421
JUMLAH GOLONGAN IV	-	30	118	50	-	889	13	1.100
Golongan III/d	-	-	34	218	-	642	218	1.112
Golongan III/c	-	-	1	48	-	240	205	494
Golongan III/b	-	-	-	17	-	533	252	802
Golongan III/a	-	-	-	1	-	105	341	447
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	35	284	-	1.520	1.016	2.855
Golongan II/d	-	-	-	-	-	105	182	287
Golongan II/c	-	-	-	-	-	45	96	141
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	53	53
Golongan II/a	-	-	-	-	-	2	13	15
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	152	344	496
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	18	18
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	21	21
PPPK	-	-	-	-	-	3.207	-	3.207
JUMLAH PPPK	-	-	-	-	-	3.207	-	3.207
TOTAL	-	30	153	334	-	5.768	1.394	7.679





PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
PER - GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	8	-	9
Golongan IV/c	-	24	-	-	-	248	1	273
Golongan IV/b	-	5	32	2	-	355	2	396
Golongan IV/a	-	-	86	48	-	277	10	421
JUMLAH GOLONGAN IV	-	30	118	50	-	889	13	1.100
Golongan III/d	-	-	34	218	-	642	218	1.112
Golongan III/c	-	-	1	48	-	240	205	494
Golongan III/b	-	-	-	17	-	533	252	802
Golongan III/a	-	-	-	1	-	105	341	447
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	35	284	-	1.520	1.016	2.855
Golongan II/d	-	-	-	-	-	105	182	287
Golongan II/c	-	-	-	-	-	45	96	141
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	53	53
Golongan II/a	-	-	-	-	-	2	13	15
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	152	344	496
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	18	18
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	21	21
PPPK	-	-	-	-	-	3.207	-	3.207
JUMLAH PPPK	-	-	-	-	-	3.207	-	3.207
TOTAL	-	30	153	334	-	5.768	1.394	7.679

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2023	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2024	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2024	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		83.751.345.752,14	11.411.895.669,31		95.163.241.421
2	Piutang Retribusi Daerah		2.501.954.878,00	21.583.962.672,33		24.085.917.550
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	9.667.069.204,62		9.667.069.205
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		20.825.883.227,51		18.408.247.668,45	2.417.635.559
5	Piutang Transfer Antar Daerah		84.297.705.472,00		50.967.269.691,00	33.330.435.781
JUMLAH			191.376.889.329,65	31.251.031.876,95	69.375.517.359,45	164.664.299.516,46





PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2023	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2024	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2024	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		83.751.345.752,14	11.411.895.669,31		95.163.241.421
2	Piutang Retribusi Daerah		2.501.954.878,00	21.583.962.672,33		24.085.917.550
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	9.667.069.204,62		9.667.069.205
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		20.825.883.227,51		18.408.247.668,45	2.417.635.559
5	Piutang Transfer Antar Daerah		84.297.705.472,00		50.967.269.691,00	33.330.435.781
JUMLAH			191.376.889.329,65	31.251.031.876,95	69.375.517.359,45	164.664.299.516,46

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

Lampiran XII : Peraturan Daerah
 Nomor : 05 Tahun 2025
 Tanggal : 15 Oktober 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISETORKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2019	PDAM	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 2 Oktober 2013 tentang Peraturan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tata Airerba Bimas		129.141.957.951,00	90.645.939.440,04	-	90.645.939.440,04	29.496.018.510,96	6.392.189.024,00	-	126.534.146.977,00
2	2016	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali	Penyertaan Modal dalam bentuk saham daerah	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	-	31.000.000.000,00	-	-	-	31.000.000.000,00
3	2016	PD Elharma Sentika	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Elharma Sentika		4.995.491.422,00	4.995.491.422,00	-	4.995.491.422,00	-	1.595.311.922,00	-	3.400.169.500,00
4	2016	PT. Jendrala Bali Mandiri	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penanaman Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan Pada PT. Puncakmas Energi Daerah Bali Mandiri Peroran Bali	Penyertaan Modal dalam bentuk saham daerah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	-	-	-	1.300.000.000,00
JUMLAH					167.443.449.373,00	137.947.430.862,04	-	137.947.430.862,04	29.496.018.510,96	4.796.867.104,00	-	162.240.316.477,00





PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISETORKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2019	PDAM	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana		120.141.957.951,00	90.645.939.440,04	-	90.645.939.440,04	29.496.018.510,96	6.392.189.026,00	-	126.534.146.977,00
2	2016	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali	Penyertaan Modal dalam bentuk saham daerah	31.006.000.000,00	31.006.000.000,00	-	31.006.000.000,00	-		-	31.006.000.000,00
3	2016	PD. Dharma Santika	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Dharma Santika		4.995.491.422,00	4.995.491.422,00	-	4.995.491.422,00	-	- 1.595.321.922,00	-	3.400.169.500,00
4	2016	PT. Jamkrida Bali Mandara	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	Penyertaan Modal dalam bentuk saham daerah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	-		-	1.300.000.000,00
JUMLAH					157.443.449.373,00	127.947.430.862,04	-	127.947.430.862,04	29.496.018.510,96	4.796.867.104,00	-	162.240.316.477,00

BUPATI TABANAN.

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2023	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2024	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2024	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 5+5-6
1	TANAH		609.745.420.102,42	5.606.863.568,00	0,00	615.352.283.670,42
2	PERALATAN DAN MESIN		662.104.813.764,39	37.019.967.117,78	0,00	699.124.780.882,17
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		1.063.543.422.489,17	116.090.806.868,42	0,00	1.179.634.229.357,59
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		1.977.512.601.004,09	137.622.946.223,48	0,00	2.115.135.547.227,57
5	ASET TETAP LAINNYA		16.882.866.536,50	631.106.817,00	0,00	17.513.973.353,50
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		37.389.441.702,68	0,00	2.652.111.460,38	34.737.330.242,30
	JUMLAH		4.367.178.565.599,25	296.971.690.594,68	2.652.111.460,38	4.661.498.144.733,55





PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2023	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2024	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2024	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 5+5-6
1	TANAH		609.745.420.102,42	5.606.863.568,00	0,00	615.352.283.670,42
2	PERALATAN DAN MESIN		662.104.813.764,39	37.019.967.117,78	0,00	699.124.780.882,17
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		1.063.543.422.489,17	116.090.806.868,42	0,00	1.179.634.229.357,59
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		1.977.512.601.004,09	137.622.946.223,48	0,00	2.115.135.547.227,57
5	ASET TETAP LAINNYA		16.882.866.536,50	631.106.817,00	0,00	17.513.973.353,50
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		37.389.441.702,68	0,00	2.652.111.460,38	34.737.330.242,30
	JUMLAH		4.367.178.565.599,25	296.971.690.594,68	2.652.111.460,38	4.661.498.144.733,55

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN OBLIGASI	JUMLAH PERJANJIAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI- OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN	PROSENTASE BUNGA PINJAMAN %	TAHUN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp)		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT.Sarana Multi Infrastruktur	PERJ-097/SMI/C721	26 Juli 2021	125.000.000.000	8 Tahun	6,19%	2021	40.458.585.861	23.698.664.527	76.421.799.006	10.408.412.254
JUMLAH				125.000.000.000				40.458.585.861	23.698.664.527	76.421.799.006	10.408.412.254,00





PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN OBLIGASI	JUMLAH PERJANJIAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI- OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN	PROSENTASE BUNGA PINJAMAN %	TAHUN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp)		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT.Sarana Multi Infrastruktur	PERJ-097/SMI/0721	26 Juli 2021	125.000.000.000	8 Tahun	6,19%	2021	40.458.585.861	23.698.664.527	76.421.799.006	10.408.412.254
JUMLAH				125.000.000.000				40.458.585.861	23.698.664.527	76.421.799.006	10.408.412.254,00

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA